



SALINAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN

No. 32, 2021

PEMERINTAH
SELATAN.

KOTA

TANGERANG

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2021.

PROVINSI BANTEN PERATURAN WALI KOTA TANGERANG SELATAN NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sampai dengan triwulan II tahun 2021, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa kegiatan pada jumlah, jenis dan rincian yang berimplikasi terhadap perubahan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
9. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 73);
10. Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD sebelum disepakati dengan DPRD.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai landasan penyusunan perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Pasal 3

- (1) Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021 terdiri dari:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil triwulan II Tahun 2021;
 - c. kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
 - f. kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - g. penutup.

- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang Selatan.

Ditetapkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 25 Agustus 2021
WALI KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BENYAMIN DAVNIE

Diundangkan di Tangerang Selatan
pada tanggal 26 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN,
ttd.

BAMBANG NOERTJAHJO

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Ciputat, 23 September 2021
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA TANGERANG SELATAN
Kepala Bagian Hukum,



Mohammad Ervin Ardani

Lampiran
Peraturan Wali Kota Tangerang Selatan
Nomor 31 Tahun 2021
Tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

Penguatan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi



**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Tangerang Selatan
2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	I
DAFTAR TABEL	I
DAFTAR GAMBAR	IV
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. DASAR HUKUM.....	2
1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN	3
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.5. SISTEMATIKA PERUBAHAN RKPD TAHUN 2021	5
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021	7
2.1. KONDISI UMUM DAERAH	7
2.1.1. <i>Aspek Geografi dan Demografi</i>	7
2.1.2. <i>Aspek Kesejahteraan Masyarakat</i>	18
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	18
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial	24
2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga	28
2.1.3. <i>Aspek Pelayanan Umum</i>	29
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	29
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan	36
2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan.....	37
2.1.4. <i>Aspek Daya Saing Daerah</i>	38
2.2. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN RKPD SAMPAI TRIWULAN II DAN REALISASI RPJMD	44
2.3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH	71
2.3.1. <i>Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah</i>	72
2.3.2. <i>Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah</i>	73
BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH	75
3.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH.....	75
3.1.1. <i>Pertumbuhan Ekonomi Nasional</i>	75
3.1.2. <i>Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten</i>	78
3.1.3. <i>Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan</i>	80
3.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	86
3.2.1. <i>Arah Kebijakan Pendapatan</i>	88
3.2.2. <i>Arah Kebijakan Belanja Daerah</i>	90
3.2.3. <i>Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah</i>	94
3.3. INOVASI DAERAH	96
3.3.1. <i>Pemanfaatan Inovasi Daerah</i>	96
3.3.2. <i>Potensi Pengembangan Inovasi Daerah</i>	97
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	99
4.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN	99
4.2. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2021	103
4.2.1. <i>Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021</i>	103
4.2.2. <i>Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021</i>	104
4.2.3. <i>Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021</i>	104

4.2.4. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional	136
4.2.5. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Banten.....	138
4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	141
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	142
5.1. RENCANA PERUBAHAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2021	142
5.2. RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD ATAS LKPJ WALIKOTA TAHUN 2020.....	436
BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	467
6.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	467
BAB VII PENUTUP.....	469

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan.....	8
Tabel 2.2.	Bentuk Lahan dan Jenis Tanah di Kota Tangerang Selatan.....	10
Tabel 2.3.	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020	14
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.....	15
Tabel 2.5.	Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020	15
Tabel 2.6.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.....	16
Tabel 2.7.	Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan.....	17
Tabel 2.8.	Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020.....	20
Tabel 2.9.	Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga di Tangerang Selatan	28
Tabel 2.10.	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	29
Tabel 2.11.	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020	30
Tabel 2.12.	Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2.13.	Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	33
Tabel 2.14.	Rekapitulasi Cakupan Rumah Layak Huni Per-Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021	34
Tabel 2.15.	Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	35
Tabel 2.16.	Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020	35
Tabel 2.17.	Capaian Kinerja Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.18.	Capaian Kinerja Pertanian Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020	36
Tabel 2.19.	Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	37
Tabel 2.20.	Kinerja Urusan Keuangan Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	37

Tabel 2.21.	Derajat Keterbukaan Ekonomi Kota Tangerang Selatan 2016-2020.....	38
Tabel 2.22.	Perkembangan Komponen Konsumsi Rumah tangga Kota Tangerang Selatan, 2016-2020.....	39
Tabel 2.23.	Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan, 2010-2019.....	43
Tabel 2.24.	Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin.....	43
Tabel 2.25.	Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Selatan sd Triwulan IV tahun 2020.....	44
Tabel 2.26.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II.....	46
Tabel 3.1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020.....	75
Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021.....	76
Tabel 3.3.	Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.....	77
Tabel 3.4.	Realisasi LPE Triwulanan dan Tahunan Nasional dan Banten.....	79
Tabel 3.5.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2021.....	79
Tabel 3.6.	Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam Persen).....	82
Tabel 3.7.	Proyeksi Inflasi Nasional, Banten dan Kota Tangerang Selatan.....	83
Tabel 3.8.	Perkiraan TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam persen).....	84
Tabel 3.9.	Proyeksi Persentase Kemiskinan Nasional, Banten dan Kota Tangerang.....	85
Tabel 3.10.	Target Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.....	87
Tabel 3.11.	Perubahan Target Pendapatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.....	89
Tabel 3.12.	Mandatoty Spending Kota Tangerang Selatan TA 2021.....	91
Tabel 3.13.	Perubahan Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.....	94
Tabel 3.14.	Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021	94
Tabel 4.1.	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.....	100
Tabel 4.2.	Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.....	104
Tabel 4.3.	Sasarab Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.....	109
Tabel 4.4.	Indikasi Rencana Program Prioritas RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020.....	110
Tabel 4.5.	Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Nasional (RKP Tahun 2021).....	136
Tabel 4.6.	Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Banten.....	138
Tabel 4.7.	Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional.....	140

Tabel 5.1.	Rancangan Belanja Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021	142
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021	144
Tabel 5.3.	Tindak lanjut Rekomendasi DPRD atas LKJP Walikota Tangerang Selatan TA 2020.....	437
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) Prioritas Kota Tangerang Selatan Tahun 2021	467

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Alur Penyusunan RKPD	4
Gambar 1.2.	Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Kab/Kota dan OPD.....	4
Gambar 2.1.	Peta Wilayah Administratif Kota Tangerang Selatan	8
Gambar 2.2.	Intensitas Hujan Harian pada Area Tangerang Selatan Bulan Mei 2021	10
Gambar 2.3.	Suhu Udara Harian pada Area Tangerang Selatan Bulan Mei 2021	11
Gambar 2.4.	Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020.....	17
Gambar 2.5.	Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020	19
Gambar 2.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020	20
Gambar 2.7.	PDRB Per Kapita di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020	22
Gambar 2.8.	Angka Inflasi Tahunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020	22
Gambar 2.9.	Indeks Gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020	23
Gambar 2.10.	Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020	24
Gambar 2.11.	Nilai TPAK Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 – 2020.....	25
Gambar 2.12.	TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020.....	25
Gambar 2.13.	Angka Harapan Hidup di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020.....	26
Gambar 2.14.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020.....	27
Gambar 2.15.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tangerang Selatan 2016-2020	27
Gambar 2.16.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Tangerang Selatan 2016-2020.....	39
Gambar 2.17.	Permasalahan Pembangunan Daerah	71
Gambar 3.2.	Proyeksi Inflasi Kota Tangerang Selatan 2021	83
Gambar 3.3.	Proyeksi Angka Pengangguran Terbuka (%) Kota Tangerang Selatan.....	84
Gambar 3.4.	Proyeksi Angka Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang Selatan.....	85

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021. Namun demikian, seiring dengan dinamika pembangunan dengan berbagai faktor tentu saja mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang berjalan senantiasa perlu di evaluasi. Dinamika pembangunan dalam tahun berjalan juga diiringi dengan perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan dinamika perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan tersebut tentu saja memerlukan penyempurnaan dari sisi perencanaan pembangunan. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut dapat berupa perubahan target dan lain-lain. Penyempurnaan perencanaan pembangunan tersebut disajikan dalam bentuk Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021. Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, disusun guna menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021.

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat diubah apabila tidak sesuai dengan keadaan dalam tahun berjalan yang disebabkan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Perlu disampaikan bahwa, Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 yang disusun ini menyangkut waktu pemberlakuan RPJMD Kota Tangerang Selatan periode Tahun 2021-2026, dimana RPJMD Tahun 2021-2026 secara normal akan mulai berlaku pada bulan Oktober 2021 (Penetapan RPJMD paling lambat 6 bulan sejak dilantiknya Kepala Daerah terpilih). Sementara itu, sesuai dengan Pasal 355 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD paling lambat minggu ketiga bulan Juli. Dengan demikian, apabila mengacu pada ketentuan ini, maka, Perubahan RKPD Tahun 2021 masih mengacu pada RPJMD Tahun 2016-2021.

Namun demikian, mempertimbangkan masa kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota terpilih yang sudah dimulai sejak tanggal 26 Februari 2021, maka implementasi program dan kegiatan akan mewarnai sejak awal masa kepemimpinan, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2021. Kondisi ini menempatkan perencanaan dan penganggaran tahun 2021 sebagai tahun transisi, yaitu sebagian masih mengacu pada perencanaan jangka menengah sebelumnya (RPJMD 2016-2021) dan sebagian lagi mengacu pada perencanaan jangka menengah sesudahnya, yaitu RPJMD 2021-2026.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4935);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
4. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

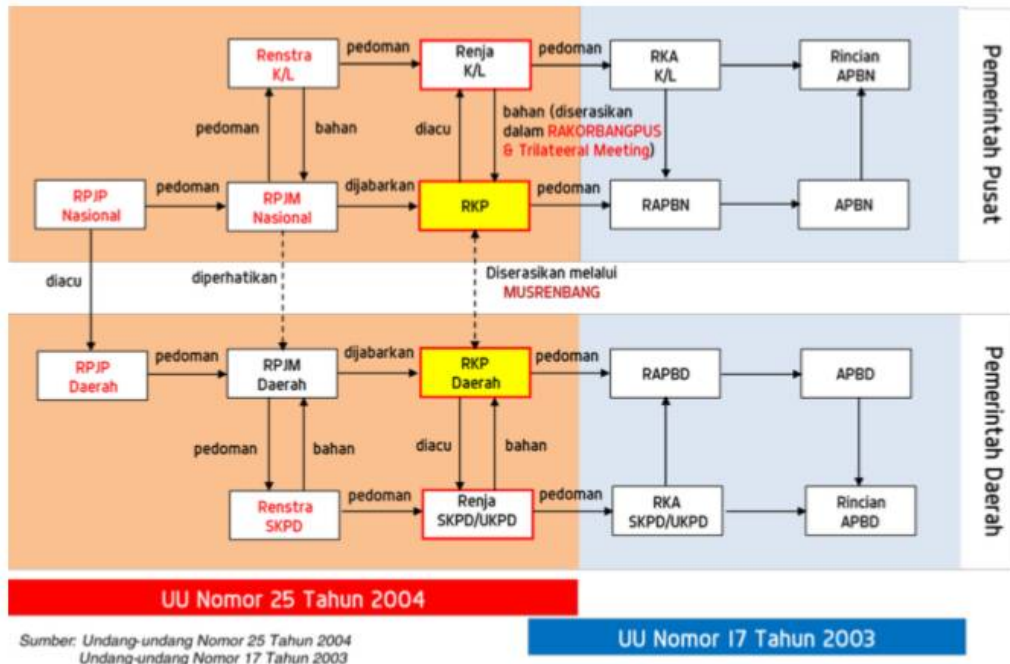
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030
17. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Banten Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0112);
20. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
21. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tangerang Selatan 2016-2021. (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 73);
22. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021;
23. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

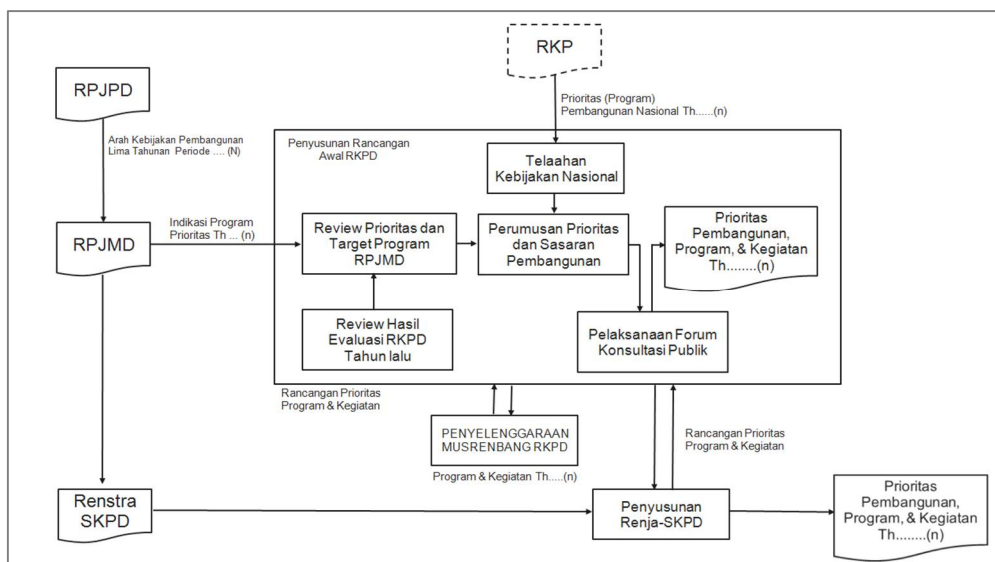
Kebijakan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan yang dituangkan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 terkait dan sejalan dengan arah pembangunan yang dimuat dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Banten dan dokumen perencanaan Kota Tangerang Selatan. Hal ini merupakan amanat Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Perencanaan pembangunan nasional yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2020-2024, dimana visi pembangunan nasional tahun 2020-2024 adalah **"Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**. Dan Perencanaan Provinsi Banten yang diperhatikan dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 yaitu Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 tahun 2019 tentang perubahan atas Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Dengan demikian, dokumen Perubahan RKP Kota Tangerang Selatan merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dan mengacu pada RPJMD Propinsi Banten Tahun 2017-2022 dan RPJMN Tahun 2020-2024, yang selanjutnya dokumen Perubahan RKP Kota Tangerang Selatan akan dijadikan landasan bagi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan dalam rangka penyusunan RAPBD Perubahan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021), secara diagramatik alur penyusunan RKP ini dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1.1. Alur Penyusunan RKP



Sumber : Undang-undang 25 Tahun 2004

Gambar 1.2. Hubungan dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional, Kab/Kota dan OPD

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 disusun dengan maksud untuk:

- a. Menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2021;
- b. Ditetapkan dengan Peraturan Walikota sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah, pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2021.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 adalah:

- a. Sinkronisasi dan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang belum terakomodir pada APBD Tahun Anggaran 2021;
- b. Mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang bersifat sangat prioritas/mendesak dan menampung kegiatan yang mengalami pergeseran anggaran dalam rangka pencapaian Visi Misi Walikota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2021;**
- c. Pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) atas realisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020;
- d. Menyesuaikan perubahan proyeksi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai dampak dari pandemi COVID-19;
- e. Sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

1.5. Sistematika Perubahan RKPD Tahun 2021

Sistematika Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang penyusunan Perubahan RKPD, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen Perubahan RKPD dengan dokumen rencana pembangunan daerah lainnya, maksud dan tujuan penyusunan Perubahan RKPD, serta sistematika dokumen.

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II RKPD TAHUN 2021

Berisi hasil evaluasi Triwulan II RKPD Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun 2021, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah dalam mendanai pembangunan daerah Tahun 2021, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dengan uraian sampai dengan kelompok, jenis dan obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan.

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan arah kebijakan pembangunan daerah jangka menengah, prioritas pembangunan nasional, provinsi dan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021, serta keterkaitan arah kebijakan pada tiap tingkatan pemerintahan.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini memuat dan mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah Tahun 2021 disertai dengan indikator kinerja dan kerangka pendanaan pada tahun 2021.

BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat dan menjelaskan perubahan target kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun berjalan dengan memperhatikan kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2021.

BAB VII: PENUTUP

Berisi penegasan bahwa dalam penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 telah dilakukan upaya agar sinkron dengan kebijakan Pusat maupun Provinsi Banten Tahun 2021.

BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2021

2.1. Kondisi Umum Daerah

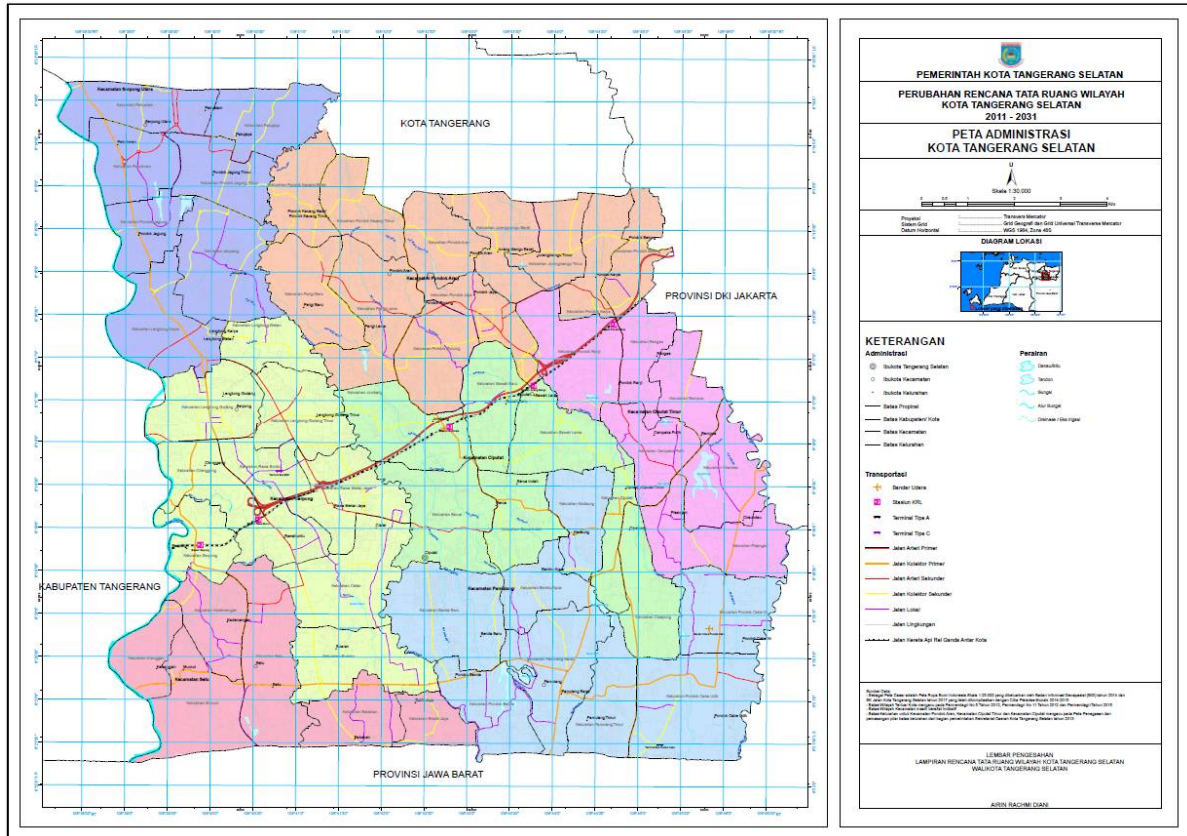
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Pembentukan Kota Tangerang Selatan sebagai daerah otonom pada tahun 2008 merupakan bentuk upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan pemerintahan, pengembangan potensi daerah, serta pembangunan kota. Kota Tangerang Selatan terbentuk melalui hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten.

Kota Tangerang Selatan terbagi menjadi 7 (tujuh) Kecamatan dan 54 (lima puluh empat) kelurahan. Terletak di bagian timur Provinsi Banten pada koordinat 106°38' – 106°47' Bujur Timur dan 06°13'30" – 06°22'00" Lintang Selatan, Kota Tangerang Selatan memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kota Tangerang dan Provinsi DKI Jakarta;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok dan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang

Posisi tersebut menjadikan Tangerang Selatan sebagai kota yang berpotensi strategis secara ekonomi karena menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat (termasuk didalamnya kawasan Megapolitan Jabodetabek). Berikut merupakan peta administratif Kota Tangerang Selatan:



Gambar 2.1. Peta Wilayah Administratif Kota Tangerang Selatan

Sumber: Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 - 2031

Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah sebesar 164,85 kilometer persegi (km²) (Perubahan dari angka 147,9 Km² berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Selatan Tahun 2011 – 2031). Kecamatan Pondok Aren menempati posisi dengan luas wilayah terbesar yaitu 29,79 Km² sebesar 18,1 persen dari luas kota, sedangkan Kecamatan Setu menempati posisi dengan luas wilayah paling kecil, yaitu sebesar 16,76 Km², sekitar 10,2 persen dari luas kota. Keterangan luas lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kota (%)
1	Serpong	28,27	17,15%
2	Serpong Utara	22,36	13,56%
3	Ciputat	21,11	12,81%
4	Ciputat Timur	17,81	10,81%
5	Pamulang	28,74	17,43%
6	Pondok Aren	29,79	18,1%
7	Setu	16,76	10,2%
Kota Tangerang Selatan		164,85	100,00%

Sumber: Perda No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang RTRW Tahun 2011 – 2031

a. Topografi

Jika dilihat dari topografi sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan merupakan dataran rendah, dimana sebagian besar wilayah Kota Tangerang Selatan memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0 – 3% sedangkan ketinggian wilayah antara 0 – 25 m dpl.

Untuk kemiringan pada garis besarnya terbagi atas 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Kemiringan antara 0 – 3% meliputi Kecamatan Ciputat, kecamatan Ciputat Timur, Kecamatan Pamulang, Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
2. Kemiringan antara 3 – 8% meliputi Kecamatan Pondok Aren dan Kecamatan Setu.

b. Geologi

Berdasarkan Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kota Tangerang dan Tangerang Selatan, kawasan Tangerang selatan didominasi oleh kawasan yang termasuk pada zona kerentanan gerakan tanah yang rendah dan sangat rendah untuk di beberapa kawasan yang mendekati daerah Kota Tangerang. Sedangkan zona kerentanan gerakan rendah ditemui pada kawasan tepi sungai. Kondisi geologi menurut Peta Lembar Jakarta dan Kepulauan Seribu Nomor 1209 tahun 1992 yang dikeluarkan oleh Direktorat Geologi Departemen Pertambangan dan Energi, secara umum dibentuk oleh dua formasi batuan, yaitu:

- Batuan Aluvium (Qa) yang terdiri dari aluvial sungai dan rawa yang berbentuk pasir, lempung, lanau, kerikil, kerakal dan sisa tumbuhan. Jenis tanah ini pada dasarnya merupakan lapisan yang subur bagi tanaman pertanian.
- Batuan Gunung Api yang berupa material lepas yang terdiri dari lava andesit, dasit, breksi tuf dan tuf. Secara fisik Lava Andesit berwarna kelabu hitam dengan ukuran sangat halus, afanitik dan menunjukkan struktur aliran, dan Breksi Tuf dan Tuf pada umumnya telah lapuk, mengandung komponen Andesit dan Dasit. Pada umumnya tanah jenis ini digunakan sebagai kebun campuran, perumahan dan tegalan.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang relatif datar. Adapun pada beberapa Kecamatan terdapat lahan yang bergelombang seperti di perbatasan antara Kecamatan Setu dan kecamatan Pamulang serta sebagian di kecamatan Ciputat Timur. Kondisi geologi Kota Tangerang Selatan umumnya adalah batuan alluvium, yang terdiri dari batuan lempung, lanau, pasir, kerikil, kerakal dan bongkah. Berdasarkan klasifikasi dari *United Soil Classification System*, batuan ini mempunyai kemudahan dikerjakan atau *workability* yang baik sampai sedang, unsur ketahanan terhadap erosi cukup baik oleh karena itu wilayah Kota Tangerang Selatan masih cukup layak untuk kegiatan perkotaan.

Dilihat dari sebaran jenis tanahnya, pada umumnya di Kota Tangerang Selatan berupa asosiasi latosol merah dan latosol coklat kemerahan yang secara umum cocok untuk pertanian/ perkebunan. Meskipun demikian, dalam kenyataannya makin banyak yang berubah penggunaannya untuk kegiatan lainnya yang bersifat non-pertanian. Untuk sebagian wilayah seperti Kecamatan Serpong dan Kecamatan Setu, jenis tanah ada yang mengandung pasir khususnya untuk wilayah yang dekat dengan Sungai Cisadane.

Tabel 2.2. Bentuk Lahan dan Jenis Tanah di Kota Tangerang Selatan

No	Kecamatan	Lahan	Jenis Tanah
1	Serpong	datar	mengandung pasir
2	Serpong Utara	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
3	Ciputat	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
4	Ciputat Timur	bergelombang	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
5	Pamulang	bergelombang	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
6	Pondok Aren	datar	latosol merah dan latosol coklat kemerahan
7	Setu	bergelombang	mengandung pasir

Sumber: Materi Teknis RTRW Kota Tangerang Selatan

c. Hidrologi

Kota Tangerang Selatan memiliki sumber daya air yang cukup melimpah, baik air tanah maupun air permukaan. Potensi air permukaan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur perkotaan yang berkelanjutan, baik pemanfaatan untuk keperluan penyediaan air bersih domestik maupun non domestik (sebagai alternatif penyediaan yang lebih berkelanjutan tentunya diiringi dengan upaya peningkatan kualitas air permukaan) maupun kepentingan pembangunan sarana publik seperti ruang terbuka.

d. Klimatologi

Berdasarkan pengamatan Balai Besar BMKG Wilayah II Tangerang Selatan, iklim Mikro Stasiun Klimatologi Tangerang Selatan Bulan Mei 2021 menunjukkan bahwa selama bulan Mei 2021 Tidak Terjadi Hujan sebesar 42%, Hujan Ringan sebesar 38%, Hujan Sedang sebesar 10% dan Hujan Lebat sebesar 10%.



Gambar 2.2. Intensitas Hujan Harian pada Area Tangerang Selatan Bulan Mei 2021

Sumber: Balai Besar BMKG Wilayah II Tangerang Selatan 2021

Sedangkan, suhu udara pada bulan Mei 2021 rata-rata di wilayah Tangerang Selatan berkisar antara 25.7 – 30.5 o C. Suhu maksimum absolut ditunjukkan dengan garis merah terjadi pada tanggal 11 sebesar 34.4 o C. Sedangkan suhu minimum absolut ditunjukkan dengan garis biru terjadi pada tanggal 18 dan 19 sebesar 23.0 o C.



Gambar 2.3. Suhu Udara Harian pada Area Tangerang Selatan Bulan Mei 2021

Sumber: Balai Besar BMKG Wilayah II Tangerang Selatan 2021

e. Potensi Rawan Bencana

Sampai dengan pertengahan tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tangerang Selatan menginformasikan hujan dengan intensitas tinggi memicu tanah longsor dan banjir di wilayah kota Tangerang Selatan. Banjir diawali dengan tersumbatnya Sungai Ciputat karena longsor dari tebing sungai. Saat peristiwa ini terjadi, 3 rumah warga mengalami kerusakan, sedangkan ketinggian muka air terpantau sekitar 60 – 80 cm.

Terdapat dua kecamatan terdampak yaitu di Kecamatan Ciputat (Kelurahan Cipayung dan Pisangan) dan Kecamatan Pamulang (Kelurahan Pondok Cabe Ilir). Kejadian tersebut memberikan dampak kepada 4.00 jiwa. Sedangkan warga yang sempat mengungsi sebanyak 90 jiwa. Di samping adanya pengungsian, dua warga mengalami luka-luka.

Upaya penanganan darurat telah dilakukan berbagai instansi di tingkat pemerintah daerah. BPBD Kota Tangerang Selatan telah melakukan kaji cepat dan mengevakuasi korban terdampak. Selain itu, BPBD juga mendistribusikan bantuan berupa logistik dan alat-alat kebersihan kepada warga yang terdampak.

Dihimpun dari laman lawancovid19.tangerangselatankota.go.id tanggal 22 Juli 2021, total kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Kota Tangerang Selatan sudah berjumlah 14.445 kasus. Penambahan kasus terbanyak berasal dari Kecamatan Ciputat, yakni sebanyak 25 kasus. Sementara, Setu dan Serpong Utara dilaporkan tidak mengalami penambahan sama sekali pada hari ini.

Sementara itu, penambahan pasien yang dinyatakan sembuh sebanyak 20 orang. Sehingga, jumlah pasien yang sudah dinyatakan sembuh mencapai 11.633 orang. Adapun, angka kematian akibat Covid-19 di Kota Tangerang Selatan bertambah 2 kasus. Dengan demikian, total pasien terkonfirmasi positif Covid-19 yang meninggal dunia sebanyak 479 orang. Selain itu, pasien yang masih dirawat atau menjalani isolasi mandiri (kasus aktif) bertambah 49 orang menjadi 2.333 orang.

f. Potensi Pengembangan Wilayah

Salah satu potensi Kota Tangerang Selatan adalah letak geografisnya yang strategis. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang pada Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu daerah yang berbatasan dengan Ibu Kota DKI Jakarta, selain itu juga sebagai daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta. Kota Tangerang Selatan juga menjadi salah satu daerah yang menghubungkan Provinsi Banten dengan Provinsi Jawa Barat. Dengan posisi sedemikian, Tangerang Selatan memiliki akses yang cukup strategis baik dari udara, karena berbatasan dengan Kabupaten dan Kota Tangerang yang memiliki Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, maupun dari laut, karena berbatasan dengan DKI Jakarta yang memiliki Pelabuhan Tanjung Priok. Demikian juga akses melalui daratan, Kota Tangerang Selatan dilalui oleh Jalan Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road/ JORR) yang sekarang sudah terkoneksi baik dari Tangerang – Merak ataupun Tol JORR 2.

Selain infrastruktur jalan tol yang sudah eksis, juga direncanakan akan dibangun beberapa ruas jalan tol. Salah satunya yang sudah terealisasi adalah ruas jalan tol Kunciran - Serpong. Ruas jalan tol ini akan melintasi wilayah-wilayah yang berada di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan. Prasarana dan sarana penunjang lain yang menjadi potensi investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan.

Sebagaimana terdapat dalam Perda RTRW No.9 tahun 2019, kawasan perdagangan dan jasa terus dikembangkan di sepanjang koridor jalan utama kota, yang direncanakan seluas 3.255,32 ha. Arah pusat pemerintahan, kegiatan pelayanan umum, perdagangan dan jasa skala pelayanan regional dan nasional perumahan diarahkan di Kecamatan Ciputat sebagai Pusat Pelayanan Kota I, Kecamatan Serpong sebagai Pusat Pelayanan Kota II, dan Kecamatan Pondok Aren sebagai Pusat Pelayanan Kota III.

Potensi pengembangan lainnya adalah di sektor pariwisata. Total kawasan yang disediakan dalam Perda RTRW No.9 tahun 2019 adalah sebesar 5,97 ha di Kecamatan Serpong. Kemudian, arahan pengembangan kawasan pariwisata ini adalah sebagai berikut:

- a. Wisata alam: Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, Kecamatan Ciputat, dan Kecamatan Pamulang.
- b. Wisata belanja: Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur
- c. Wisata kuliner: Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara, dan Kecamatan Pondok Aren.

Berikutnya adalah kawasan permukiman yang menempati urutan terluas yang disediakan dalam Perda RTRW No.9 tahun 2019, yaitu 15.279,16 hektar atau 93 persen dari total luas kota dan tersebar di seluruh wilayah kota meliputi:

- Kawasan perumahan seluas 10.281,71 hektar meliputi: Kawasan perumahan untuk perumahan vertikal; dan Kawasan perumahan untuk perumahan horizontal.
- Kawasan perdagangan dan jasa pada pusat-pusat bisnis dan sepanjang koridor jalan seluas 3.255,32 hektar.
- Kawasan perkantoran seluas 293,45 Hektar meliputi: 1. kawasan peruntukan perkantoran pemerintah di Kecamatan Ciputat, Kecamatan Setu, Kecamatan Serpong, kantor Kecamatan tersebar di setiap kecamatan, kantor kelurahan tersebar di setiap kelurahan; dan 2. kawasan Puspipstek di Kecamatan Setu.
- Kawasan pendidikan seluas 306,08 hektar meliputi: 1. kawasan pendidikan yang tersebar di seluruh kecamatan; dan kawasan pendidikan militer di Kecamatan Serpong dan Kecamatan Serpong Utara.
- Kawasan kesehatan seluas 11,98 hektar yang tersebar di kecamatan;
- Kawasan RTNH seluas 880,14 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Tempat evakuasi bencana;
- Kawasan peribadatan seluas 4,75 hektar yang tersebar di seluruh kecamatan;
- Kawasan olahraga seluas 74,31 hektar yang tersebar di kecamatan; dan
- Kawasan transportasi seluas 171,43 hektar meliputi terminal dan Bandar udara.

Pada kawasan peruntukan industri disediakan seluas 1 persen atau 242,45 hektar dari total luas kota, meliputi kawasan industri dan sentra industri kecil dan menengah, meliputi:

- Peruntukan kawasan industri dipusatkan pada kawasan industri Taman Tekno di Kecamatan Setu dan kawasan industri Multiguna Kecamatan Serpong Utara seluas 220,25 hektar, dan.
- Sentra industri kecil dan menengah seluas kurang lebih 22,20 hektar tersebar di seluruh kecamatan.

g. Demografi

Kondisi Demografi Kota Tangerang Selatan secara umum tercermin melalui jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, struktur penduduk, sebaran penduduk serta ketenagakerjaan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang Selatan, Konsep penduduk yang disampaikan adalah mereka yang telah tinggal di Kota Tangerang Selatan 6 bulan atau lebih, atau yang tinggal kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud menetap baik yang memiliki KTP maupun tidak, maka jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan tahun 2020 berjumlah 1.338.387 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk tercatat sebesar 0,47 persen, kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Kecamatan Subdistrict	Penduduk (ribu) Population (thousand)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010–2020 Annual Population Growth Rate (%) 2010–2020
(1)	(2)	(3)
Setu	84,178	2,35
Serpong	154,744	1,17
Pamulang	305,563	0,63
Ciputat	208,722	0,80
Ciputat Timur	172,139	-0,37
Pondok Aren	294,996	-0,26
Serpong Utara	134,008	0,56
Kota Tangerang Selatan	1 354,35	0,47

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Kecamatan Subdistrict	Persentase Penduduk Percentage of Total Population	Kepadatan Penduduk per km ² Population Density per sq.km
(1)	(7)	(8)
Setu	6,22	5 688
Serpong	11,43	6 437
Pamulang	22,56	1 1393
Ciputat	15,41	11 356
Ciputat Timur	12,71	11 156
Pondok Aren	21,78	9 873
Serpong Utara	9,89	7 512
Kota Tangerang Selatan	100	9 201

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Kelompok Umur <i>Age Groups</i>	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	53 087	50 752	103 839
5-9	57 002	54 389	111 391
10-14	57 069	53 238	110 307
15-19	55 041	52 108	107 149
20-24	54 395	53 606	108 001
25-29	54 527	55 080	109 607
30-34	53 674	56 492	110 166
35-39	56 045	57 599	113 644
40-44	53 942	54 787	108 729
45-49	49 400	50 855	100 255
50-54	42 286	42 403	84 689
55-59	34 732	36 279	71 011
60-64	25 188	25 574	50 762
65-69	18 228	17 650	35 878
70-74	7 289	7 481	14 770
75+	6 254	7 898	14 152
Kota Tangerang Selatan	678 159	676 191	1 354 350

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.5. Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Kegiatan Utama <i>Main Activity</i>	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	526 483	305 940	832 423
1. Bekerja/Working	481 401	280 450	761 851
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	45 082	25 490	70 572
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	142 381	357 187	499 568
1. Sekolah/Attending School	55 567	57 876	113 533
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	23 353	263 118	286 471
3. Lainnya/Others	63 371	36 193	99 564
Jumlah/Total	668 864	663 127	1 332 991

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.6. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Angkatan Kerja/ <i>Economically Active</i>			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja <i>Percentage of Working to Economically Active</i>
	Bekerja <i>Working</i>	Pengangguran ² <i>Unemployment²</i>	Jumlah Angkatan Kerja <i>Total of Economically Active</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0	114 462	3 418	117 880	97,10
1	108 308	5 729	114 037	94,98
2	338 615	41 556	380 171	89,07
3	200 466	198 869	220 335	90,98
Jumlah/Total	761 851	70 572	832 423	91,52

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan ¹ <i>Educational Attainment¹</i>	Bukan Angkatan Kerja <i>Not Economically Active</i>	Jumlah Total	Persentase Angkatan Kerja terhadap Penduduk Usia Kerja
			<i>Percentage of Economically Active to Working Age Population</i>
(1)	(6)	(7)	(8)
0	108 015	225 895	52,18
1	117 036	231 073	49,35
2	203 807	583 978	65,10
3	70 710	291 045	75,70
Jumlah/Total	499 568	1 331 991	62,49

atatan/Note: ¹ 0. ≤ Sekolah Dasar (SD)/≤ *Primary School*
1. Sekolah Menengah Pertama/*Junior High School*
2. Sekolah Menengah Atas/*Senior High School*
3. Perguruan Tinggi/*Collage*

² 1. Mencari pekerjaan/*Looking for work*
2. Mempersiapkan usaha/*Establishing a new business/firm*
3. Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/*Hopeless of job*
4. Sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja/*Have a job in future start*

umber/Source: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus/BPS-Statistics Indonesia, August National Labor Force Survey

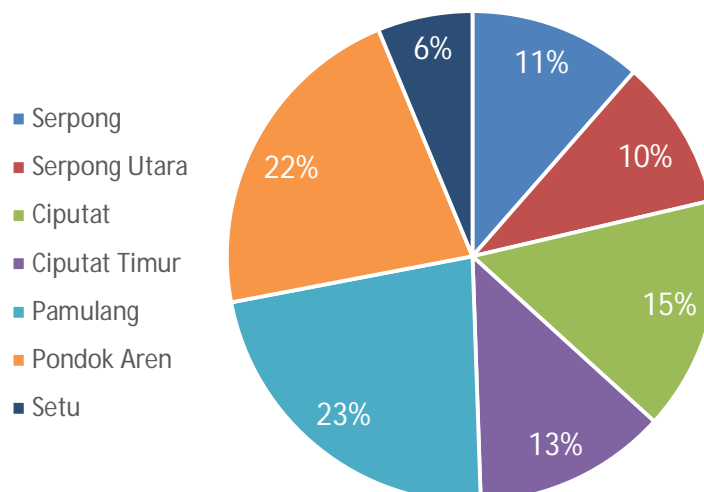
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 2.7. Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Tangerang Selatan

Status Pekerjaan Utama <i>Main Employment Status</i>	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha sendiri <i>Own account worker</i>	117 909	64 669	182 578
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar <i>Employer assisted by temporary worker/unpaid worker</i>	12 851	13 516	26 367
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar <i>Employer assisted by permanent worker/paid worker</i>	20 842	3 560	24 402
Buruh/Karyawan/Pegawai/ <i>Employee</i>	298 613	161 687	460 300
Pekerja bebas <i>Casual worker</i>	22 300	13 486	35 786
Pekerja keluarga/tak dibayar <i>Family worker/unpaid worker</i>	8 886	23 532	324 18
Jumlah/Total	481 401	280 450	761 851

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Kepadatan penduduk di Tangerang Selatan tahun 2020 mencapai 9.201 jiwa/Km² dengan persebaran penduduk yang hampir tidak merata, karena sebagian besar masih terkonsentrasi di wilayah Pamulang dan Pondok Aren. Gambar 2.5 menunjukkan bahwa sekitar 23 persen penduduk Tangerang Selatan tinggal di Kecamatan Pamulang. Sementara itu Kecamatan Setu adalah kecamatan yang jumlah penduduknya paling sedikit yaitu sebanyak sekitar 6 persen. Sebaran penduduk tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 2.4. Distribusi Persentase Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2020

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

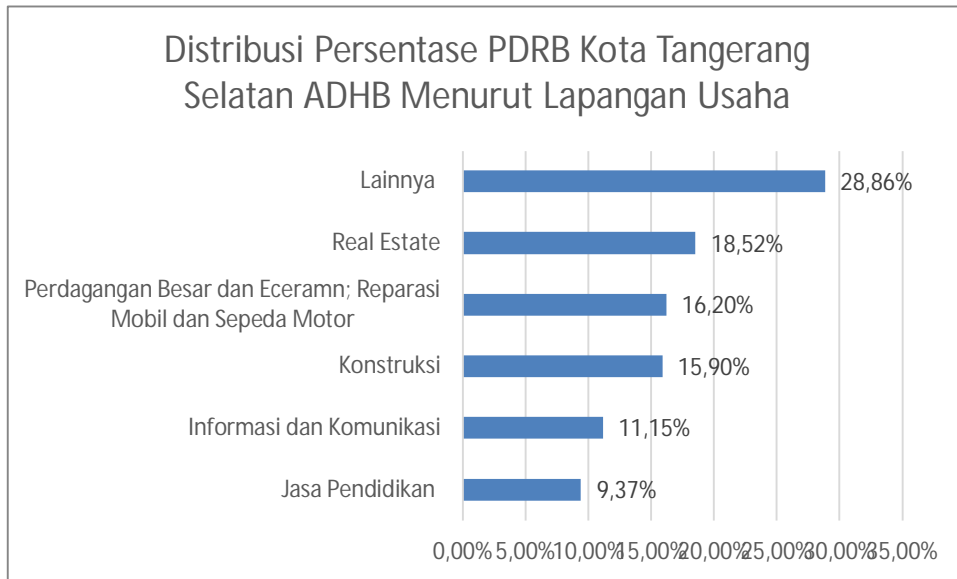
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Struktur Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Selama periode 2016-2020, struktur ekonomi masyarakat Tangerang Selatan telah bergeser dari kelompok lapangan usaha sekunder ke kelompok lapangan usaha tersier yang terlihat dari besarnya kenaikan/penurunan peranan masing-masing kelompok lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2020, kelompok lapangan usaha tersier memberikan sumbangan sebesar 75,82 persen yang mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 73,87 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder tahun 2020 memberikan sumbangan masing-masing sebesar 0,22 persen dan 23,96 persen. Kelompok lapangan usaha primer dan sekunder ini mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2016 yang masing-masing sebesar 0,26 persen dan 25,87 persen.

Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, ada tiga lapangan usaha utama yang menopang perekonomian Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020, yaitu lapangan usaha Real Estate, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda motor, dan Konstruksi. Sebagaimana kita ketahui bahwa pada tahun 2020 terjadi pandemic COVID-19 yang melanda Indonesia, khususnya Kota Tangerang Selatan. Kendati demikian, tiga lapangan usaha tersebut tetap menjadi penopang utama perekonomian Kota Tangerang Selatan, dimana lapangan usaha Real Estate memberikan kontribusi tertinggi yaitu sebesar 18,52 persen, kemudian disusul lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Motor sebesar 16,20 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 15,90 persen. Selanjutnya lapangan usaha Informasi dan Komunikasi menyumbang 11,15 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan memberikan sumbangan sebesar 9,37 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 28,86 persen.

Jika kontribusi lapangan usaha tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019, ternyata lapangan usaha Industri Pengolahan mengalami penurunan kontribusi dari 8,42 persen tahun 2019 menjadi 7,89 persen di tahun 2020. Ini disebabkan akibat terjadinya penurunan jumlah produksi yang dihasilkan oleh beberapa industri yang ada di Kota Tangerang Selatan sebagai dampak dari pandemic COVID-19. Beberapa lapangan usaha yang juga ikut terkena dampak pandemic COVID-19 sehingga menyebabkan penurunan kontribusi terhadap perekonomian Kota Tangerang Selatan diantaranya adalah Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa Perusahaan dan Jasa Lainnya.



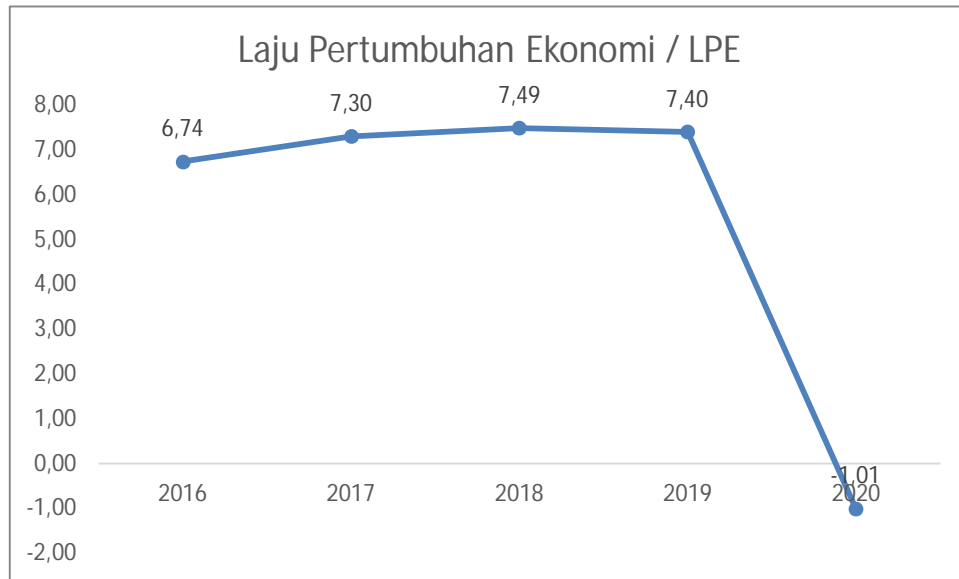
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.5. Distribusi Persentase PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, 2016-2020

b. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan. LPE merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan ekonomi di suatu wilayah.

Apabila dilihat dari laju pertumbuhan Ekonomi, pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan cenderung fluktuatif selama lima tahun terakhir, yakni dari 6,74 persen pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 7,30 persen dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2018 menjadi 7,49 persen. Namun pada tahun 2019 sedikit mengalami perlambatan menjadi 7,40 persen. Kemudian turun menjadi -1,01 persen tahun 2020 dikarenakan adanya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia. Ini merupakan resultan dari sebagian besar sektor yang mengalami pertumbuhan negatif (kontraksi) sebagai akibat pandemic COVID-19. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh empat lapangan usaha pada masa pandemi COVID-19, diantaranya lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 9,21 persen. Disusul oleh lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 8,88 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,90 persen, dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,55 persen. Ini disebabkan adanya peralihan kegiatan tatap muka menjadi online meeting dalam masa pandemic COVID-19 sehingga meningkatkan permintaan kuota akses internet, pengadaan obat dan alat kesehatan meningkat sebagai upaya pengendalian COVID-19, dan meningkatnya kebutuhan air.

Tabel 2.8. Laju Pertumbuhan PDRB Kota Tangerang Selatan Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2016-2020

LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,03	2,03	0,4	0,94	-3,26
B. Pertambangan dan Penggalan	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	-2,02	1,37	0,43	0,5	-8,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	10,71	5,97	9,75	5,39	-7,05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6,54	7,42	4,61	4,78	7,9
F. Konstruksi	8,08	8,82	9,1	9,64	-4,03
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,6	6,11	8,37	6,21	-7,65
H. Transportasi dan Pergudangan	9,37	9,73	9,21	9,71	-8,53
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,59	7,83	7,73	7,36	-5,77
J. Informasi dan Komunikasi	8,23	8,41	8,35	8,45	8,88
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	8,87	8,93	9,3	7,44	7,55
L. Real Estate	9,11	8,47	8,28	8,22	1,91
M,N. Jasa Perusahaan	9,57	9,32	7,24	8,57	-5,52

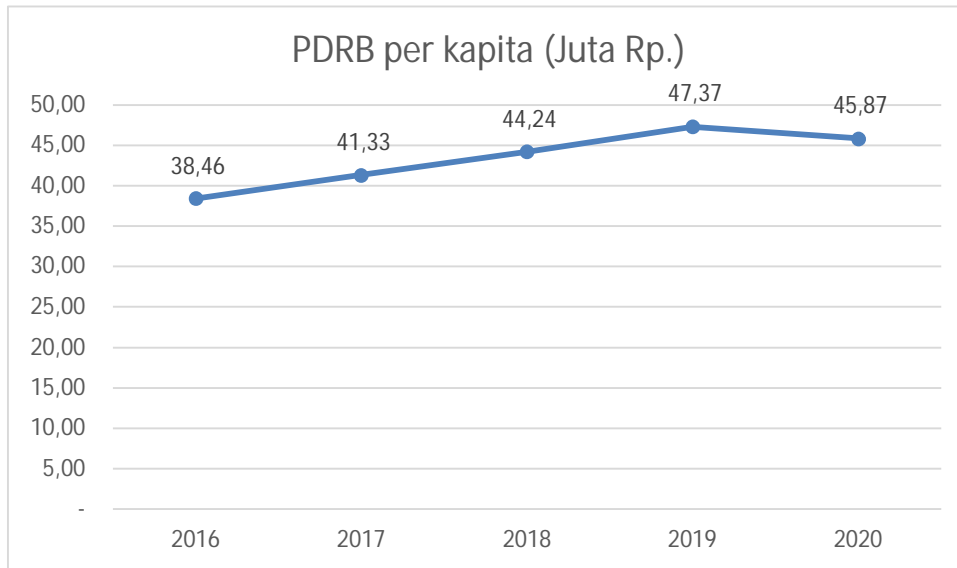
LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018	2019	2020
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,41	7,64	7,44	8,47	-0,71
P. Jasa Pendidikan	7,46	7,84	7,53	7,63	1,07
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,12	7,26	6,47	7,89	9,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	8,63	7,92	7,68	9,49	-6,28
PDRB	6,74	7,3	7,49	7,4	-1,01

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Hampir sebagian besar pertumbuhan lapangan usaha di Kota Tangerang Selatan tahun 2020 mengalami kontraksi. Lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan terkontraksi paling dalam yaitu sebesar 8,53 persen. Kemudian disusul lapangan usaha Industri Pengolahan yang terkontraksi sebesar 8,02 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terkontraksi sebesar 7,65 persen, Pengadaan Listrik dan Gas terkontraksi 7,05 persen, Jasa Lainnya terkontraksi sebesar 6,28 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum terkontraksi sebesar 5,77 persen, Jasa Perusahaan terkontraksi sebesar 5,52 persen, Konstruksi terkontraksi 4,03 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terkontraksi 3,26 persen dan Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib terkontraksi sebesar 0,71 persen.

c. PDRB Per Kapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita Kota Tangerang Selatan berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari Rp38.46 Juta pada tahun 2016 menjadi Rp47,37 juta pada tahun 2019. PDRB per Kapita Kota Tangerang Selatan memiliki tren yang cenderung meningkat sampai pada tahun 2019. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pendapatan per kapita masyarakat Tangerang Selatan turun pada angka 45,87 juta rupiah lebih rendah 1,47 juta rupiah dibandingkan tahun 2019. Penurunan pendapatan per kapita ini karena pertumbuhan ekonomi terkontraksi. Penyebab perekonomian menurun tajam karena sektor penopang seperti konsumsi rumah tangga dan investasi masih tertekan. Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruh sektor menurun. Jika tumbuh positif pun, angkanya melambat. Pandemi juga telah mengakibatkan sejumlah perusahaan tutup atau mengurangi tingkat produksinya. Dampak ikutannya adalah ribuan pekerja di-PHK, dan yang lain dirumahkan, sebagian bahkan tak digaji. Sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

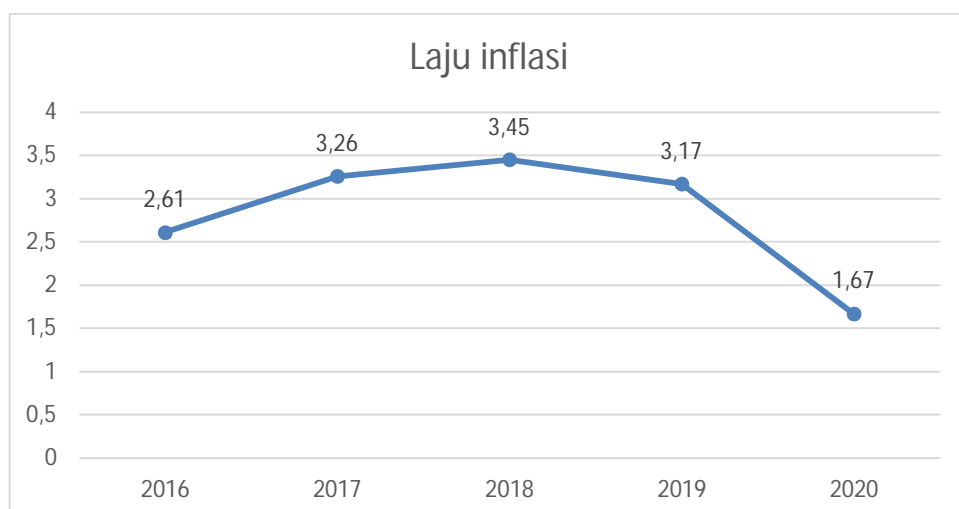


Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.7. PDRB Per Kapita di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020

d. Laju Inflasi

Laju inflasi Kota Tangerang Selatan dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian, baik nasional maupun global. Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Kota Tangerang Selatan memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Kota Tangerang Selatan cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Tahun 2020 menunjukkan bahwa inflasi Kota Tangerang Selatan adalah sebesar 1,67 persen lebih rendah dibanding historis 3 tahun terakhir yaitu sebesar 3,26 persen. Laju inflasi yang sangat rendah ini terjadi lantaran pandemi memukul baik dari sisi penawaran dan permintaan. Terutama banyak komoditas yang mengalami penurunan harga, seperti harga kebutuhan pokok salahsatunya beras. Rincian mengenai nilai inflasi Kota Tangerang Selatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 2.8 berikut:



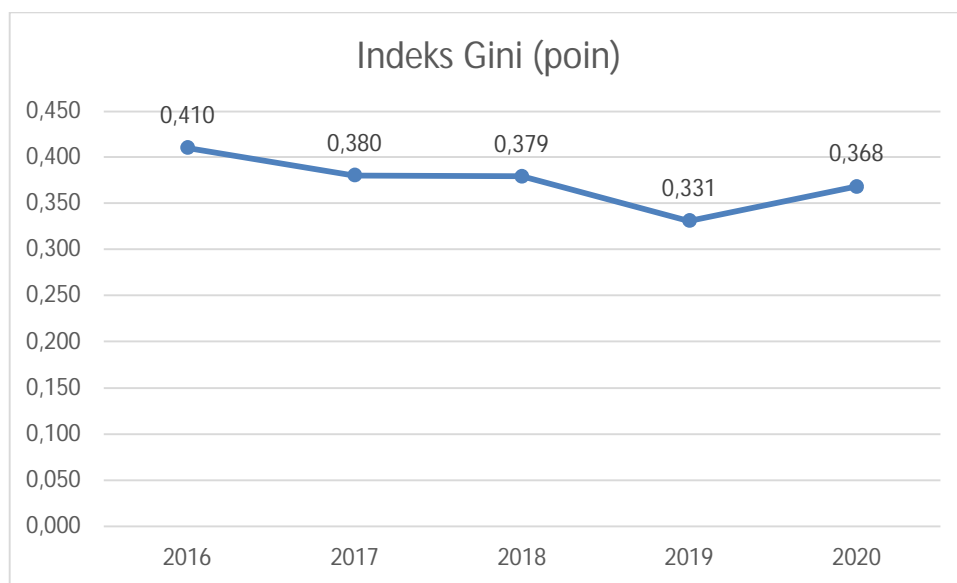
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.8. Angka Inflasi Tahunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

e. Indeks Gini

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terus berupaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif agar tercipta pemerataan distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu wilayah. Indeks gini (gini ratio) merupakan indikator yang umum digunakan sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat. Selama periode Tahun 2016-2020, tingkat ketimpangan pendapatan di Tangerang Selatan yang diukur dengan gini ratio menunjukkan angka yang cenderung turun.

Indeks gini Kota Tangerang Selatan mengalami penurunan dikarenakan adanya upaya dalam mengurangi kemiskinan dengan mengurangi ketimpangan pendapatan. Selain itu, penurunan indeks gini dikarenakan pula adanya kenaikan pengeluaran per kapita kelompok bawah dan kelompok menengah lebih cepat dibandingkan kelompok atas. Akan tetapi pada saat pandemi terjadi kenaikan indeks sebesar 11.18 persen akibat banyak masyarakat yang terdampak dari pandemi COVID-19. Meski ketimpangan pengeluaran yang diukur oleh rasio gini meningkat, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa porsi tersebut masih termasuk rendah bila dibandingkan dengan patokan yang ditetapkan oleh Bank Dunia (*World Bank*).



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.9. Indeks Gini Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2020

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Kemiskinan

Pada tahun 2016 – 2019 tren persentase penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan cenderung menurun. Namun, pada tahun 2020, persentase penduduk miskin Kota Tangerang Selatan melonjak naik dari 1,68 persen pada tahun 2019 menjadi 2,29 persen pada tahun 2020. Artinya, penduduk miskin di Kota Tangerang Selatan naik sebesar 36,31 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan jumlah penduduk miskin ini terjadi karena pandemi menyebabkan banyak kegiatan perekonomian tidak bisa berjalan seperti biasa, sehingga terjadi penurunan pendapatan masyarakat.

Tingkat kemiskinan ini berkorelasi dengan meningkatnya rasio gini/ketimpangan ekonomi pada 2020, angka kemiskinan pada tahun tersebut berada di level 2 persen. Hadirnya pandemi Covid-19 pada tahun lalu membawa pengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi yang berdampak pada kemiskinan.

Beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan di tahun 2020 naik 36 persen salahsatunya terjadi karena penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. Meski demikian, masyarakat yang berada dalam lapisan bawah terdampak lebih dalam dibandingkan dengan lapisan atas.

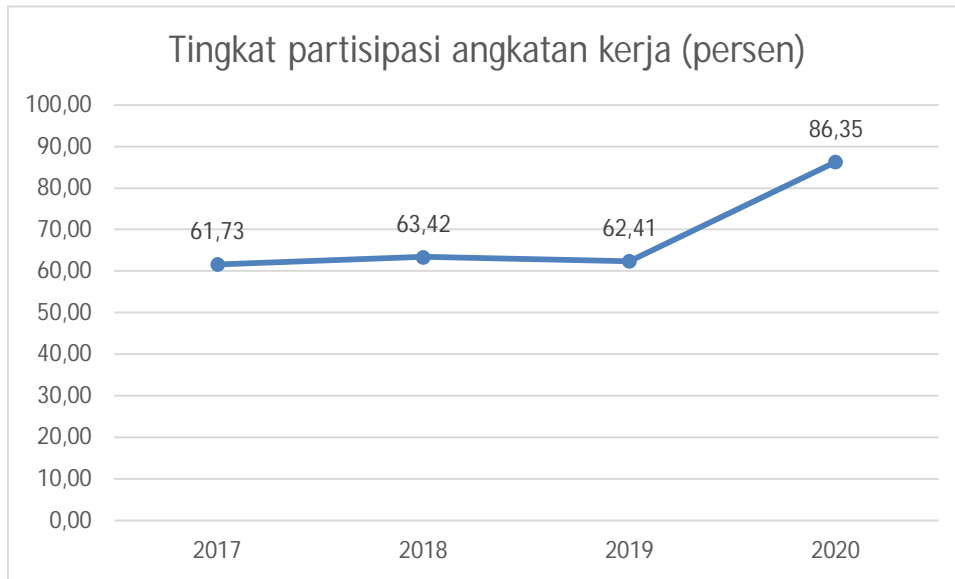


Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.10. Tingkat Kemiskinan di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

b. Tenaga Kerja

TPAK di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya fluktuatif, nilai TPAK tertinggi ada di tahun 2018 dengan nilai 63,42 persen dan terendah di tahun 2017 dengan nilai 61,73 persen dan pada tahun 2020 nilai TPAK di Kota Tangerang Selatan sebesar 86,35 persen. Peningkatan TPAK ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, baik menjadi penduduk bekerja maupun sebagai penganggur. Berikut ini grafik perubahan nilai TPAK di Kota Tangerang Selatan tahun 2017 – 2020.



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.11. Nilai TPAK Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 – 2020

c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT di Kota Tangerang Selatan mengalami trend yang fluktuatif, terjadi penurunan pada tahun 2018 sebesar 31,63 persen sedangkan pada tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan sebesar 2,36 persen. Namun saat pandemi di tahun 2020 meningkatkan secara signifikan TPT di Kota Tangerang Selatan sebesar 8,48 persen dan angka tersebut bahkan lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2017. Pandemi Covid-19 membuat tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami peningkatan 77,41 persen dibandingkan tahun 2019 lalu. Peningkatan TPT terjadi lantaran terjadi peningkatan jumlah angkatan kerja 2020. Meski terjadi kenaikan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) namun sebetulnya terjadi penurunan jumlah penduduk yang bekerja. Berikut ini grafik TPT di Kota Tangerang Selatan tahun 2016 – 2020.

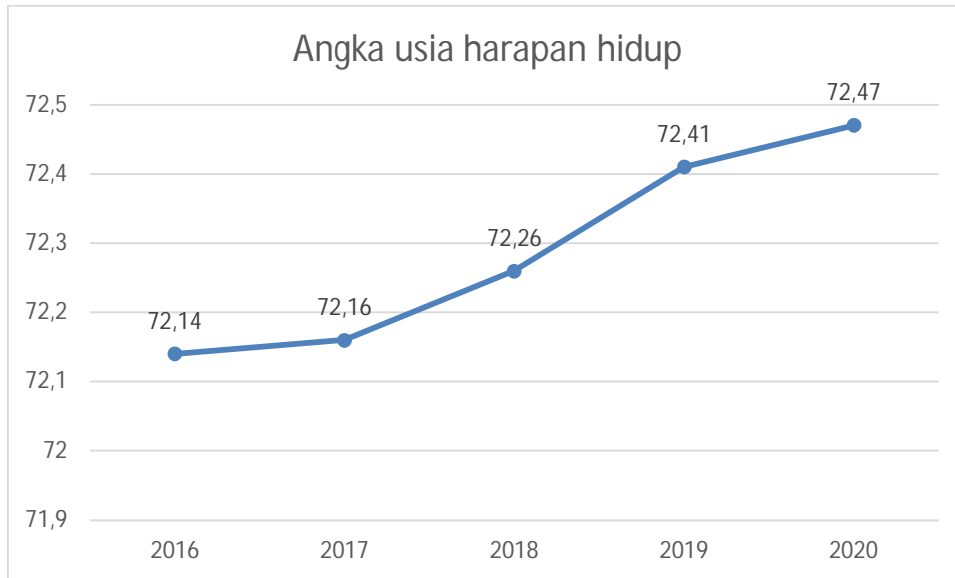


Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.12. TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2017 – 2020

d. Angka Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup penduduk di Kota Tangerang Selatan dalam kurun waktu 2016 hingga 2020 masih dibawah angka usia harapan hidup nasional. Tahun 2020 angka usia harapan hidup di Kota Tangerang Selatan mencapai 72,47 tahun, sedangkan angka usia harapan hidup nasional pada tahun 2020 sebesar 73,4 tahun. Adapun angka harapan hidup standar nasional adalah 71 tahun (WHO, 2014). Hal ini bermakna kesehatan penduduk di Kota Tangerang Selatan masih diatas standar nasional. Lebih lanjut, perkembangan usia harapan hidup di Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020 dapat disimak dalam gambar di bawah ini.



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

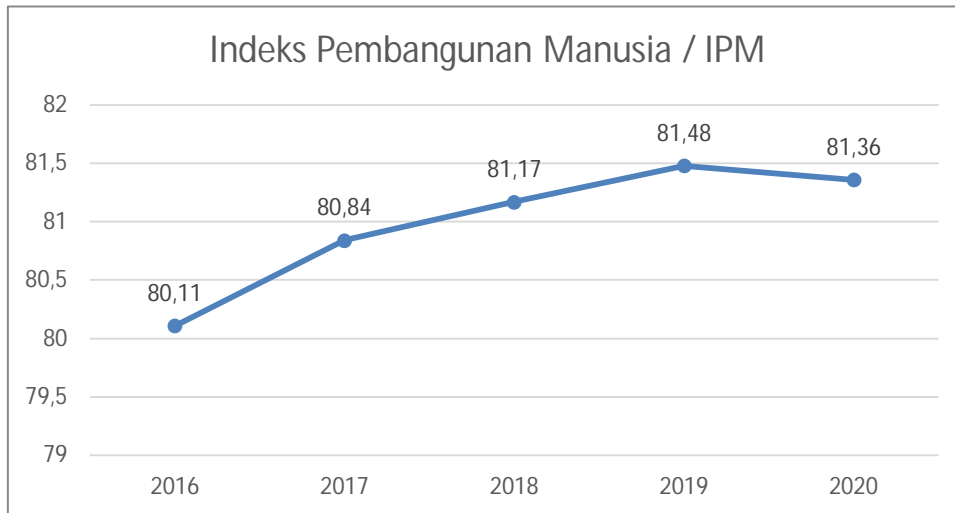
Gambar 2.13. Angka Harapan Hidup di Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 – 2020

AHH di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2016 hingga tahun 2019 berkisar pada angka 72,14 – 72,47 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa bayi yang lahir tahun 2016-2020 di Tangerang Selatan memiliki harapan hidup hingga usia 72 tahun.

e. Indeks Pembangunan Manusia

IPM di Kota Tangerang Selatan selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019 yang mana hal ini berarti bahwa Kota Tangerang Selatan merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang cukup berhasil dalam pembangunan dan meningkatkan mutu kualitas hidup masyarakatnya. Peningkatan IPM juga mengindikasikan bahwasanya pembangunan dan kualitas hidup masyarakat di wilayah Tangerang Selatan semakin meningkat setiap tahunnya.

Namun Indeks Pembangunan Manusia 2020 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen dibandingkan tahun lalu. Pertumbuhan ini dibayangi oleh isu pandemi COVID-19 yang mempengaruhi ekonomi masyarakat. COVID ini menyebabkan banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan sehingga bisa dilihat pengeluaran per kapita turun.



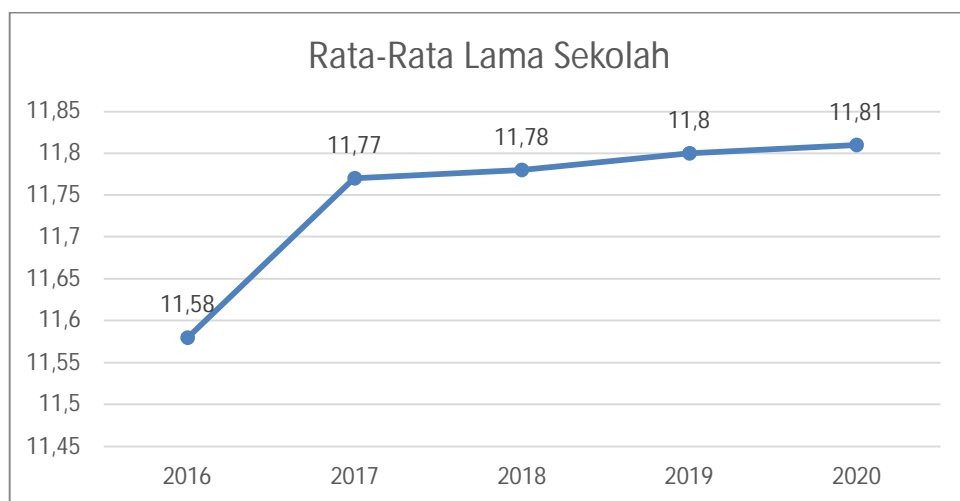
Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.14. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

f. Rata-rata Lama Sekolah

Nilai RLS Kota Tangerang Selatan Dari tahun 2016 hingga 2020 selalu mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 0,41%. Hal ini menunjukkan tingkat pendidikan pendidikan masyarakat di Kota Tangerang Selatan masih hampir lulus SMA. Peningkatan RLS disebabkan karena: 1) Adanya peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, 2) Adanya peningkatan kualitas pendidikan dan tenaga pendidikan, 3) Adanya kebijakan yang mendukung peningkatan seperti pemberian insentif bagi sekolah swasta dan pengelolaan dana BOSNas dan 4) Adanya peningkatan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan di luar jam sekolah.

Nilai RLS yang mencapai 11,81 tersebut belum dapat memenuhi standar upaya wajib belajar 12 tahun yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sehingga RLS Kota Tangerang Selatan masih dapat ditingkatkan. Berikut ini merupakan grafik RLS dari tahun 2016 – 2020:



Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

Gambar 2.15. Rata-Rata Lama Sekolah Kota Tangerang Selatan 2016-2020

2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olah Raga

Pembangunan seni, budaya dan olahraga di Kota Tangerang Selatan merupakan bagian yang tak dapat dipisahkan dari pembangunan karakter bangsa dalam bentuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama peningkatan kesehatan jasmani dan rohani, serta untuk membentuk watak dan kepribadian yang memiliki disiplin dan sportivitas yang tinggi. Kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung/sarana prasarana olahraga yang dimiliki oleh Tangerang Selatan. Tabel dibawah menunjukkan daftar sarana dan prasarana olahraga di Tangerang Selatan.

Tabel 2.9. Daftar Sarana dan Prasarana Olahraga di Tangserang Selatan

No	Sarana	Lokasi
1.	Lap. Tennis Sektor 3 Bintaro	Jl. Bintaro Utama 3A, Kel. Pd. Karya, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
2.	Lap. Softball Alam Sutera	Jl. Griya Hijau Raya Alam Sutera, Kel. Paku Alam, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
3.	Lap. Bola Parigi	Jl. Raya Perigi Lama No.13B, Kel. Parigi, Kec. Pd. Aren, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
4.	Stadion Mini Ciputat	J. Pendidikan, Kel. Ciputat, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
5.	Lap. Tennis Setu	Jl. Raya Serpong - Puspitek No. 1, Kel. Pagedangan, Kec. Setu, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
6.	GOR Ciputat	Jl. Ki Hajar Dewantoro No. 2 Kel. Ciputat Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
7.	GOR Badminton Ciputat/GSG Vila Mutiara	J. Mirah III No. 27 Rt/Rw 02/02, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
8.	Lap. Bola Rempoa	Jl. Pahlawan, Jl. Anggur 1, Kel. Rempoa, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
9.	Lap. Bola Villa Pamulang	Villa Pamulang, Jl. Sinta Raya, Kel. Pd. Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
10.	Kolam Renang Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok A, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
11.	Sportcenter Panorama Serpong	Jl. Komplek Panorama Blok D, Kel. Bakti Jaya, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
12.	Lap. Tennis Villa Pamulang Mas	Jl. Lele Villa Pamulang Mas, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan - Provinsi Banten
13.	Community Center	Jl Kenari II No 8 Rt 03 Rw 17 Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Tangerang Selatan, 2020

Di samping itu di bidang seni dan budaya, pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan pengembangan kesenian tradisional melalui pembinaan terhadap lembaga kesenian tradisional. Selain itu fokus budaya akan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasana serta akses informasi sejarah lokal, serta revitalisasi museum sejarah dan cagar budaya.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

a. Pendidikan

Prioritas pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan pada RPJMD periode Tahun 2016-2021 adalah bidang Pendidikan. Ukuran keberhasilan program-program pembangunan di bidang pendidikan dapat dilihat dari ketercapaian indikator Harapan Lama Sekolah, APM PAUD, APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI dan APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS.

Indikator kinerja urusan pendidikan cenderung mengalami peningkatan selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10. Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,08	14,18	14,39	14,36	14,62
APM PAUD	Persen	23,00	30,20	29,54	38,51	32,30
APM (Angka Partisipasi Murni) SD	Persen	72,06	72,44	72,76	72,76	97,98
APM (Angka Partisipasi Murni) SMP	Persen	83,69	83,43	86,04	87,88	87,89
Uji Kompetensi Guru		70	65,12	90	80	85
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	Persen	107,72	109,19	104,72	104,14	105,08
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	Persen	101,78	88,87	92,13	95,44	93,68
Angka kelulusan SD	Persen	100	100	100	100	100
Angka kelulusan SMP	Persen	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021

Berdasarkan Tabel di atas, dapat diketahui bahwa Pada jenjang pendidikan SD, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan pada rentang waktu tahun 2016 ke tahun 2018 dan menurun pada tahun 2020 dengan angka 97,98% yang mana berada di atas APM SD/MI Nasional (97,46%). Persentase tersebut menunjukkan banyaknya peserta didik pada jenjang SD yang bersekolah di Kota Tangerang Selatan berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD menunjukkan angka yang fluktuatif dengan persentase sebesar 105,08% pada tahun 2020. Angka tersebut menunjukkan dua penyebab yaitu terdapat anak yang tinggal kelas atau terdapat anak yang seharusnya belum masuk usia SD tetapi sudah bersekolah pada jenjang SD.

Pada jenjang pendidikan SMP, Angka Partisipasi Murni (APM) mengalami peningkatan pada tiap tahunnya. Persentase APM pada tahun 2020 mencapai 87,89% yang juga berada di atas APM SMP Nasional (79,40%). Angka ini menunjukkan banyaknya peserta didik yang sekolah di Kota Tangerang Selatan berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta. Sedangkan, Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP cukup fluktuatif dengan persentase 93,68% pada tahun 2020. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya terdapat siswa yang tinggal kelas, terdapat siswa yang seharusnya belum masuk usia SMP tetapi sudah bersekolah pada jenjang SMP.

Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut mayoritas mengalami peningkatan sejak tahun 2016 hingga tahun 2019. Peningkatan ini, khususnya pada jenjang SD dan SMP, dipengaruhi oleh banyaknya peserta didik yang bersekolah di Kota Tangerang Selatan berasal dari wilayah perbatasan, seperti Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan DKI Jakarta.

Berbeda dengan APM, Angka Partisipasi Kasar (APK) pada jenjang pendidikan SD, SMP cenderung menunjukkan angka yang fluktuatif dan terjadi penurunan pada tahun-tahun tertentu. Penurunan yang terjadi pada APK dapat disebabkan oleh berkurangnya peserta didik yang mengulang kelas dan berkurangnya Angka Putus Sekolah.

b. Kesehatan

Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terus berupaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas layanan dan cakupan akses pelayanan kesehatan. Keberhasilan program-program pembangunan di bidang kesehatan dapat diukur dari indikator Rasio Kematian Bayi, dan Jumlah Kasus Kematian Ibu dan lainnya.

Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan, dalam konteks tersebut, Pemerintah kota Tangerang Selatan telah berkomitmen untuk memenuhi alokasi anggaran kesehatan dari belanja daerah. Ini sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sejak awal tahun 2020 yang lalu telah terjadi pandemi COVID-19, yang mengakibatkan adanya perubahan sistem tatanan kehidupan, baik ditingkat global, nasional maupun ditingkat daerah. Dalam upaya menangani penyebaran pandemi COVID-19 yang lebih luas kepada masyarakat Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan melakukan berbagai upaya pencegahan. Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 dilakukan secara komprehensif, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Adapun capaian Kinerja Kesehatan Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.11. Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	Puskesmas	7	11	10	8	0*
Persentase akreditasi unit Labkesda	Persen	0%	30%	50%	50%	50%
Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	Jenis pelayanan	13	15	15	20	20
Persentase alat kesehatan sesuai standar	Persen	65%	70%	75%	80%	85%
Jumlah puskesmas yang terbangun	Puskesmas	29	29	29	32	33
Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	Posyandu	76	78	109	126	139
Jumlah bangunan puskesmas yang dikembangkan	Puskesmas	0	0	0	4	0
Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	Puskesmas	4	0	4	0	0
Persentase Gudang terbangun	Persen	0	0	1	1	1
Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan dibangun	Unit	0	0	0	0	2
Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Puskesmas	3	3	5	1	0
Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	Bab (Level)	4	12	15	15	15
Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	Persen	95%	95%	95%	95%	99%
Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	Persen	90%	100%	97%	97%	100%
Persentase resep sesuai dengan formularium	Persen	60%	96%	98%	98%	99%
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	1/Per 100.000 kelahiran hidup	1,4	1,5	1,9	1,1	0,8

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	32/Per 100.000 kelahiran hidup	16	48	42	35	32
Cakupan pelayanan kesehatan balita	Persen	97%	97%	98%	100%	100%
Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	Persen	96%	100%	100%	100%	100%
Cakupan pelayanan lansia	Puskesmas Santun Lansia	1	9	9	29	29
Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	88%	88%	84%	84%	84%
Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Persen	50%	88%	95%	96%	100%
Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	Persen	15%	21%	31%	33%	30%
Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	Kelurahan	51	54	54	54	54
Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Persen	7%	53%	69%	80%	100%
Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	Persen	50%	55%	100%	90%	100%
Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih	Persen	50%	60%	70%	80%	90%
Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	Persen	20%	20%	15%	80%	83%
Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	Persen	70%	69%	82%	100%	100%
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen	98%	92%	97%	98%	90%
Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspn	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	Persen	75%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	Persen	55%	80%	100%	100%	80%
Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	Persen	0%	56%	59%	83%	78%
Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	Persen	0%	0%	12%	100%	100%
Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial , yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	Persen	0%	98%	118%	94%	78%
Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Persen	100%	47%	57%	65%	72%
Jumlah puskesmas BLUD	Puskesmas	0	0	0	10	29
Persentase kepuasan pasien yang disurvei	Persen	71%	78%	79%	80%	82%
Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	Persen	96%	40%	84%	94%	81%
Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	97%	54%	79%	84%	45%
Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	95%	65%	90%	95%	81%
Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	Persen	80%	85%	100%	100%	100%
Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Kelurahan	10	16	54	54	54
Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Bangunan RSUD (Gedung 3)	Paket			1	1	1
Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	Persen	70%	60%	66%	63%	81%

* Tidak dilakukan karena terkendala Pandemi Covid-19
Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan bidang urusan pekerjaan umum menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Hal ini tercermin dari capaian beberapa indikator, antara lain Jalan dan jembatan dalam kondisi baik, cakupan pelayanan air minum dan lain-lain. Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan terus berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur terutama yang terkait dengan infrastruktur pelayanan dasar. Adapun capaian kinerja pekerjaan umum dan penataan ruang Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020, sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.12. Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	82%	96%	97%	98%	97%
Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	45%	50%	55%	60%	67%
Pedestrian jalan yang dibangun	Persen	1%	2%	4%	10%	19%
luas genangan yang tereduksi	Persen	32%	34%	36%	38%	67%
Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	Persen	0%	14%	15%	17%	18%
Kapasitas debit sungai /tandon	Persen	32%	34%	36%	43%	43%
Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Persen	100%	100%	100%	0%	
persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	86%	86%	92%	88%	89%
Persentase pelayanan air minum	Persen	83%	84%	84%	85%	85%
Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	Gedung	10	26	7	13	22
Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	Paket	0	8	15	3	3
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah Pembangunan Comunity Center/komunitas kreatif skala kecamatan	Paket	0	1	1	4	1
Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan	Paket	0	0	1	1	6
Bangunan Depo Arsip	Paket	0	0	0	1	1
Kapasitas Debit Saluran	Persen	35%	40%	45%	50%	55%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan bidang urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kota Tangerang Selatan menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Hal ini ditunjukkan dari capaian indikator Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha), Terbangunnya sarana penunjang permukiman dan lainnya. Adapun capaian kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kota Tangerang Selatan tahun 2016-2020 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 2.13. Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	Ha	846	327,15	388,75	336,44	36,58
Terbangunnya sarana penunjang permukiman	Unit	81	39	0	41	33
Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	twin blok	0	1	1	1	1
Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Unit	0	206	151	206	205
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	Persen	0%	100%	0%	0%	93%
Tersedianya data rumah dan perumahan	Dokumen	3	3	3	2	n/a
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perda	0	0	0	0	0
Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perwal	4	1	1	5	11
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelea rumah susun	Persen	0%	100%	100%	100%	100%
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	Persen	0%	100%	100%	100%	0%
Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	Persen	20%	100%	100%	100%	100%
tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	Perum	0	10	3	2	18
Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPU	7	7	8	10	8
Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPK	1	1	1	1	1
Terpeliharanya sarana TPU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Penambahan jumlah PJU terbangun	Titik	2000	3509	3153	4990	3700
Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan pokok hidup bagi setiap manusia namun untuk mendapatkan sebuah rumah sangatlah tidak mudah pada saat ini. Mengingat harganya yang semakin tinggi hingga semakin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh rumah terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Permasalahan perumahan ini merupakan permasalahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah di setiap daerah, seperti kondisi yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14. Rekapitulasi Cakupan Rumah Layak Huni Per-Kecamatan di Kota Tangerang Selatan, Tahun 2021

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga	Rumah (unit)			Backlog
		Layak Huni	Tidak Layak	Total	
Ciputat	65.015	47.542	407	47.949	17.066
Ciputat Timur	57.795	41.587	255	41.842	15.953
Pamulang	95.603	78.256	546	78.802	16.801
Pondok Aren	106.054	70.463	539	71.002	35.052
Serpong	49.670	35.595	266	35.861	13.809
Serpong Utara	48.014	35.052	641	35.693	12.321
Setu	23.419	19.619	215	19.834	3.585
Total	445.570	328.114	2.869	330.983	114.587

Sumber : Dinas Perumahan, Perumukiman dan Pertanahan, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat masih banyaknya penduduk Kota Tangerang Selatan yang belum memiliki rumah maupun penduduk yang memiliki rumah yang tidak layak huni, terlihat bahwa dari 330.983 unit rumah yang disebar di tujuh kecamatan dapat diketahui jumlah rumah yang layak huni berjumlah 328.114 atau 99 persen dari total unit rumah dan jumlah rumah yang tidak layak huni sejumlah 2.869 unit rumah atau 1 persennya dari total unit rumah yang ada.

Dalam tabel diatas juga terlihat bahwa jumlah *backlog* perumahan di Kota Tangerang Selatan mencapai 114.587 unit rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan rumah (pertumbuhan rumah tangga) tidak diimbangi dengan kemampuan penyediaan rumah layak huni dan terjangkau khususnya bagi MBR sesuai dengan angka tambahan kebutuhan rumah.

e. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang terkait dengan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat bertujuan untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenteram, terbit dan aman. Capaian di bidang urusan ini dapat diketahui dari berbagai indikator, diantaranya adalah pada tahun 2020 Respon time kebakaran telah mencapai 10,96 menit karena telah tersedia posko di 7 Kecamatan termasuk Kerjasama yang baik dengan wilayah perbatasan sekitar seperti DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang sehingga mempercepat atas tanggap darurat ketika terjadi bencana, Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana mencapai 100 persen. Indikator lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.15. Capaian Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Respon time kebakaran	Menit	23	20	13	11	10,96
Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	Persen	95%	98%	100%	100%	100%
Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	Kali	25	30	43	13	18
Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	Persen	100%	100%	100%	100%	100%
Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	Persen	85%	84%	84%	84%	80%
Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	Persen	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

f. Sosial

Sasaran pelayanan urusan sosial adalah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Permasalahan PPKS terbanyak diantaranya yaitu miskin, penyandang cacat, dan lanjut usia terlantar. Sedangkan penyelenggara urusan sosial di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Adapun capaian kinerja urusan sosial dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.16. Capaian Kinerja Urusan Sosial Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	Persen	20%	50%	52%	54%	37%
Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	Persen	0%	25%	30%	35%	23%
Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	Dokumen	1	2	5	7	4
Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dokumen	0	7	7	13	7
Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Dokumen	0	2	2	2	2
Persentase Rumah Tangga/ Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	Persen	75%	80%	80%	85%	87%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan

a. Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Tangerang Selatan memiliki peranan yang sangat penting sejalan dengan perkembangan dan kontribusi yang diberikan sektor pariwisata melalui penerimaan pendapatan daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja serta pengembangan usaha wisata yang tersebar di 7 kecamatan.

Kunjungan wisata di Kota Tangerang Selatan tiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2016 sebanyak 320 ribu jiwa meningkat menjadi 1,9 juta jiwa pada tahun 2019. Pada tahun 2020 terjadi penurunan kunjungan wisatawan di Kota Tangerang Selatan menjadi 704 ribu jiwa. Hal ini dikarenakan pada tahun 2020 terjadi pandemi COVID-19 yang menyebabkan pembatasan sosial berskala besar, sehingga terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan domestic.

Dengan menurunnya jumlah kunjungan wisata di tahun 2020, maka PAD sektor pariwisata mengalami penurunan juga. PAD sektor pariwisata Kota Tangerang Selatan menurun menjadi Rp249 miliar rupiah dari Rp380 miliar rupiah.

Tabel 2.17. Capaian Kinerja Pariwisata Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Rupiah	243.038.015.992	283.122.146.291	332.594.762.950	379.727.318.216	248.556.780.636
Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	320.229	544.206	1.388.543	1.951.999	704.857
Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	Pelaku ekonomi kreatif	n/a	143	300	50	50

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

b. Pertanian

Kinerja capaian yang dihasilkan dari Program Pengembangan pertanian sudah sesuai target, yaitu sebesar 100%, meliputi nilai tukar petani/pelaku usaha pertanian, presentase kesehatan hewan dan presentase bahan asal hewan yang memenuhi kriteria ASUH.

Tabel 2.18. Capaian Kinerja Pertanian Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

INDIKATOR PROGRAM	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	Persen	101%	102%	114%	115%	100%
Presentase Kesehatan Hewan	Persen	79%	80%	99%	98%	97%
Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	Persen	77%	78%	100%	86%	88%
Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	Persen	0%	0%	100%	20%	100%

Sumber : Capaian Target Program RPJMD, Tahun 2020

2.1.3.3. Fokus Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan Pembangunan

Urusan perencanaan pembangunan adalah untuk memberikan dukungan pelayanan yang menunjang pelaksanaan kepada daerah, baik urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan pilihan. Urusan perencanaan pembangunan di Kota Tangerang Selatan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.19. Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya Dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	99,65	99,65	99,65	99,65	n/a
Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	99,65	99,65	99,65	99,65	n/a

Tabel diatas memperlihatkan bahwa perencanaan pembangunan di Kota Tangerang Selatan telah memiliki dokumen perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD, RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA. Selanjutnya untuk penjabaran program RPJMD kedalam RKPD dan APBD selalu memiliki persentase yang sama tiap tahunnya yaitu 99,65%.

b. Keuangan

Urusan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Urusan keuangan di Kota Tangerang Selatan ditinjau melalui indikator berikut ini.

Tabel 2.20. Kinerja Urusan Keuangan Tangerang Selatan Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase SILPA terhadap APBD	21,92	14,92	14,95	13,26	6,86
Persentase belanja pendidikan (20%) (Miliar Rp)	734	679	671	670	n/a
Persentase belanja kesehatan (10%) (Miliar Rp)	361	490	520	737	n/a
belanja langsung	75,45	79,94	73,92	74,30	74,30
belanja tidak langsung	24,55	24,55	26,08	26,08	26,08
Bagi hasil kabupaten/kota (Miliar Rp)	434	523	525	550	284
Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Tabel diatas dapat memberikan gambaran bahwa, indikator opini BPK terhadap laporan keuangan di Kota Tangerang Selatan dalam beberapa tahun adalah WTP (wajar tanpa pengecualian) sampai tahun 2020. Untuk persentase SIPLA dari tahun 2016 menuju tahun 2020 mengalami penurunan dengan angka terakhir berada pada 6,86 persen.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

a. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Rasio ekspor dan impor terhadap PDRB (derajat keterbukaan) merupakan proporsi volume perdagangan terhadap PDRB. Semakin besar derajat keterbukaan menunjukkan semakin terbukanya perekonomian suatu wilayah. Keterbukaan ekonomi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Berdasarkan grafik di bawah ini, dari tahun 2016 hingga 2020 nilai ekspor Kota Tangerang Selatan selalu lebih rendah dibandingkan dengan nilai impor. Apabila dibandingkan nilai volume perdagangan total dengan nilai PDRB, nilai volume perdagangan selalu lebih tinggi dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Nilai volume dari perdagangan Kota Tangerang Selatan didominasi oleh impor.

Derajat keterbukaan perekonomian Kota Tangerang Selatan dari tahun 2016 hingga tahun 2020 secara tren mengalami penurunan. Tabel di bawah ini memberikan gambaran mengenai kondisi derajat keterbukaan ekonomi di Kota Tangerang Selatan. Pada tahun 2016 derajat keterbukaan ekonomi Kota Tangerang Selatan adalah 124,26%, derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2017 adalah 114,53%, derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2018 adalah 112,54, derajat keterbukaan ekonomi tahun 2019 adalah 105,26, dan derajat keterbukaan ekonomi pada tahun 2020 adalah 104,47.

Tabel 2.21. Derajat Keterbukaan Ekonomi Kota Tangerang Selatan 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Ekpor + Impor (Juta Rupiah)	76.171.206	77.856.664	84.452.610	87.143.278	86.242.212
PDRB (Juta Rupiah)	61.300.797	67.980.904	75.043.782	82.790.484	82.551.233
Rasio (%)	124,26%	114,53%	112,54%	105,26%	104,47%

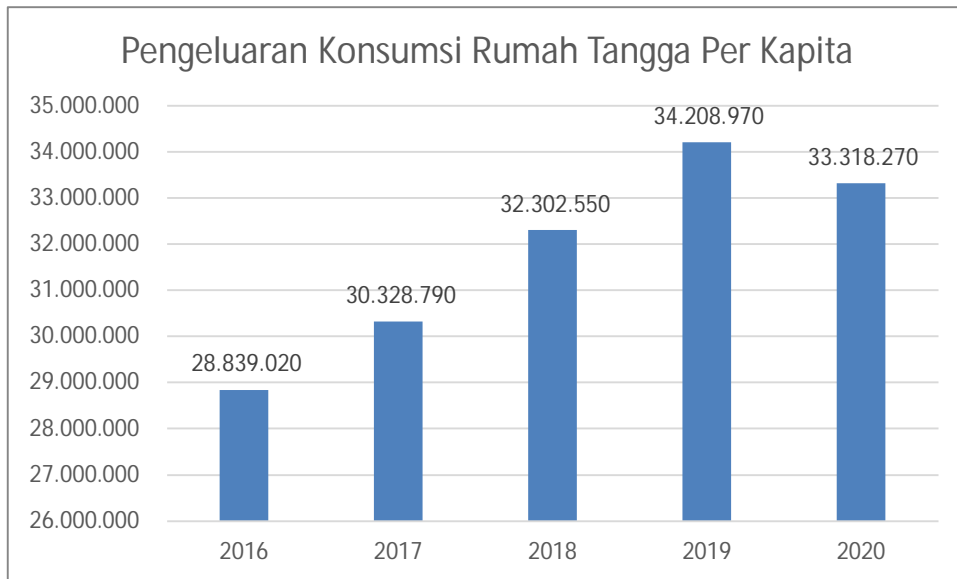
Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2020

b. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Konsumsi makanan merupakan faktor yang sangat penting karena makanan merupakan jenis barang utama untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Akan tetapi terdapat berbagai macam barang konsumsi (termasuk sandang, perumahan, bahan bakar, dan konsumsi lainnya) yang dapat dianggap sebagai kebutuhan untuk menyelenggarakan rumah tangga. Banyaknya variasi dari konsumsi tergantung pada tingkat pendapatan rumah tangga. Tingkat pendapatan yang berbeda-beda mengakibatkan perbedaan taraf konsumsi.

Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, makin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan. Grafik di bawah ini menunjukkan pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kota Tangerang Selatan tahun 2016 hingga tahun 2020. Berdasarkan grafik konsumsi rumah tangga di atas, dapat diketahui bahwa jumlah pengeluaran konsumsi dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Jumlah pengeluaran konsumsi pada tahun 2016 adalah 28,83 juta, pada tahun 2017 adalah 30,32 juta, pada tahun 2018 adalah 32,30

juta, pada tahun 2019 adalah 34,20 juta, dan pada tahun 2020 (perhitungan sementara) adalah 33,31 juta.



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2021

Gambar 2.16. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Kota Tangerang Selatan 2016-2020

c. Konsumsi Akhir Rumahtangga

Konsumsi akhir rumah tangga memiliki peranan terbesar penggunaan produksi barang dan jasa di Kota Tangerang Selatan. Dalam periode tahun 2016 – 2019 pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga mengalami (peningkatan/penurunan) signifikan, baik dari sisi nominal (atas dasar harga berlaku) maupun secara riil (atas dasar harga konstan). Kenaikan jumlah penduduk menjadi salah satu pendorong terjadinya kenaikan nilai pengeluaran konsumsi rumahtangga. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan akibat terjadinya pandemi Covid-19 di sepanjang tahun tersebut.

Tabel 2.22. Perkembangan Komponen Konsumsi Rumahtangga Kota Tangerang Selatan, 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Total Konsumsi Rumah Tangga/Total of Household Consumption					
a. ADHB / Current Prices (Miliar Rp)	45.963,98	49.887,80	54.795,08	59.794,07	59.959,72
b. ADHK 2010/ 2010 Constant Prices (Miliar Rp)	37.945,26	40.026,10	42.268,28	44.468,99	43.694,29
Proporsi terhadap PDRB/ Proportion to GRDP (% ADHB / Current Prices)	74,98	73,39	73,02	72,22	72,63
Rata-rata konsumsi per-Kapita/ Average of per-capita consumption (Ribu Rp/Thousand Rp)					
a. ADHB / Current Prices (Thousand Rp)	28.839,02	30.328,79	32.302,55	34.208,97	33.318,27
b. ADHK 2013/2013 Constant Prices (Thousand Rp/Trillion Rp)	23.807,87	24.333,47	24.917,81	25.441,29	24.279,93
Jumlah penduduk/Number of population (000 orang/person)	1.593.812	1.644.899	1.696.308	1.747.906	1.799.605

Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan 2021

Selama periode 2016 – 2019 proporsi pengeluaran konsumsi rumahtangga terhadap total PDRB menurun, yaitu 74,98 persen (2016); 73,39 persen (2017); 73,02 persen (2018); 72,02 persen (2019) dan 72,63 persen (2020). Posisi tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 74,98 persen dan terendah pada tahun 2019 sebesar 72,02 persen. Peningkatan di tahun 2020 disebabkan oleh turunnya peranan ekspor antar daerah

Masa pemulihan ekonomi telah mendorong masyarakat untuk memperbaiki serta mengembalikan perilaku dan kebiasaan konsumsinya setelah sekian lama mengalami masa-masa krisis. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) turut menjadi pemicu meningkatnya belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi perkapita. Secara umum, rata-rata konsumsi perkapita terus meningkat dari tahun ke tahun, baik menurut atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010. Pada tahun 2016, secara umum setiap individu di Kota Tangerang Selatan menghabiskan dana sekitar 28,84 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi baik dalam bentuk makanan maupun bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran ini terus meningkat menjadi 30,33 juta rupiah (2017), 32,30 juta rupiah (2018), 34,21 juta rupiah (2019) dan menurun menjadi 33,32 juta rupiah di tahun 2020.

d. Fokus Wilayah/Infrastruktur

Dalam melihat ketaatan pembangunan Kota Tangerang Selatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 - 2031 maka kita dapat menguraikan apa yang sudah dilakukan dan proyeksi pembangunan Kota Tangerang Selatan terhadap tata ruang wilayahnya berdasarkan RTRW 2011-2031, antara lain prasarana dan sarana penunjang lain yang menjadi potensi investasi yang dikembangkan di Kota Tangerang Selatan, antara lain:

- 1) Kereta Api. Sebagai sarana transportasi massal, kereta api merupakan andalan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang menghubungkan Kota Rangkasbitung - Kota Tangerang Selatan - Kota Jakarta dan sudah dengan jalur rel ganda (double track). Stasiun kereta rel listrik (KRL) berjumlah 5 buah dan tersebar di tiga kecamatan yaitu Serpong, Ciputat dan Ciputat Timur. Wilayah Kota Tangerang Selatan yang dilalui oleh lintasan rel KRL antara lain wilayah Serpong (Stasiun Pasar Serpong), Stasiun Rawa Buntu (BSD), Stasiun Jurang Mangu (Pondok Aren), Ciputat (Stasiun Jombang) dan Ciputat Timur (Stasiun Pondok Ranji). Kereta rel listrik yang melintas adalah KRL penumpang dan kereta api barang. Dalam RTRW, direncanakan pengembangan fasilitas "park and ride" yaitu lahan parkir kendaraan yang terletak pada fasilitas transportasi publik seperti stasiun kereta dan terminal. Fasilitas tersebut memudahkan para penglaju (*commuter*) yang memiliki kendaraan pribadi untuk berpindah ke transportasi publik.
- 2) Bis Antar Kota – Antar Propinsi. Sarana Transportasi ini juga merupakan penggerak mobilitas masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai sarana utama dalam kegiatan yang menghubungkan Kota Tangerang Selatan dengan Kota Jakarta dan kota-kota lainnya. Saat ini juga sudah beroperasi feeder Bus Transjakarta dengan trayek BSD – Jakarta, Pondok Aren (Bintaro Jaya) – Jakarta dan BSD – Balaraja.
- 3) Angkutan Dalam Kota. Sarana Transportasi Dalam Kota merupakan salah satu transportasi yang dijadikan andalan untuk aktivitas sehari-hari masyarakat Kota Tangerang Selatan.
- 4) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih/Air Minum. Masyarakat Kota Tangerang Selatan memakai air bersih untuk kebutuhan rumah tangga, industri dan kegiatan lainnya. Di Kota Tangerang Selatan, cukup banyak sumber air baku yang bisa diolah menjadi sumber air bersih bagi berbagai kebutuhan. Wilayah Kota Tangerang Selatan setidaknya dialiri oleh tiga sungai yang airnya cukup melimpah yaitu Sungai Cisadane, Sungai

Pesanggrahan, dan Sungai Kali Angke. Selain itu, masih terdapat sembilan situ dan danau yang memiliki kadar dan kapasitas air yang layak diolah. Untuk itu, Pemerintah Kota Tangerang Selatan diharapkan memiliki instalasi pengolahan air minum yang langsung dikelola atau di bawah pengawasan pemerintah daerah.

- 5) Pembangunan Permukiman Vertikal. Dengan kepadatan penduduk Kota Tangerang Selatan yang mencapai 10.484 jiwa/km², maka akan semakin sulit untuk membangun permukiman yang memakai lahan luas. Sehingga dimungkinkan kawasan permukiman super blok seperti apartemen, kondominium, rusunawa, flat dan sejenisnya untuk dikembangkan karena letak Kota Tangerang Selatan yang berdekatan dengan DKI Jakarta dan dengan akses mudah dari berbagai arah. Pengembangan permukiman vertikal menjadi salah satu alternatif yang dapat membangun kawasan permukiman modern dengan infrastruktur yang memadai dan fasilitas pendukung masyarakat perkotaan modern.
- 6) Kawasan Jasa dan Perdagangan Terpadu. Di sepanjang koridor Jl Pahlawan Seribu, BSD City Serpong mulai banyak bermunculan gedung-gedung baru yang megah. Pusat perbelanjaan, apartemen, hotel, pusat hiburan dan kuliner, pusat perkantoran, rumah sakit, pusat pendidikan telah dibangun. Lahan untuk pembangunan office tower dan sarana penunjang lain juga tersedia. Oleh karena itu, sangatlah prospektif apabila para investor dapat menanamkan modalnya dalam rangka pengembangan kawasan ini.

Kawasan Bintaro juga telah berkembang dan menjadi salah satu kawasan yang diperhitungkan oleh para investor. Berbagai infrastruktur di kawasan SCBD Bintaro Jaya berupa gedung perkantoran, pusat belanja, rumah sakit, pusat pendidikan telah berdiri di kawasan ini. Untuk memperlancar arus lalu lintas, di bundaran Bintaro Sektor IX telah dibangun fly over yang menghubungkan simpul-simpul bisnis dan jasa, termasuk jasa pendidikan, dengan dibangunnya Universitas pembangunan Jaya.

Bidang Jasa dan perdagangan juga terus dikembangkan di kawasan Ciputat-Pamulang. Sebagai kawasan Pusat Pendidikan skala nasional dengan adanya UIN Syarif Hidayatullah dan Universitas Terbuka, maka daerah Ciputat dan Pamulang dapat dikembangkan sebagai kawasan jasa pendidikan.

- 7) Pengembangan Tangsel sebagai pusat MICE (*Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions*). Sebagai kota perdagangan dan jasa, maka salah satu sarana perkotaan dan dapat dijadikan ikon kota Tangerang Selatan adalah pembangunan convention center, atau trade exhibition center atau gedung konser. Sesuai dengan motto cerdas, modern dan religius, maka Kota Tangerang Selatan mencari para investor untuk membangun gedung yang memiliki ciri khas daerah Kota Tangerang Selatan tetapi juga modern. Dimana dapat menjadi pusat kesenian Kota Tangerang Selatan dan dapat digunakan juga untuk berbagai kegiatan pameran, rapat atau forum pertemuan resmi skala nasional dan internasional. Pembangunannya dapat dibangun secara terpadu dengan dilengkapi fasilitas office tower atau hotel bintang lima yang dapat dimanfaatkan juga sebagai tempat penyewaan ruang kantor.
- 8) Sektor Industri dan Pergudangan. Melihat luas lahan yang tersedia, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam arah dan tujuan pembangunan, tidak menempatkan sektor industri dan pergudangan sebagai andalan. Saat ini peruntukan lahan untuk industri hanya 1,14 % saja dari luas lahan Kota Tangerang Selatan, atau sekitar 16,67 hektar. Industri yang dikembangkan pun ditujukan kepada *green industry* dan ramah lingkungan. Pemilihan industri yang cocok untuk itu adalah industri yang tidak mempunyai banyak limbah kimia. Industri pembuatan produk dari bahan setengah jadi seperti pembuatan bola di Pondok Cabe, atau industri garmen serta industri perakitan lainnya yang ramah lingkungan adalah salah satu contoh yang bisa dikembangkan. Selain itu, dengan adanya fasilitas

pergudangan di Taman Tekno BSD dan kawasan Multiguna Serpong Utara, melengkapi sarana investasi penanaman modal pada sektor industri maupun pergudangan yang ramah lingkungan.

- 9) Pengembangan Ekonomi Kreatif. Kreatif ekonomi memiliki potensi yang sangat besar dalam ekonomi saat ini. Inti perekonomian saat ini sedang mengalami pergeseran dari ekonomi berbasis sumber daya alam kepada ekonomi yang berbasis pengetahuan dan inovasi. Hal ini juga sejalan dengan kecenderungan perkembangan “Ekonomi Hijau” atau “Bisnis Hijau” yang menjadikan keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang utama di samping pertumbuhan dan keuntungan. Tangerang Selatan sebagai kota yang tidak memiliki sumber daya alam melimpah namun memiliki sumber daya manusia dengan kualitas yang cukup baik, penduduk berusia muda, dan komunitas kreatif, memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi kreatif sebagai tulang punggung ekonominya.
- 10) Potensi Wisata di Tangerang Selatan terdapat beberapa lokasi kunjungan wisata. Industri pariwisata di Tangsel, terus meningkat seiring dengan kesiapan infrastruktur pendukung sehingga sektor ini dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan terlihat antara lain dari angka kunjungan wisatawan yang ditargetkan 381.861 per tahun, kini tercatat 1.951.999 wisatawan sampai dengan akhir tahun 2019.

Kawasan pariwisata yang direncanakan dalam RTRW seluas kurang lebih 5,97 hektar. Pengembangan kawasan pariwisata, meliputi pengembangan wisata alam dan rekreasi diarahkan di Sungai Cisadane, Situ Gintung, Situ Ciledug, Situ Pondok Jagung, taman kota dan hutan kota, pengembangan wisata belanja diarahkan di Kecamatan Pondok Aren, Kecamatan Serpong, dan Kecamatan Ciputat Timur serta pengembangan wisata kuliner di Kecamatan Serpong, Kecamatan Serpong Utara dan Kecamatan Pondok Aren

Pertumbuhan sektor pariwisata yang terus menjadi perhatian Pemerintah Daerah akan didukung dengan pusat perbelanjaan dan wisata baru seperti TransStudio di BSD, Community Center di kecamatan Pamulang yang dirancang sebagai ruang luar publik yang mewadahi berbagai aktivitas masyarakat, kedalam tiga fungsi utama yaitu fungsi olahraga, fungsi komunitas dan fungsi kesenian dan kebudayaan, termasuk Tangsel akan memiliki Tangsel HUB dengan nama Gallery Koperasi dan Innovation Centre.

e. Fokus Iklim Berinvestasi

Salah satu aspek penting daya saing daerah yaitu stabilitas keamanan. Daerah dengan tingkat keamanan dan ketertiban yang lebih baik akan memiliki daya saing ekonomi yang lebih tinggi. Pada umumnya untuk menjalankan aktivitas ekonomi dan sosial faktor keamanan menjadi prasyarat bagi dunia usaha dan masyarakat.

Angka kriminalitas yang tertangani selama periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 cenderung fluktuatif dan rata-rata dapat tertangani setiap tahunnya. Angka kriminalitas tertangani ini berkaitan dengan cybercrime, terutama penipuan online. Jika dirata-rata terjadi sekitar 4 kasus setiap harinya, secara umum kondisi tersebut masih tergolong kondusif bagi berlangsungnya aktivitas masyarakat. Meskipun demikian, tetap diperlukan upaya untuk menekan meningkatnya angka kriminalitas di Kota Tangerang Selatan. Hal ini dapat dilakukan melalui pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat untuk turut menjaga keamanan lingkungannya.

Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan tahun 2019 sebesar 5,77 yang berarti bahwa untuk menghasilkan tambahan (increment) Rp. 1 milyar output diperlukan tambahan modal Rp. 5,77 milyar rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan 1 satuan output (NTB) di Kota Tangerang Selatan dibutuhkan investasi sebesar 5,77 milyar rupiah.

Salah satu diantara kegunaan ICOR adalah untuk menghitung kebutuhan investasi riil (PMTB) dalam rangka mewujudkan target indikator ekonomi tertentu yang telah ditetapkan pemerintah dalam dokumen rencana pembangunan.

Tabel 2.23. Nilai Koefisien ICOR Kota Tangerang Selatan, 2010-2019

Tahun	ICOR									
	Leg 0	Leg 1	Leg 2	Leg 3	Leg 4	Leg 5	Leg 6	Leg 7	Leg 8	Leg 9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)
2010	5,77	5,25	4,91	4,47	4,47	4,63	4,58	3,98	4,63	4,58
2011	5,71	5,34	4,86	4,86	5,03	4,97	4,33	4,00	3,74	
2012	5,54	5,04	5,04	5,22	5,16	4,50	4,15	3,88		
2013	5,27	5,27	5,45	5,39	4,69	4,34	4,05			
2014	5,55	5,74	5,68	4,94	4,57	4,27				
2015	5,94	5,87	5,12	4,57	4,27					
2016	6,14	5,34	4,94	4,61						
2017	5,83	5,38	5,49							
2018*	5,88	5,49								
2019**	5,77									
ICOR Rata-rata	5,74	5,41	5,14	4,91	4,78	4,61	4,35	3,99	4,63	4,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan

Cat: *) : Angka perubahan

**): Angka sementara

f. Fokus Sumber Daya Manusia

Gambaran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dapat dilihat juga dari tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal yang merupakan gambaran kualitas SDM suatu wilayah. Dengan semakin banyaknya persentase penduduk yang menamatkan pendidikan di pendidikan menengah keatas maka kualitas SDM suatu wilayah akan semakin baik, karena dengan SDM yang memadai maka akan lebih mudah untuk mengembangkan kemampuan, kreatifitas dan kualitasnya.

Tabel 2.24. Persentase Penduduk Berumur 15 tahun Ke atas Menurut Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki dan Jenis Kelamin

Ijazah/STTB Tertinggi yang Dimiliki	Laki-laki (%)	Perempuan (%)	Laki-laki+Perempuan (%)
Tidak Mempunyai Ijazah	7,13	7,81	7,47
SD/MI	7,90	13,30	10,59
SMP/MTs	15,02	17,98	16,49
SMA/MA	30,89	27,82	29,36
SMK/MAK	8,16	7,76	7,96
Diploma I dan Diploma II	0,26	0,98	0,62
Akademi/Diploma III	5,55	4,85	5,20
Diploma IV/S1/S2/S3	25,08	19,49	22,30

Sumber : BPS Kota Tangerang Selatan, 2020

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Triwulan II dan Realisasi RPJMD

Capaian Sasaran RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021 diterjemahkan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator kinerja ini sebagian besar bersifat capaian tahunan sehingga sebagian besar data capaiannya belum tersedia pada Triwulan II Tahun 2021, sehingga data capaian ini disampaikan hingga Triwulan IV tahun 2020 yang ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 2.25. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kota Tangerang Selatan sd Triwulan IV tahun 2020

No	Indikator	Satuan	Target Akhir RPJMD 2021	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian	Status Ketercapaian
1.	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	Persen	99	107,59	108,68%	●
2.	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	Persen	84,93	98,84	116,38%	●
3.	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	Persen	11,60-11,63	11,81	101,55%	●
4.	Angka Kematian Bayi (AKB)	Kelahiran Hidup	1/ 1000 kelahiran hidup	0,6/1.000	167%	●
5.	Angka Kematian Ibu (AKI)	Kelahiran Hidup	32/ 1000 kelahiran hidup	32/1.000	100%	●
6.	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	72,129-72,135	72,47	100%	●
7.	Rasio Penyerapan Tenaga Kerja	Persen	65	91,52	140,80%	●
9.	Indeks pembangunan gender	Persen	93,46-93,69	93,56	99,86%	●
10.	Indeks Pemberdayaan gender	Persen	64,37-64,67	70,72	109,36%	●
11.	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	Angka IKLI	7	9,08	129,71%	●
12.	Indeks kinerja jaringan jalan	Persen	90	97,31	108,12%	●
13.	Persentase kualitas sarana dan prasarana perkotaan	Persen	80	92,26	115,33%	●
14.	Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	Persen	12	14,25	118,75%	●
15.	Jumlah Investasi PMA	USD	3.650.000.000 (USD)	(548 PMA) USD47.594.139	1,30%	●
16.	Jumlah Investasi PMDN	Rp	475.000.000.000 (IDR)	(937 PMDN) Rp3.248.177.106.248	14,62%	●
17.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6 - 7,5	-1,01	-13,47%	●
18.	Ketahanan Pangan (Pola Pangan Harapan)	Persen	93	94,42	101,53%	●
19.	Tingkat kepuasan pelayanan publik	Mutu Pelayanan	Mutu pelayanan A	B	90,00%	●
20.	Opini BPK	Opini BPK	WTP	WTP	100%	●
21.	Predikat Akip	Nilai AKIP	B	B	100%	●

Sumber Data: Lakip Kota Tangerang Selatan, Tahun 2020

Keterangan:

- realisasi >90% target Tercapai (*achieved*)
- realisasi 60-90% target Akan tercapai/membaik (*positive change*)
- realisasi <60% target Perlu perhatian khusus (*negative change*)

Pencapaian IKU Kota Tangerang Selatan hingga triwulan IV tahun 2020 menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target pembangunan hingga akhir 2021. Permasalahan umum yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan 2021 di antaranya permasalahan pemulihan ekonomi daerah. Masalah pemulihan ekonomi ini tercermin dalam pelaksanaan kinerja investasi dan pertumbuhan ekonomi yang terkendala oleh permasalahan global yakni COVID-19 yang memberikan dampak negatif dirasakan oleh hampir semua pelaku ekonomi. Pendapatan dan konsumsi masyarakat turun tajam sebagai akibat pembatasan pergerakan masyarakat. Investasi terdampak sebagai akibat terganggunya neraca keuangan perusahaan karena turunnya penerimaan dan terhentinya beberapa aktivitas produksi. Perdagangan internasional terdampak akibat rendahnya aktivitas perdagangan di tingkat global yang juga menyebabkan turunnya harga komoditas.

Dengan berbagai keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Tangerang Selatan dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan COVID-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya, melalui beberapa upaya, yaitu menguatkan sektor kesehatan, melindungi masyarakat dan dunia usaha, mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan meningkatkan program yang bersifat pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pascapandemi COVID-19.

Apabila dilihat dari hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, terlihat realisasi keuangan dan fisik tercapai masing-masing sebesar 40 persen. Mencermati perkembangan capaian tersebut bisa dipastikan dengan adanya pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap realisasi fisik dan keuangan, namun demikian tidak berkorelasi secara langsung terhadap realisasi kinerja, artinya dengan adanya pandemi ini tidak berpengaruh terhadap kinerja aparatur Pemerintah Kota Tangerang Selatan meskipun banyak diberlakukan kebijakan WFH dan WFO dengan pembatasan sampai 50 persen pegawai yang diijinkan masuk kerja, kinerja pegawai bisa dipastikan tetap produktif menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Dari hasil evaluasi capaian RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II, menunjukkan bahwa dukungan *output* kegiatan telah optimal dalam mendukung pencapaian RPJMD sesuai dengan target yang ditetapkan. Program dan kegiatan dalam masing-masing urusan yang dilaksanakan telah berhasil dijaga keterkaitan dan kontribusinya dalam pelaksanaan program. Sehingga diprediksi mencapai RPJMD diatas 99 persen sampai dengan akhir Tahun 2021.

Tabel 2.26. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
A	URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
1	PAUD dan Pendidikan Non Formal	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,62	14,62	14,62	0%	0%	Disdikbud
	PAUD dan Pendidikan Non Formal	APM PAUD	Persen	32,30%	32,30%	32,30%	0%	0%	Disdikbud
2	Pendidikan Sekolah Dasar	APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	Persen	99,99%	99,99%	99,99%	0%	0%	Disdikbud
3	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS	Persen	97,50%	97,50%	97,50%	0%	0%	Disdikbud
4	Pengembangan dan Pembinaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Uji Kompetensi Guru		85,00	85	85,00	0%	0%	Disdikbud
5	Pengembangan pelayanan kesehatan	Akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas	Puskesmas	10	-	10	-	-	Dinkes
	Pengembangan pelayanan kesehatan	Persentase akreditasi unit Labkesda	Persen	60%	50%	60%	50%	50%	Dinkes
	Pengembangan pelayanan kesehatan	Jenis pelayanan sesuai standar pelayanan minimal rumah sakit	Jenis pelayanan	21	20	21	20	20	RSU
6	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase alat kesehatan sesuai standar	Persen	85%	85%	85%	0%	20%	Dinkes
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang terbangun	Puskesmas	35	33	35	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan posyandu yang dibangun	Posyandu	151	139	151	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah bangunan puskesmas yang dikembangkan	Puskesmas	-	-	-	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah puskesmas yang perlu adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	Puskesmas	1	-	1	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Bangunan PPKT	Sarana dan prasarana Olahraga	0%	0%	0%	0%	0%	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Persentase Gudang terbangun	Persen	0%	100%	0%	0%	0%	Disbangtarung

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan dibangun	Unit	-	2	-	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Jumlah Puskesmas yang direhabilitasi	Puskesmas	-	-	-	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Tingkat instrumen akreditasi rumah sakit	Bab (Level)	12	15	12	15	15	RSU
7	Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan reagen dan bmhp laboratorium di puskesmas dan labkesda	Persen	95%	99%	95%	1%	20%	Dinkes
	Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase ketersediaan obat dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya	Persen	99%	100%	99%	2%	20%	Dinkes
	Penyediaan dan pengawasan obat, makanan dan perbekalan kesehatan	Persentase resep sesuai dengan formularium	Persen	90%	99%	90%	98%	99%	RSU
8	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	1/Per 100.000 kelahiran hidup	32	32	32	15	33	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Angka Kematian Bayi per 1.000 kelahiran hidup	32/Per 100.000 kelahiran hidup	1,0	0,8	1,0	1,2	0,9	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan balita	Persen	97%	100%	97%	24%	35%	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan siswa SD/setingkat	Persen	100%	100%	100%	27%	92%	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan lansia	Puskesmas Santun Lansia	32	29	32	29	29	Dinkes
	Peningkatan pelayanan kesehatan keluarga	Cakupan pelayanan kesehatan remaja	Persen	80%	84%	80%	26%	30%	Dinkes
9	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase balita gizi buruk mendapat perawatan	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase Ibu hamil KEK mendapat makanan tambahan	Persen	95%	100%	95%	100%	100%	Dinkes
	Program perbaikan gizi masyarakat	Persentase Remaja putri yang mendapat TTD	Persen	40%	30%	40%	39%	25%	Dinkes
10	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan siaga aktif	Kelurahan	54	54	54	54	54	Dinkes
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Cakupan organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan	Persen	100%	100%	100%	80%	80%	Dinkes
	Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentase pasien yang mengetahui produk pelayanan rumah sakit	Persen	75%	100%	75%	90%	100%	RSU
11	Pengembangan SDM kesehatan	Cakupan SDM Kesehatan yang terlatih	Persen	90%	90%	90%	80%	80%	Dinkes
	Pengembangan SDM kesehatan	Persentase SDM Kesehatan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam per tahun	Persen	50%	83%	50%	83%	83%	RSU
12	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Cakupan penanganan penyakit menular dan tidak menular sesuai tahapan standar nasional	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap	Persen	94%	90%	94%	24%	45%	Dinkes
	Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular	Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspn	Persen	92%	100%	92%	100%	100%	Dinkes
13	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan	Persen	80%	80%	80%	100%	75%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial yang mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan Tk.I dan Rujukan	Persen	40%	78%	40%	42%	29%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan warga kota Tangerang Selatan yang mendapatkan Pelayanan pengelolaan Darah yang tidak di tanggung BPJS	Persen	85%	100%	85%	100%	100%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan masyarakat miskin dan kurang mampu serta masyarakat yang beresiko berdampak sosial, yang memiliki Jaminan asuransi kesehatan	Persen	77%	78%	77%	95%	92%	Dinkes
	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar, rujukan dan komplementer	Cakupan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional dan komplementer	Persen	72%	72%	72%	72%	72%	Dinkes
14	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Jumlah puskesmas BLUD	Puskesmas	2	29	2	10	10	Dinkes
	Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD	Persentase kepuasan pasien yang disurvei	Persen	76%	82%	76%	80%	80%	RSU
15	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	Persen	60%	81%	60%	70%	74%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	62%	45%	62%	96%	100%	Dinkes

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase cakupan rumah yang memenuhi syarat kesehatan	Persen	80%	81%	80%	95%	95%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	Kelurahan	54	54	54	54	54	Dinkes
	Pengembangan dan pengendalian lingkungan sehat	Persentase pengelolaan limbah rumah sakit sesuai standar	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	RSU
16	Pembangunan jalan dan jembatan	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik	Persen	90%	97%	90%	98%	98%	Dinas PU
	Pembangunan jalan dan jembatan	Jalan lingkungan dalam kondisi baik	Persen	70%	67%	70%	62%	62%	Dinas PU
	Pembangunan jalan dan jembatan	Pedestrian jalan yang dibangun	Persen	7%	19%	7%	10%	10%	Dinas PU
17	Pengendalian banjir	luas genangan yang tereduksi	Persen	42%	67%	42%	38%	39%	Dinas PU
18	Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Pemanfaatan air sungai, danau, dan penampung air lainnya sebagai layanan air baku	Persen	20%	18%	20%	17%	17%	Dinas PU
	Pengembangan pengelolaan dan konversi sungai danau dan sumber daya air lainnya	Kapasitas debit sungai /tandon	Persen	42%	43%	42%	38%	43%	Dinas PU
19	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah	Persen	0%		0%	0%	0%	Bappeda
	Perencanaan Tata Ruang	Tersedianya informasi mengenai rencana rinci tata ruang beserta rencana teknisnya melalui peta analog dan peta digital	Persen	100%	4%	100%	1%	1%	Disbangtarung
20	Pengelolaan sarana air minum dan air limbah	persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Persen	89,85%	88,80%	89,85%	0,00%	0,00%	Disbangtarung

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Pengelolaan sarana air minum dan air limbah	Persentase pelayanan air minum	Persen	85,5%	84,50%	85,5%	0,00%	0,00%	Disbangtarung
21	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung perkantoran	Gedung	2	22	2	-	-	Disbangtarung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Tersedianya sarana dan prasarana gedung non perkantoran	Paket	1	3	1	-	-	Disbangtarung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan kajian dan rekomendasi teknis serta sertifikat laik fungsi	Persen	100%	100%	100%			Disbangtarung
22	Pengendalian dan pemanfaatan ruang	Terlayannya masyarakat dalam pengurusan keterangan peruntukan lahan	Persen	100%	100%	100%	0%	0%	Disbangtarung
23	Penataan Lingkungan Terpadu	Pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan (Ha)	Ha	335	37	335	-	35,00	Dinas Perkim
	Penataan Lingkungan Terpadu	Terbangunnya sarana penunjang permukiman	Unit	30	33	30	-	-	Dinas Perkim
	Penataan Lingkungan Terpadu	Penyediaan rumah susun sederhana sewa (unit)	twin blok	1		1	-	-	Dinas Perkim
	Penataan Lingkungan Terpadu	Rumah tidak layak huni menjadi layak huni	Unit	50	205	50		200	Dinas Perkim
24	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan sertifikat keahlian perencana dan perancang rumah dan PSU perumahan skala kecil	Persen	100%	93%	100%	0%	93%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Tersedianya data rumah dan perumahan	Dokumen	-		-	-	-	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perda	1	-	1	-	-	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Tersedianya regulasi penyelenggaraan perumahan dan permukiman	Perwal	1		1	-	-	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan pengesahan pertelaan rumah susun	Persen	100%		100%	0%	0%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah susun	Persen	100%	0%	100%	0%	0%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	Persentase terlayannya masyarakat dalam pengurusan rekomendasi teknis pembangunan dan pengembangan rumah tapak	Persen	100%	100%	100%	0%	100%	Dinas Perkim
	Pengembangan infrastruktur permukiman	tercatatnya PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca aset	Perum	10	18	10	-	-	Dinas Perkim
25	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPU	10	8	10	-	8	Dinas Perkim
	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pengembangan dan Pembangunan TPU	TPK	1	1	1			Dinas Perkim
	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Terpeliharanya sarana TPU	Persen	100%	100%	100%	0%	100%	Dinas Perkim
	Penyediaan dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Pembinaan kelembagaan pengelolaan TPU	Persen	100%	100%	100%	0%	100%	Dinas Perkim
26	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Penambahan jumlah PJU terbangun	Titik	2.250	3.700	2.250	-	-	Dinas Perkim
	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Terpeliharanya dan terbayarnya rekening PJU	Persen	100%	100%	100%	0%	100%	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
27	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Respon time kebakaran	Menit	10	10	10	9,68	10,39	Dinas Damkarmat
	Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Cakupan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan korban serta harta benda	Persen	100%	100%	100%	25,00%	50,00%	Dinas Damkarmat
28	Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	Persen	100%	100%	100%	25%	30%	BPBD
	Penanggulangan Bencana Daerah	Tingkat waktu tanggap (response time rate) < 20 Menit terhadap Bencana	Persen	100%	100%	100%	25%	30%	BPBD
29	Penegakan peraturan daerah dan peraturan walikota	Cakupan Penegakan Perda dan /atau Perwal	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
30	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	Kali	25	18	25	4	4	Satpol PP
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Penindakan Pelanggaran pengamanan dan penertiban	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah penambahan SDM dan sarana prasarana penunjang	Persen	76%	80%	76%	84%	84%	Satpol PP
	Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Persentase Aparatur Satpol PP yang diatih	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Satpol PP
31	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabsos sesuai standar dasar	Persen	58%	37%	58%	6%	9%	Dinsos
32	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan	Persen	45%	23%	45%	5%	5%	Dinsos
	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Peningkatan pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial dan keagamaan	Dokumen	4	4	4	-	-	Setda
	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Dokumen	7	7	7	2	2	Setda

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS	Dokumen	2	2	2	-	-	Setda
B	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
33	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase tenaga kerja siap pakai	Persen	20%	17%	20%	4%	7%	Disnaker
34	Peningkatan Kesempatan Kerja dan Berusaha	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Persen	69%	54%	69%	10%	19%	Disnaker
35	Kerjasama Hubungan Industrial dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Menurunnya Angka perselisihan Industrial	Kasus	17	35	17	6	32	Disnaker
36	Peningkatan peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	Orang	743	2.512	743	2.418	2.418	DPMP3AKB
37	Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	DPMP3AKB
38	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	IPG dan IDG	Persen IPG	93,68-94,53%	94%	93,68-94,53%	93%	93%	DPMP3AKB
	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	IPG dan IDG	Persen IDG	64,66-65,27%	74,00%	64,66-65,27%	70,72%	70,72%	DPMP3AKB
	Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	Kelurahan	19	17	19	16	16	DPMP3AKB
39	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Inovasi	11	11	11	9	9	DPMP3AKB
	Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Peran serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Persen	85%	100%	85%	100%	100%	DPMP3AKB
40	Peningkatan Ketahanan Pangan	Penguatan cadangan pangan	Ton	10	1	10	-	-	DKP3

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan	Persen	100%	95%	100%	25%	25%	DKP3
	Peningkatan Ketahanan Pangan	AKG dan AKP	Persen	93%	94%	93%	20%	25%	DKP3
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Keamanan Pangan	Persen	85%	73%	85%	16%	0%	DKP3
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Terlaksananya koordinasi ketahanan pangan	Persen	100%	24%	100%	24%	0%	DKP3
41	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	Dokumen	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan	Kegiatan	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasinya dan pendampingan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan	Paket pengadaan	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk : kantor kelurahan, kawasan pertanian terpadu, dan Kantor Pemerintahan Kota Tangerang Selatan	Paket	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk : Infrastruktur Dasar, Kawasan Perdagangan dan Lapangan Olah Raga	Paket	-	-	-	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan infrastruktur dasar dan Non Gedung Perkantoran	Paket	2	6	2	4	1	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Fasilitasi dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar dan Non Gedung Perkantoran	Paket	2	5	2	3	1	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya pengadaan tanah untuk kepentingan Umum dalam rangka pembangunan Gedung Perkantoran / fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non infrastruktur dasar	Paket	2	5	2	4	1	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terlaksananya Fasilitas dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ fasilitas pelayanan pemerintah bagi masyarakat dan Non Infrastruktur Dasar	Paket	2	4	2	3	1	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya dokumen perencanaan pengadaan tanah	Paket	1	1	1	-	1	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya dokumen teknis rencana pengadaan tanah	Paket	1	1	1	-	1	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan kebutuhan lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan	Paket	1	-	1	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Tersusunnya laporan Monitoring dan Evaluasi Tahapan Pengadaan Tanah	Paket	1	-	1	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasnya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan	Kegiatan	3	-	3	-	-	Dinas Perkim
	Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Terfasilitasnya Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup	Orang	180	200	180	200	-	Dinas Perkim

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
		Pemerintah Kota tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan							
42	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	persentase penanganan terhadap pengaduan pencemaran dan perusakan lingkungan	Titik pantau	78	86	78	-	-	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Cakupan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin lingkungan dan pengelolaan lingkungan	Persen	100%	100%	100%	0%	72%	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Pengendalian dan pengawasan terhadap B3 dan limbah B3	Perusahaan	50	50	50	-	15	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Alat terkalibrasi	30	30	30	-	-	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Alat laboratorium terpelihara	30	10	30	-	5	Dinas LH
	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	Optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup	Parameter terakreditasi	5	5	5	-	-	Dinas LH
43	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	Kecamatan	1	2	1	-	-	Dinas LH
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Luas lahan yang dikonservasi dan pelaksanaan program kali bersih di tiap kecamatan	M3	500	10.273	500	-	-	Dinas LH
	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Pilot Project kampung iklim (kampung Hijau di 7 kecamatan)	Kampung hijau kecamatan	1	2	1	-	-	Dinas LH

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
44	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah peningkatan partisipasi aktif masyarakat terkait pelestarian lingkungan hidup	Persen	80%	70%	80%	0%	0%	Dinas LH
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA	Poin	76	-	76	-	-	Dinas LH
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	Orang (mendapatkan penghargaan)	1	1	1	-	-	Dinas LH
	Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan hidup	Jumlah penghargaan Nasional maupun lokal terkait pelestarian lingkungan hidup	Sekolah	3	16	3	-	-	Dinas LH
45	Pengembangan pengelolaan persampahan	Persentase pengangkutan sampah	Persen	70%	89%	70%	0%	30%	Dinas LH
46	Pengelolaan Sampah terpadu	Persentase pengurangan sampah melalui 3R	Persen	10%	12%	10%	0%	3%	Dinas LH
47	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan KK	Persen	100%	135%	100%	128%	130%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan penerbitan KTP	Persen	99,62%	100,27%	99,62%	95%	96%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	Persen	96,27%	107,46%	96,27%	99%	100%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	Persen	83,01%	98%	83,01%	85%	86%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	Persen	76,96%	79%	76,96%	74%	74%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	Persen	12%	14%	12%		14%	Disdukcapil
	Penataan Administrasi Kependudukan	Jumlah Data dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	Penduduk	1.364.099	1.279.972	1.364.099	1.279.052	1.279.972	Disdukcapil
48	Pengendalian Penduduk	Pengendalian Urbanisasi Penduduk	Orang	350	1.614	350		360	Disdukcapil

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
49	Keluarga Berencana	Proporsi Pasangan Usia Subur yang istrinya dibawah 20 Tahun	Persen	1,8%	0,8%	1,8%	0,8%	0,8%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Menurunnya Unmet Need	Persen	6,1%	6,1%	6,1%	6,3%	6,3%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Kesertaan ber- KB	Persen	71,5%	76,9%	71,5%	75,3%	75,6%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) yang Ber-KB	Persen	92,66%	94,9%	92,66%	90,8%	91,5%	DPMP3AKB
	Keluarga Berencana	Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS	Persen	70,0%	70,6%	70,0%	70,6%	70,6%	DPMP3AKB
50	Pengembangan pelayanan angkutan	Jumlah uji kir	Unit	37.500	35.586	37.500	10.243	16.608	Dishub
51	Pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Jumlah titik pengendalian dan pengaturan lalu lintas	Titik	40	40	40	40	40	Dishub
52	Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana dan fasilitas Perhubungan	Persentase sarana prasarana lalu lintas yang dapat berfungsi	Persen	90%	50%	90%	9%	12%	Dishub
53	Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Peningkatan jumlah sarana prasarana lalu lintas	Persen	100%	94%	100%	7%	36%	Dishub
54	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	Persen	20%	15%	20%	0%	2,80%	Diskominfo
	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Persentase Penyebaran Informasi	Persen	20%	20%	20%			Diskominfo
	Pengembangan Komunikasi, sistem informasi dan Media Massa	Cakupan pembangunan , operasional dan pemeliharaan sistem di SKPD	Persen	100%	100%	100%		50,00%	Seluruh OPD
55	Pengembangan Koperasi	Jumlah SDM Koperasi yang dibina	SDM Koperasi	1.825	1.995	1.825	475	1.105	Dinas KUKM
	Pengembangan Koperasi	Jumlah usaha koperasi simpan pinjam dan ijin pembukaan kantor cabang / pembantu / kantor kas KSP	Koperasi	250	251	250		20	Dinas KUKM
	Pengembangan Koperasi	Pengawasan dan pemeriksaan koperasi	Koperasi	640	749	640		134	Dinas KUKM

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
		serta penilaian KSP atau USP							
	Pengembangan Koperasi	Jumlah koperasi yang terfasilitasi	Koperasi	50	110	50	4	6	Dinas KUKM
56	Pengembangan UMKM	Jumlah fasilitasi sertifikasi produk UMKM	Produk UMKM	325	456	325	60	-	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pengembangan pemasaran produk dan inovasi promosi UMKM	Produk UMKM	800	869	800		319	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pembinaan wirausaha UMKM dan Calon Wirausaha UMKM	SDM UMKM	1.390	1.720	1.390		220	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	Galeri UMKM	7	3	7		3	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pembangunan dan Operasional sarana dan Prasarana pengembangan UMKM	Gedung	1	1	1	1	-	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	UMKM	315	335	315	75	-	Dinas KUKM
	Pengembangan UMKM	Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi dan Teknologi	Dokumen	3	3	3		-	Dinas KUKM
57	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Lokasi Penataan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Lokasi	1	1	1		1	Dinas KUKM
	Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Jumlah Revitalisasi Pasar Rakyat yang dikelola Koperasi	Lokasi	1	1	1		1	Dinas KUKM
58	Pengembangan investasi	Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	PMA	57	301	57	0	75	DPMPPTSP
	Pengembangan investasi	Peningkatan Jumlah Investasi PMA & PMDN	PMDN	20	158	20	0	96	DPMPPTSP

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
59	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Penerapan Pelayanan dan Perijinan Satu Pintu dan Satu Atap	Jenis Ijin	60	121	60	121	121	DPMPPTSP
	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Jumlah layanan perizinan yang bersertifikasi ISO	Jenis Ijin	22	121	22	121	121	DPMPPTSP
60	Pengembangan peran serta kepemudaan	Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	OKP	10	15	10	2	2	Dispora
61	Pengembangan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah Calon Wirausaha Muda	Kelompok Calon Wirausaha Muda	7	7	7		-	Dispora
62	Pengembangan manajemen dan masyarakat olahraga	Pembinaan Manajemen dan Pengembangan Olahraga di Masyarakat	Cabor	15	18	15		-	Dispora
63	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga	Sarana dan prasarana Olahraga	15	14	15		-	Dispora
	Pengembangan sarana dan prasarana olahraga	Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga	Sarana dan prasarana Olahraga	10	12	10	5	5	Dispora
64	Pengembangan data dan informasi	Cakupan data dan informasi SKPD	Persen	100%	100%	100%		50,00%	Seluruh OPD
	Pengembangan data dan informasi	Ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan	Dokumen	4	4	4	1	1	Bappeda
65	Optimalisasi Sistem Persandian	Cakupan Pengelolaan dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	Persen	20%	1220%	20%	20%	20%	Diskominfo
	Optimalisasi Sistem Persandian	Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi dan Jaringan Komunikasi Sandi	Persen	20%	35%	20%	0%	0%	Diskominfo
66	Pengembangan dan Pengelolaan kebudayaan	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	Jenis	4	4	4	-	-	Disdikbud

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
67	Pengembangan budaya baca	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun	Orang	910.000	268.045	910.000	66.708	66.740	Perpus Arsip
	Pengembangan budaya baca	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	Judul	40.000	25.597	40.000	25.755	25.755	Perpus Arsip
68	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan	Tertatanya arsip seluruh perangkat daerah dan unit kerja	Persen	75%	65%	75%	53%	53%	Perpus Arsip
C	URUSAN PILIHAN								
69	Pengembangan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	Persen	103%	100%	103%	0%	0%	DKP3
70	Pengembangan destinasi pariwisata	Jumlah PAD dari sektor pariwisata	Rupiah	420.336.370.594	248.556.780.636	420.336.370.594	96,121,339,948	127,085,412,742	Dispar
71	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Wisatawan	436.413	704.857	436.413	259.004	274.597	Dispar
72	Pengembangan pertanian	Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	Persen	103%	100%	103%	0%	0%	DKP3
	Pengembangan pertanian	Presentase Kesehatan Hewan	Persen	84%	97%	84%	20%	50%	DKP3
	Pengembangan pertanian	Presentase Bahan Asal Hewan yang Memenuhi Kriteria ASUH	Persen	82%	88%	82%	20%	20%	DKP3
73	Pengembangan Kawasan Pertanian Terpadu	Penambahan Sarana Prasarana Kawasan Pertanian Terpadu	Persen	40%	100%	40%	10%	0%	DKP3
74	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase Pengawasan Barang dan Jasa	Persen	100%	100,00%	100%	25,00%	25,00%	Disperindag
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Stabilitas harga kebutuhan pokok	Komoditas	9	9	9	9	9	Disperindag
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan	Pelaku usaha	40	30	40	-	30	Disperindag
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah UTTP yang diawasi	UTTP	8.500	10.321	8.500	2.307	2.340	Disperindag

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah Rapat Koordinasi TPID dan Jumlah pendataan/pencacahan Indeks harga Konsumen	Dokumen	4	4	4		1	Setda
75	Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk yang dipasarkan	Produk	2	10	2	10	-	Disperindag
76	Pengembangan Industri	Cakupan binaan kelompok industri	Kelompok IKM	50	22	50	22	-	Disperindag
	Pengembangan Industri	Cakupan binaan kelompok industri kreatif	Kelompok Industri Kreatif	20	8	20	8	-	Disperindag
	Pengembangan Industri	Jumlah pelaporan informasi industri	Semester	2	2	2	-	2	Disperindag
D	URUSAN PENUNJANG								
77	Pengembangan pemetaan Wilayah	Terwujudnya pengembangan peta wilayah	Persen	100%	100%	100%	0%	0%	Setda
	Pengembangan pemetaan Wilayah	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam pengembangan pemetaan wilayah	Persen	100%	100%	100%		0%	Setda
	Pengembangan pemetaan Wilayah	Penegasan Batas Daerah/Kecamatan/Kelurahan	Kecamatan	7	3	7		-	Setda
	Pengembangan pemetaan Wilayah	Pembakuan Nama Rupabumi	Kali	1	1	1		-	Setda
	Pengembangan pemetaan Wilayah	Cakupan pemetaan tematik wilayah sesuai kebutuhan SKPD	Persen	100%	100%	100%		0,00%	Seluruh OPD
78	Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah perencanaan pembangunan daerah sesuai ketentuan	Dokumen	6	7	6	1	1	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian program RPJMD	Dokumen	1	1	1	-	-	Bappeda

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi capaian SDG's	Dokumen	1	1	1	-	-	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian smart city	Dokumen	1	1	1	-	-	Bappeda
	Perencanaan Pembangunan Daerah	Cakupan Perencanaan pembangunan di setiap SKPD sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	100%		43,16%	Seluruh OPD
79	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Tersusunnya laporan neraca aset sesuai ketentuan	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	BPKAD
80	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Terealisasinya target pajak daerah	Persen	100%	95%	100%	17%	40%	Bapenda
	Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Pengembangan dan pemeliharaan sistem pengendalian, pengelolaan keuangan dan pajak daerah	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	Bapenda
81	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya dokumen Raperda APBD sesuai ketentuan	Persen	100%	100,00%	100%	0,00%	0,00%	BPKAD
	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	BPKAD
	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Tersusunnya laporan pengendalian keuangan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan	Persen	100%	100,00%	100%	25,00%	50,00%	BPKAD
	Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan laporan keuangan di SKPD sesuai ketentuan	Persen	100%	100%	100%		19,67%	Seluruh OPD
82	Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Persentase ASN yang terlayani dalam data dan informasi manajemen ASN	Persen	100%	100%	100%	0%	100%	BKPP
83	Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur	Cakupan pengembangan sumber daya aparatur di SKPD	Persen	100%	100%	100%		47,36%	Seluruh OPD

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Pengembangan Sistem Manajemen sumber daya aparatur	Tersedianya kebijakan tentang penataan SDM/ASN	Dokumen	1	4	1			Setda
84	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah kajian penelitian dan pengembangan	Kajian	7	2	7	-	-	Bappeda
	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah koordinasi penelitian dan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan	Kali	4	4	4	-	1	Bappeda
	Penelitian dan Pengembangan	Terwujudnya pengembangan inovasi daerah	Dokumen	2	3	2	-	-	Bappeda
85	Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran	Persen	100%	100%	100%	0%	0%	Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Persentase Fasilitasi Pembahasan Perda / Non Perda	Persen	100%	86%	100%	1%	10%	Sekretariat DPRD
	Fasilitasi Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan	Persen	100%	100%	100%	0%	14%	Sekretariat DPRD
86	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Pemerintah Daerah	Dokumen	1	1	1		1	Setda
87	Kerjasama pembangunan dan kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ekonomi Daerah	Dokumen	4	4	4		2	Setda
	Kerjasama pembangunan dan kewilayahan	Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD dan BLUD	Dokumen	4	4	4		1	Setda
	Kerjasama pembangunan dan kewilayahan	Jumlah Peningkatan Kolaborasi dan Kerjasama Pembangunan dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi dan Masyarakat	Kali	11	9	11		1	Bappeda, Setda
88	Penataan peraturan perundang-undangan	Program Pembentukan Peraturan Daerah	Raperda	12	12	12		-	Setda
	Penataan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pembahasan RAPERWAL	Raperwal	36	37	36		22	Setda

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
		antara SKPD pemrakarsa dengan Tim Asistensi Pembahasan RAPERWAL							
	Penataan peraturan perundang-undangan	Harmonisasi dan Sinkronisasi RAKEPWAL	Rakepwal	248	450	248		167	Setda
	Penataan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah	Kali Sosialisasi	10	7	10		1	Setda
	Penataan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Fasilitasi Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan Daerah	(Sepanjang tahun)	1	1	1		1	Setda
	Penataan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Pendokumentasian Peraturan Perundang-undangan Daerah	(Sepanjang tahun)	1	1	1		1	Setda
	Penataan peraturan perundang-undangan	Terlaksananya program Pemerintah Pusat di Kota Tangerang Selatan	Kali Pertemuan Berkala JDIHN	1	-	1		-	Setda
89	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Terlaksananya Bimbingan Teknis Hukum Formil Aparatur	Orang	120	140	120		-	Setda
	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Terselenggaranya Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan	Orang	200	120	200		120	Setda
	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Terselenggaranya penyuluhan Hukum	Orang	500	75	500		-	Setda
	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Tertanganinya perkara hukum di lingkungan pemerintahan	Kali Pembahasan	15	15	15		18	Setda
	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Tertanganinya perkara hukum di lingkungan pemerintahan	Kasus	8	8	8		13	Setda
	Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Terlaksananya Pelayanan Bantuan Hukum	Kali bantuan	40	83	40		-	Setda

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
90	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	Persen	100%	100%	100%		37%	Setda
	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Terlaksananya Koordinasi Internal dan Eksternal Serta Audiensi Dengan Masyarakat	Persen	100%	100%	100%			Setda
91	Manajemen Perubahan	Meningkatnya Profesionalisme SDM Aparatur (ASN)	Persen	25%	25%	25%	3,23%	26,85%	BKPP, Setda
	Manajemen Perubahan	Meningkatnya penerapan/internalisasi kodeetik dan Kode Prilaku dalam Penguatan Budaya Kerja	Persen	20%	100%	20%	0%	1%	BKPP, Setda
92	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Prosentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Persen	100%	100,00%	100%	100,00%	100,00%	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Prosentase Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persen	100%	95,00%	100%	60,00%	60,00%	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Jumlah SKPD yang predikat sakin minimal B	Perangkat Daerah	38	38	38	37	38	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Level Implementasi SPIP Pemerintah Kota Tangerang Selatan	(Level)	3	3	3	3	3	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Level Implementasi SPIP SKPD	(Level)	3	3	3	-	-	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan		Perangkat Daerah	38	30	38	-	-	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	(Level)	3	3	3	3	3	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Prosentase Pejabat Yang melaporkan LHKPN	Persen	100%	99,51%	100%	82,21%	99,51%	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembagunan	Prosentase ASN yang melaporkan LHKASN	Persen	90%	50,00%	90%	30,00%	30,07%	Inspektorat

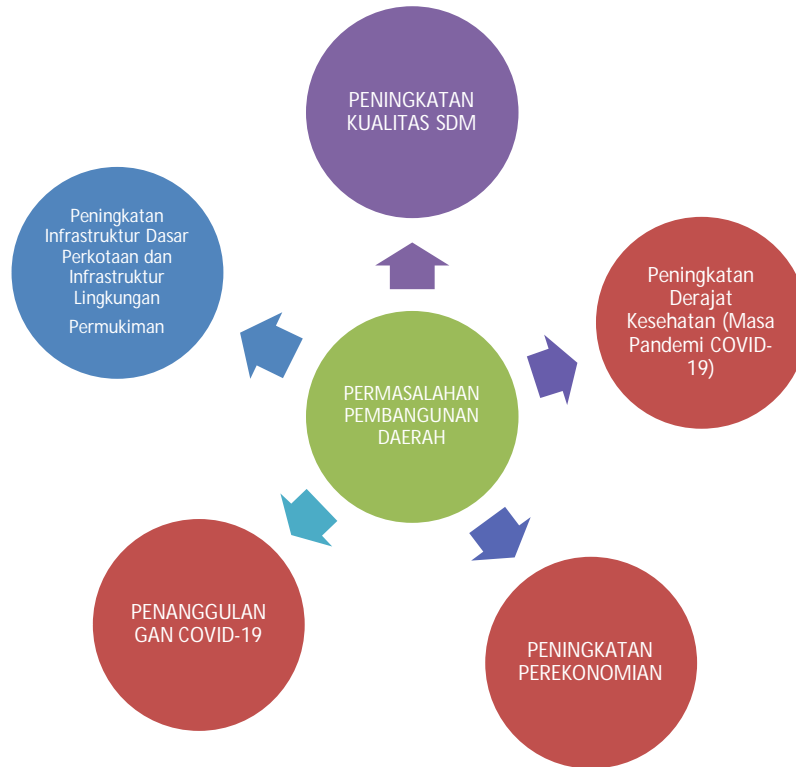
No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan	Indeks Persepsi Korupsi	(Indeks)	3		3	-	-	Inspektorat
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai unit kerja bebas korupsi	Unit Kerja	5		5	-	-	Setda
	Peningkatan pengawasan keuangan dan pembangunan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)	Dokumen	5	5	5		5	Setda
93	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan peran kecamatan dan kelurahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya	Persen	100%	100,00%	100%			Kecamatan
	Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan	Cakupan wilayah peningkatan kapasitas pemerintahan dan pembinaan perangkat kecamatan dan kelurahan	Persen	100%	100%	100%		100%	Setda
94	Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Capaian kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja	Perangkat Daerah	38	38	38	38	38	Seluruh OPD
95	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Rata-rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan publik di masing-masing SKPD	(Level)	A	B	A			Setda, Seluruh OPD
96	Penguatan tata laksana	Tersedianya SOP Teknis dan administrasi pemerintah	Dokumen	-	1	-			Setda
97	Pendidikan politik masyarakat	Jumlah Pembinaan Politik Masyarakat	Kali	10	12	10	5	5	Kesbangpol
98	Pengembangan wawasan kebangsaan	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan dan Kerjasama antar Umat Beragama, Nilai-nilai religius, sosial	Kali	40	45	40	5	7	Kesbangpol

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
		dan solidaritas serta Pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa							
99	Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	Persen	100%	100%	100%		52,90%	Seluruh OPD
E	PROGRAM STRATEGIS KEWILAYAHAN								
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Jumlah Pembangunan Community Center/komunitas kreatif skala kecamatan	Paket	-	1	-			Disbangtarung
100	Pendidikan Sekolah Menengah Atas/SMK	Penambahan Ruang Kelas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) khusus teknologi	Sekolah	-	-	-	-	-	Disbangtarung
	Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar terbangun	Sekolah	24	25	24		5	Disbangtarung
	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah Pertama terbangun	Sekolah	-	1	-	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Bangunan RSUD (Gedung 3)	Paket	-	-	-	-	-	Disbangtarung
	Pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan	Bangunan Gedung 2 RSUD Tangsel	Persen	0%	-	0%	0%	0%	Disbangtarung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota dan Skala Kecamatan	Paket	-	6	-	-	-	Disbangtarung
	Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana bangunan dan gedung	Bangunan Depo Arsip	Paket	-	1	-	-	-	Disbangtarung
101	Peningkatan Transportasi Massal	Peningkatan sarana prasarana transportasi massal	Persen	100%	8%	100%	0%	0%	Dishub
102	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah usaha terkait ekonomi kreatif dan icon tangsel	Pelaku ekonomi kreatif	30	50	30	-	38	Dispar, Dinas KUKM, Disperindag

No	Program	Indikator Program	Satuan	Capaian Kinerja RPJMD pada Tahun 2021 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja RPJMD s/d Tahun 2020	Target Kinerja RPJMD Tahun 2021 yg dievaluasi	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2021		Perangkat Daerah
							TW.1	TW.2	
103	Pengelolaan RTH	Jumlah RTH Publik yang dibangun dan ditingkatkan fungsinya	Kecamatan	7	1	7	-	-	Dinas LH
	Pengelolaan RTH	Persentase taman terpelihara	Persen	100%	100%	100%	0%	100%	Dinas LH
	Pengelolaan RTH	Persentase penanaman terhadap Ruang Terbuka Hijau yang harus ditanami	Km	1,3	1,8	1,3	-	1,1	Dinas LH
104	Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Jumlah kawasan perdagangan tradisional yang dikelola	Pasar	5	5	5	5	5	Disperindag
	Pengelolaan Pasar dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Jumlah Revitalisasi Pasar	Pasar	-	1	-	-	-	Disbangtarung
	Peningkatan Ketahanan Pangan	Manajemen Logistik	Dokumen	2	2	2	-	-	DKP3, Disperindag
105	Pelayanan jaminan kesehatan nasional	Prosentase masyarakat Tangerang Selatan menggunakan JKN	Persen	70%	81%	70%	60%	34%	Dinkes
106	Pembangunan dan pemeliharaan saluran drainase dan gorong-gorong	Kapasitas Debit Saluran	Persen	60%	55%	60%	51%	52%	Dinas PU
107	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi dan Informasi	Persen	20%	31%	20%	5%	16%	Diskominfo
	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan Tata Kelola Teknologi dan Informasi	Persen	20%	47%	20%	5%	34%	Diskominfo
	Pengembangan Teknologi dan Informasi	Peningkatan SDM Teknologi dan Informasi	Persen	20%	21%	20%	10%	20%	Diskominfo
108	Bantuan dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan dan Jaminan Sosial	Persen	90%	87%	90%	14%	34%	Dinsos
	Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	Urusan	35	35	35			Kecamatan

2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan pembangunan daerah dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi Indikator kinerja daerah. Hasil proses identifikasi permasalahan ini kemudian dikelompokkan sebagai berikut:



Gambar 2.17. Permasalahan Pembangunan Daerah

Berdasarkan gambaran permasalahan diatas, dari 5 permasalahan pembangunan daerah terdapat 3 pokok permasalahan yang masih perlu upaya keras dalam mengatasinya hingga akhir tahun 2021, yaitu terkait dengan peningkatan perekonomian perkotaan yang diukur dengan laju pertumbuhan ekonomi dalam rangka penurunan angka kemiskinan dan angka pengangguran, peningkatan investasi, peningkatan derajat kesehatan dimasa Pandemi COVID-19 serta pencegahan dan penanggulangan COVID-19.

Permasalahan laju pertumbuhan ekonomi salahsatunya di pengaruhi oleh pelaksanaan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro untuk mencegah penyebaran COVID-19 yang mengakibatkan terbatasnya aktivitas dan mobilitas masyarakat yang juga menyebabkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 berada pada angka -1,01 persen.

Permasalahan saat ini yang sedang terjadi adalah pandemi COVID-19 sehingga tantangan untuk meningkatkan derajat kesehatan semakin berat. Pada saat pandemi ini, seluruh sumber daya kesehatan difokuskan pada penanganan pandemi, dan disisi lain muncul kekhawatiran masyarakat terhadap berkurangnya upaya promotif dan preventif serta kurangnya optimalisasi penanganan pada penderita penyakit kronis baik penderita penyakit menular/penyakit tidak menular yang dikhawatirkan dapat berimplikasi terhadap penurunan derajat kesehatan masyarakat di Kota Tangerang Selatan sampai dengan akhir tahun 2021.

Akibat dampak pandemi COVID-19, angka kemiskinan Kota Tangerang Selatan tahun 2020 meningkat menjadi 2,29%. Dengan indikator tersebut, masih dirasakan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat yang belum optimal. Penanganan angka kemiskinan masih menjadi permasalahan utama kota Tangerang Selatan karena sasaran pengentasan kemiskinan sudah menyentuh kemiskinan struktural, sehingga upaya pengentasan kemiskinan semakin berat hingga akhir tahun 2021. Angka pengangguran belum menunjukkan penurunan yang optimal. Hal ini menjadi permasalahan kota Tangerang Selatan karena pengangguran merupakan salah satu permasalahan utama pembangunan nasional maupun daerah.

2.3.1. Permasalahan Daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Berdasarkan evaluasi permasalahan pembangunan daerah sampai dengan Tahun 2021 Triwulan II terdapat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:

1. Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19)

Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat ini, ditunjukkan dengan:

- a. Masih ditemukan jumlah kematian berdasarkan penyakit menular dan tidak menular, jumlah ini akan semakin tinggi dengan adanya pandemi COVID-19.
- b. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM) belum optimal ditandai dengan belum sesuai jumlah dan kompetensi Sumber daya manusia (SDM) serta kurangnya fasilitas Puskesmas.
- c. Kurangnya alat CT scan sehingga pasien dengan penyakit dan kebutuhan tersebut hari dirujuk ke RS lain.
- d. Jumlah tenaga medis masih belum mencukupi jumlah penduduk.
- e. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi dll.

2. Peningkatan Perekonomian

Permasalahan perekonomian yang terjadi adalah sebagai berikut.

- a. Belum semua produk IKM yang ada di Kota Tangerang Selatan memiliki peluang ekspor atau dapat berdaya saing dengan produk dari luar daerah lainnya.
- b. Tingginya harga jual IKM di pasaran lokal dan luar daerah, tidak diimbangi dengan skala produksi yang masih kecil.
- c. Nilai PDRB Kota Tangerang Selatan masih dapat ditingkatkan dari semua sektor (tidak sebatas jasa dan perdagangan).
- d. Angka inflasi Kota Tangerang Selatan masih dapat ditekan, penyebab utama inflasi adalah kenaikan harga barang – barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat.
- e. Jumlah PMA dan PMDN di Kota Tangerang Selatan masih dapat ditingkatkan di semua sektor.
- f. Menurunnya nilai PPH disebabkan karena kurangnya konsumsi masyarakat terhadap komoditas buah - buahan dan kacang - kacangan.
- g. Jumlah produk unggulan masih bisa ditingkatkan, terutama dari sektor UMKM dan ekonomi kreatif (e-kraf) dan peningkatan nilai tambah.

Permasalahan dalam meningkatkan investasi di Kota Tangerang Selatan sebagai berikut.

- a. Belum optimalnya peta potensi investasi.
- b. Belum optimalnya promosi penanaman modal ditandai dengan belum adanya strategi promosi penanaman modal daerah.

Penyerapan Lapangan Pekerjaan masih belum optimal, ditandai dengan:

- a. Pelatihan yang diberikan oleh pemerintah belum optimal dan belum tepat sasaran.
- b. Masih rendahnya kemampuan teknis sumber daya manusia (SDM) para pelaku usaha/ industri kecil menengah (IKM), sehingga mereka kesulitan dalam menerima transformasi teknologi baru.
- c. Belum optimalnya jejaring kemitraan antara IKM dengan industri besar.
- d. Kurangnya pembinaan berjenjang, sehingga setelah melakukan pelatihan banyak yang tidak terawasi.
- e. Kebutuhan *link and match* terkait permasalahan tidak sesuainya tenaga kerja yang tersedia dengan kebutuhan di industri, sehingga keahlian yang dimiliki oleh pencari kerja tidak sesuai dengan kebutuhan industry tersebut.
- f. Banyaknya perusahaan yang melakukan relokasi ke daerah dengan UMK rendah sehingga berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja di Tangerang Selatan.

3. Penanggulangan COVID-19

Penanganan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 mesti dilakukan secara komprehensif, meliputi berbagai upaya, seperti upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

- a. Upaya promotif dilakukan mulai dari sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat, yaitu mengedukasi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari agar menerapkan protokol kesehatan, serta menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- b. Upaya preventif, yang telah dilakukan meliputi: penyelidikan epidemiologi, pemantauan dan pendataan kepada seluruh kriteria kasus beserta kontak eratnya, melakukan analisa terhadap peningkatan kasus, pemetaan persebaran kasus, dan kejadian transmisi lokal (pelacakan kluster), menerapkan PPKM Mikro di daerah zona merah, melaksanakan pemeriksaan rapid test/PCR, dan membuat APD masker secara mandiri.
- c. Upaya kuratif dilakukan melalui menyiapkan tempat-tempat pelayanan kesehatan, menyediakan obat-obatan untuk menangani kasus COVID-19, dan menyediakan sarana rujukan yang aman untuk pasien COVID-19
- d. Upaya rehabilitatif dilakukan melalui pemantauan kepada pasien COVID-19 yang telah sembuh. Untuk mengetahui perkembangannya dan agar tetap melakukan *social distancing* dan upaya pencegahan lainnya.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Identifikasi permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dilakukan dengan mendasarkan pada hasil evaluasi Indikator kinerja program RKPD Tahun 2021 Triwulan II. Hasil proses identifikasi permasalahan ini diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum tercapainya akreditasi dan re-akreditasi Puskesmas.
- b. Belum tercapainya persentase Remaja putri yang mendapat TTD.
- c. Belum tercapainya pencatatan PSU perumahan yang dikuasai sepihak ke dalam neraca asset.
- d. Belum tercapainya persentase PMKS dan LKS yang diberdayakan.

- e. Masih tingginya Angka perselisihan Industrial.
- f. Belum tercapainya fasilitasi Aparatur di Bidang Pertanahan lingkup Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam mengikuti Bimtek di Bidang Pertanahan.
- g. Belum tercapainya optimalisasi fungsi analisis laboratorium lingkungan hidup.
- h. Belum tercapainya peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik.
- i. Belum tercapainya pembangunan Sarana dan Prasarana olahraga.
- j. Belum tercapainya ketersediaan data pendukung perencanaan dan pengendalian pembangunan Kota Tangerang Selatan.
- k. Belum tercapainya jumlah Koleksi Bahan Pustaka.
- l. Belum tercapainya pembakuan Nama Rupabumi.
- m. Belum tercapainya penyelenggaraan Sosialisasi dan Desiminasi RANHAM SKPD Kota Tangerang Selatan.
- n. Belum tercapainya penyelenggaraan penyuluhan Hukum.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penyusunan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi serta estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan atau Dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun yang bersumber dari Dana Bagi Hasil ataupun Bantuan Provinsi, disamping juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Terlebih dengan masih tingginya angka kejadian COVID-19, dimana sejak awal tahun 2021 hingga triwulan pertama, hampir belum menunjukkan arah yang membaik karena ditemukannya jenis varian baru COVID-19. Wabah ini telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya sebagian besar aktivitas ekonomi di seluruh wilayah dan berakibat terjadinya resesi, maka menjadi keharusan bagi Pemerintah untuk melakukan penyesuaian dalam perencanaan pembangunan tahun 2021. Penyesuaian tersebut masih fokus pada pencegahan dan penanganan COVID-19, serta pemulihan dampak COVID-19.

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Pembatasan aktivitas sosial sebagai upaya antisipatif penyebaran COVID-19 tentu saja berimbas pada penurunan aktivitas ekonomi yang berujung pada penurunan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Tabel 3.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020

TW I		TW II		TW III		TW IV		LPE 2020
QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	QoQ	YoY	C to C
-2,41	2,97	- 4,19	- 5,32	5,05	- 3,49	-0,49	-2,19	-2,07

Sumber: RKPD Provinsi Banten 2022

Tabel diatas memperlihatkan bahwa meskipun Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti dengan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) baru dikeluarkan pada bulan April 2020 namun perekonomian nasional sudah mengalami dampak dari Pandemi Covid-19 mulai dari Triwulan I (Januari-Februari-Maret). Hal ini disebabkan karena diterapkannya kebijakan *Lockdown* secara ketat di beberapa negara tujuan ekspor komoditas atau pun barang yang dihasilkan dari perusahaan di Indonesia. Selain Tiongkok sebagai negara tempat berasalnya penyebaran virus Corona beberapa negara lain seperti Amerika Serikat, Jepang, Australia dan Korea Selatan menerapkan kebijakan Lockdown mulai periode triwulan I.

Selain berpengaruh pada ekspor komoditas, diterapkannya kebijakan *Lockdown* juga berpengaruh pada kurangnya pasokan bahan baku industri dalam negeri yang selama ini mengandalkan pada pasokan import. Karena kurangnya bahan baku inilah yang mengakibatkan banyak perusahaan di dalam negeri mengurangi kapasitas produksinya dan bahkan sebagian diantaranya menutup pabriknya. Dalam laporan Bank Dunia disebutkan Volume impor Indonesia menyusut sebesar 2,2 persen di Q1 tahun 2020, setelah turun sebesar 8,0 persen di Q4 tahun 2019 (Q1 tahun 2019: -7,5 persen). Perlambatan kontraksi impor ini terutama didorong oleh impor minyak dan gas yang lebih tinggi karena importer mengambil keuntungan dari jatuhnya harga minyak untuk meningkatkan persediaan. Selain itu, impor non migas mengalami kontraksi yang lebih kecil dari impor di Q4 tahun 2019, sebagian karena peningkatan pertumbuhan ekspor yang membutuhkan masukan bahan baku impor, yang mengimbangi laju impor bahan baku yang lebih lambat untuk konsumsi dalam negeri.

Kebijakan *Lockdown* yang diterapkan diberbagai Negara serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga mempengaruhi sector transportasi dan pariwisata karena adanya pembatasan penerbangan dari negara-negara asing, meningkatnya kehati-hatian para pelancong, dan penangguhan operasi dari banyak operator asing ke Indonesia. Kedatangan pengunjung manca negara turun 64,9 persen yoy pada bulan Maret dan 31,1 persen untuk triwulan tersebut.

Tabel 3.2. Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2021

TW I	TW II	TW III	TW IV	LPE 2021
-0,74	7,07	-	-	-

Sumber: BPS, 2021

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di Triwulan I-2021 masih mengalami kontraksi minus 0,74 persen (Tabel 3.2). Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mampu kembali ke zona positif, setelah mengalami kontraksi 4 kali berturut-turut sejak Triwulan II-2020. Namun pada Triwulan II-2021 melejit hingga 7,07 persen secara tahunan (*year on year/yoy*). Dengan demikian, Indonesia berhasil kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi, setelah beberapa triwulan terakhir berada dalam tekanan resesi akibat dampak pandemi Covid-19. Capaian ini merupakan pertumbuhan tertinggi sejak 17 tahun yang lalu.

Berdasarkan data BPS yang dirilis Tanggal 5 Agustus 2021, menilai salah satu strategi yang cukup berhasil mendongkrak pemulihan ekonomi berasal dari bantuan sosial. Bantuan ini mampu menjaga tingkat kemiskinan dan konsumsi rumah tangga masyarakat bawah. Kucuran bansos dari pemerintah pusat maupun daerah, mampu menekan tingkat kemiskinan supaya tidak melonjak terlalu tinggi meskipun tetap terjadi kenaikan.

Secara garis besar, pertumbuhan ekonomi di kuartal II-2021 ini membuat ekonomi Indonesia kembali ke angka positif. Tercatat sejak tahun 2020, Indonesia memasuki resesi karena pertumbuhan ekonomi minus pada 4 kuartal berturut-turut. Di kuartal I-2021, pertumbuhan ekonomi berada di angka -0,74 persen, masih lebih baik dibanding kuartal II-2020 yang mencatat kontraksi terdalam sebesar -5,32 persen.

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ekonomi masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan investasi. Porsi kedua komponen itu bahkan mencapai 84,93 persen. Konsumsi rumah tangga pada kuartal II -2021 ini tumbuh 5,93 persen yoy karena masyarakat mulai yakin untuk melakukan aktivitas konsumsi.

Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) pada kuartal II-2021 tercatat sebesar 104,42 poin, lebih baik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yaitu 82,14 poin. Indikasi lain juga terlihat dari penjualan eceran yang tumbuh sebesar 11,62 persen. Pertumbuhan ini terjadi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, sandang, suku cadang, aksesoris, bahan bakar kendaraan, dan barang lainnya.

Kepercayaan masyarakat untuk melakukan kembali konsumsi juga didorong dengan adanya vaksinasi dan pelaksanaan protokol kesehatan. Kedua hal itu diyakini membuat mobilitas masyarakat berangsur normal pada beberapa aktivitas, meski dengan pembatasan.

Secara spasial, pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Andil Pulau Jawa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah yang terbesar, yakni 57,92 persen. Wilayah Sumatera memiliki andil kedua terbesar setelah Pulau Jawa dengan share terhadap PDB sebesar 21,73 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan ekonomi di tiap wilayah, wilayah Maluku dan Papua mencatatkan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 8,75 persen.

Pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen pada kuartal II 2021 menandakan strategi yang disusun cukup berhasil. Bahkan realisasi ini mendekati prediksi Kementerian Keuangan sebesar 7,1 persen. Capaian ini menggambarkan arah dan strategi pemulihan ekonomi sudah benar dan mulai menunjukkan hasil.

Dalam hal proyeksi untuk Tahun 2021, Bank Dunia menyebutkan bahwa dengan berbagai langkah antisipatif Pemerintah serta kondisi Global yang membaik seiring dengan asumsi efektivitas vaksinasi yang berjalan sesuai dengan yang diharapkan, proyeksi pertumbuhan Indonesia diperkirakan akan pulih selama dua tahun kedepan, dengan asumsi bahwa ekonomi akan dibuka kembali secara bertahap dan stabil. Konsumsi swasta diperkirakan pulih lebih cepat, diikuti oleh investasi sector swasta. PDB riil diproyeksikan akan tumbuh sebesar 4,8 persen pada tahun 2021 yang ditunjang oleh pemulihan konsumsi swasta.

Tabel 3.3. Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Lembaga	2020	2021
Bank Dunia	0,0	4,8
IMF	-1,5	6,1

Sumber: RKPDP Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa, berdasarkan asumsi yang terjadi dalam lingkup global, IMF memberikan proyeksi yang lebih rendah terhadap pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Berdasarkan proyeksi IMF yang dikeluarkan dalam laporan di Bulan Oktober, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan masih negative atau mengalami kontraksi 1,5% dan berdasarkan baseline tersebut IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6,1% ditahun 2021.

3.1.2. Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten

Pandemi COVID-19 yang terjadi secara global memberikan dampak langsung bagi perekonomian Banten terutama sektor transportasi dan industri pengolahan. Rilis BPS Provinsi Banten terkait pertumbuhan Ekonomi Banten triwulan I-2020 memberikan gambaran bahwa kondisi perekonomian wilayah ini sangat dipengaruhi oleh keadaan global. Meski penerapan PSBB di provinsi Banten baru diterapkan pada pertengahan April 2020 namun karena kebijakan pengetatan di beberapa negara di dunia sudah dilakukan sejak bulan Februari, dampak terhadap perekonomian di Triwulan I sudah mulai terlihat. Ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh 3,09 persen (y-on-y), melambat dibanding capaian triwulan I-2019 yang sebesar 5,45 persen. Karena itu berdasarkan perkembangan kondisi yang ada, target LPE provinsi Banten tahun 2020 sebesar 5,80 sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2017-2022 diperkirakan tidak akan tercapai.

Rilis Badan Pusat Statistik Provinsi Banten menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan IV-2019 (q-to-q) diwarnai faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh sebesar 2,02 persen. Artinya angka pertumbuhan tersebut lebih disebabkan karena pada bulan Februari Maret beberapa komoditas pertanian memasuki masa panen. Pertumbuhan positif juga terjadi pada Lapangan Usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 1,78 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 1,68 persen; Informasi dan Komunikasi sebesar 1,16 persen; Jasa Perusahaan sebesar 1,15 persen; dan beberapa lapangan usaha lainnya. Namun, pertumbuhan lapangan usaha tersebut di atas tidak cukup menahan terjadinya penurunan laju pertumbuhan ekonomi Banten di triwulan I-2020 (Q to Q) sebesar 3,01 persen. Hal ini disebabkan oleh kontraksi pertumbuhan pada beberapa lapangan usaha yang memiliki kontribusi besar seperti: Industri Pengolahan (turun 2,3%); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan (turun 14,52%); Jasa Pendidikan (3,14); Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib serta Pengadaan Listrik dan Gas.

Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I-2020 terhadap triwulan I-2019 (y-on-y) terjadi hampir pada semua komponen pengeluaran, kecuali komponen Total Net Ekspor. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar 4,19 persen; diikuti pengeluaran komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 3,36 persen; konsumsi Lembaga Non Profit (LNPR) sebesar 3,14 persen; dan komponen Konsumsi Pemerintah sebesar 0,47 persen. Sedangkan komponen Total Net Ekspor berkontraksi hingga sebesar 5,01 persen. Berdasarkan penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Banten pada triwulan I-2020 (y-on-y), Konsumsi Rumah Tangga masih sebagai sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,40 persen, diikuti komponen PMTB sebesar 1,05 persen; serta Konsumsi Lembaga Non Profit dan Konsumsi Pemerintah yang memiliki andil sama sebesar 0,02 persen.

Berbeda dengan kondisi Triwulan I tahun 2020, rilis BPS Provinsi Banten terkait perekonomian Provinsi Banten menunjukkan pengaruh besar pandemi COVID-19 di Provinsi ini sangat terasa signifikan. Selain laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, laju pertumbuhan ekonomi provinsi Banten dibawah capaian laju ekonomi nasional.

Tabel 3.4. Realisasi LPE Triwulanan dan Tahunan Nasional dan Banten

Tahun	TW I		TW II		TW III		TW IV		Banten	Nasional
	Banten	Nasional	Banten	Nasional	Banten	Nasional	Banten	Nasional		
2015	5,69	4,71	5,26	4,67	5,18	4,73	4,87	5,04	5,37	4,79
2016	5,15	4,92	5,16	5,18	5,35	5,02	5,53	4,94	5,26	5,02
2017	5,9	5,01	5,52	5,01	5,62	5,06	5,75	5,19	5,71	5,07
2018	5,95	5,06	5,59	5,27	5,89	5,17	5,98	5,18	5,81	5,17
2019	5,42	5,07	5,35	5,05	5,41	5,02	5,9	4,97	5,53	5,02
2020	3,09	2,97	-7,4	-5,32	-5,77	-3,49	-3,93	-2,19	-3,38	-2,07

Sumber: RKPD Provinsi Banten, 2021

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa dalam jangka waktu lima tahun terakhir sebelum kejadian Pandemi COVID-19, LPE tahunan provinsi Banten selalu berada diatas nilai LPE nasional atau dengan kata lain perkembangan perekonomian di wilayah provinsi Banten selalu lebih baik dibandingkan dengan kondisi perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor pendorong provinsi Banten menjadi magnet bagi para investor menanamkan investasi di wilayah ini (Pembahasan lebih mendetail tentang investasi akan disajikan pada bagian berikutnya). Selain data tahunan yang memperlihatkan kondisi laju pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari nasional, data LPE triwulanan juga menunjukkan hal yang serupa. Selama lima tahun terakhir, hanya data LPE triwulan IV tahun 2015 dan Triwulan II tahun 2016 yang menunjukkan capaian di bawah nasional. Meski demikian, capaian LPE provinsi Banten di kedua triwulan tersebut tidak tepaut jauh dimana LPE Triwulan IV tahun 2015 provinsi Banten sebesar 4,87 (nasional 5,07) dan Triwulan II tahun 2016 LPE Banten 5,16 sedangkan nasional 5,18.

Penurunan drastis terkait kondisi perekonomian tahun 2020 baik global, nasional termasuk provinsi Banten terjadi pda Triwulan kedua. Sebagaimana disajikan pada tabel diatas, LPE provinsi Banten mengalami kontraksi sampai 7,4% dan berada di bawah nasional yang mengalami kontraksi 5,3%. Mulai diterapkannya PSBB dengan pada April membawa dampak berkurangnya aktifitas masyarakat yang menggunakan jasa transportasi serta adanya pembatasan aktivitas di sektor industri. Berdasarkan sumber pertumbuhan ekonomi Banten triwulan II-2020 (*y-on-y*), sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 0,59 persen; diikuti Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 0,21 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 0,08 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 0,04 persen; serta Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang. Tetapi karena sebagian besar lapangan usaha lainnya tumbuh negatif sehingga ekonomi Banten terkontraksi 7,40 persen. Penyumbang negatif terbesar adalah Industri Pengolahan sebesar -3,09 persen; Transportasi dan Pergudangan sebesar -2,98 persen, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar -0,80 persen dan Konstruksi sebesar -0,57 persen.

Tabel 3.5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Banten dan Nasional Tahun 2021

	TW I	TW II	TW III	TW IV	LPE 2021
Nasional	-0,74	7,07	-	-	-
Banten	-0,39	8,95	-	-	-

Sumber: BPS, 2021

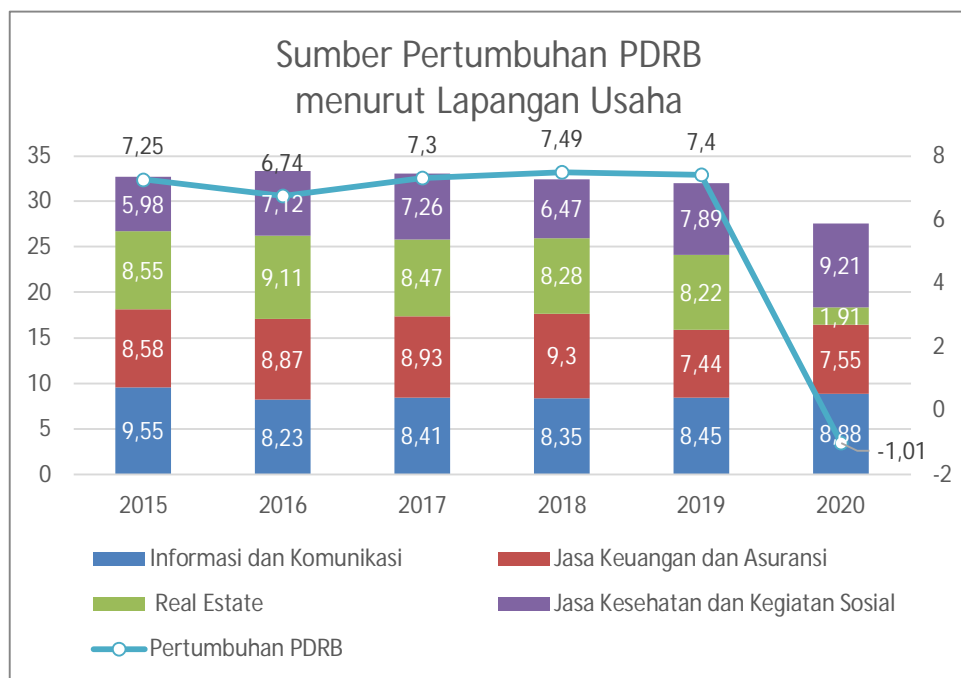
Berdasarkan laporan Bank Indonesia diperoleh gambaran (Tabel 3.5) bahwa, perekonomian Banten pada Triwulan I 2021 mengalami perbaikan dibandingkan triwulan sebelumnya. Secara quarter to quarter, terdapat pertumbuhan sebesar 0,78 persen walaupun secara *year on year* masih terkoreksi sebesar -0,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada triwulan I 2021 secara umum didorong oleh peningkatan kinerja seluruh komponen dari sisi Pengeluaran serta masih berlanjutnya perbaikan hampir seluruh sektor utama dari sisi Lapangan Usaha. Kondisi tersebut didorong dimulainya perbaikan perekonomian global dan Nasional serta implementasi vaksinasi bagi masyarakat yang menjadi *game changer*. Dibandingkan regional Jawa maupun Nasional, pertumbuhan ekonomi Banten triwulan I 2021 tercatat lebih tinggi. Adapun perekonomian di regional Jawa maupun nasional masing-masing berkontraksi -0,83 persen (yoy) dan -0,74 persen (yoy)

3.1.3. Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan

Prospek perekonomian Kota Tangerang Selatan tahun 2021 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional yang diuraikan sebagai berikut.

a. Sumber Pertumbuhan PDRB menurut Lapangan Usaha

Penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang Selatan triwulan IV tahun 2020 (y-o-y), Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial memiliki sumber pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 9,21 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 8,88 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 7,55 persen dan Real Estate sebesar 1,91. Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi tumbuh tinggi seiring meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam penerapan *Work from Home* (WFH) dan *School from Home* (SFH) atau sistem Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) membuat lapangan usaha informasi dan komunikasi tumbuh ekspansif. Lapangan Usaha terkait penanganan COVID-19 dan *new normal*, seperti Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, serta LU Real Estat, juga tumbuh positif.



Sumber: BPS Kota Tangerang Selatan, 2021

b. Pertumbuhan Ekonomi dan Proyeksi

Perkiraan membaiknya perekonomian dunia dan domestik serta didukung penyediaan vaksin COVID-19 hingga meningkatnya pembangunan infrastruktur di Tangerang Selatan pada tahun 2021, ekonomi Tangerang Selatan diperkirakan akan tumbuh positif. Tabel 3.6 menunjukkan proyeksi pertumbuhan Tangerang Selatan bahwa proyeksi untuk tahun 2021 di angka 3,01 - 4,00 persen, atau sedikit lebih tinggi dari proyeksi sebelumnya.

Apabila dilihat dari sisi konsumsi, proyeksi LPE 3,01 - 4,00 persen dapat terjadi ketika konsumsi rumah tangga selaku sektor yang mendominasi perekonomian Tangerang Selatan mengalami peningkatan. Asumsi ini didasarkan pada tren perbaikan konsumsi masyarakat yang mulai terjadi pada triwulan II tahun 2021. Dari sisi produksi, LPE 3,01 - 4,00 persen dimungkinkan dengan kembali normalnya kondisi perekonomian Pasca Pandemi COVID-19 diharapkan dapat memicu bangkitnya beberapa sektor seperti Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Industri Pengolahan yang pada tahun 2020 lalu mengalami kontraksi. Dengan adanya kontraksi diharapkan sektor tersebut dapat *rebound* di tahun 2021.

Beberapa capaian pertumbuhan diatas masih akan bergantung dari seberapa jauh dampak PPKM Darurat yang sedang diberlakukan hingga saat ini (Juli 2021) dan juga penanganan COVID-19 ke depannya. Diharapkan, PPKM Darurat ini bisa efektif dalam menekan laju angka penularan COVID-19 sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan cenderung lebih rendah dari 3,01 persen.

Memperhatikan kondisi yang terjadi, proyeksi pertumbuhan ekonomi dalam dokumen perencanaan sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini maka proyeksi LPE Tangerang Selatan diproyeksikan sebesar 3,01-4,00 sebagaimana proyeksi dalam Ranwal RPJMD 2021-2026. Angka proyeksi LPE tersebut lebih rendah dibandingkan dengan target RPJMD 2016-2021.

Hal yang mendasar dilakukannya perubahan proyeksi LPE adalah sejalan dengan yang disampaikan dalam Perpres Nomor 122 Tahun 2020 tentang Pemutakhiran Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, bahwa risiko terbesar yang dihadapi dalam upaya pemulihan ekonomi pada tahun 2021 adalah ketidakpastian penyelesaian dan dampak pandemi COVID-19, baik di tingkat global maupun domestik. Proses pemulihan ekonomi global dan domestik yang lambat ini dapat berdampak pada kinerja perekonomian Tangerang Selatan terutama dari sisi penerimaan.

Aspek perubahan proyeksi LPE lainnya adalah berkaitan dengan perubahan pola perilaku dan struktur perekonomian pascapandemi COVID-19. Adapun beberapa perubahan yang diidentifikasi antara lain (1) perubahan bentuk rantai pasok, (2) perubahan perspektif investor dan sektor prioritas investasi, (3) perubahan tata kerja perusahaan dan pola perilaku masyarakat, dan (4) percepatan transformasi investasi ke padat modal dan teknologi.

Upaya pemulihan ekonomi juga akan dihadapkan kondisi dunia usaha yang belum kembali normal pascapandemi COVID-19. Dunia usaha akan dihadapkan pada tekanan finansial dan membutuhkan modal investasi yang besar untuk dapat bangkit kembali. Sementara itu sisi permintaan akan naik secara bertahap yang akan berdampak pada penerimaan dunia usaha. Pelaku usaha juga akan kesulitan untuk mengembalikan posisi tenaga kerja setara pada posisi sebelum COVID-19 terjadi. Untuk itu, upaya pemulihan ekonomi harus diarahkan kepada

antisipasi berbagai kondisi dan potensi perubahan yang ada pascapandemi COVID-19. Upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 3,01-4,00 persen pada tahun 2021 (Tabel 3,6).

Tabel 3.6. Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 (dalam Persen)

Uraian	2020 (Realisasi)	2021 (Murni)	2021 (Perubahan)
Dunia	-3,3		
Indonesia	-2,07		
- Bank Dunia		4,8	4,4
- Bappenas		5	4,8
- Kemenkeu		4,5-5,3	3,7-4,5
Banten	-3,38		
- BI Banten			3-4
- RKPD Banten		5,5	2,5 – 3,5
Tangerang Selatan	-1,01	6 -7,5*	3,01-4,00**

*) RPJMD Kota Tangerang Selatan 2016-2021

***) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

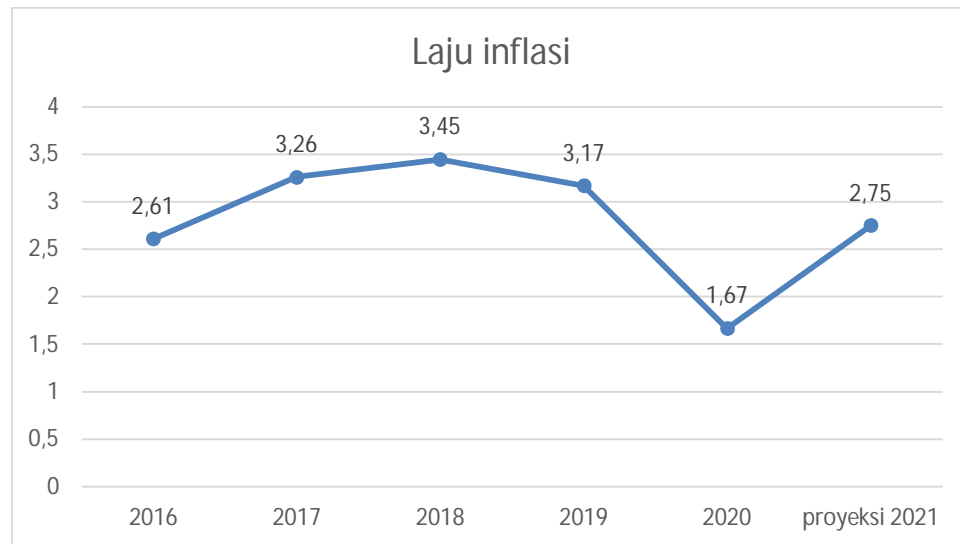
Stabilitas makroekonomi akan tetap dijaga untuk mendukung proses pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19. Tingkat inflasi diperkirakan dapat dikendalikan pada tingkat sasaran 2,75 persen. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 2,20 persen dan 2,75 persen. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 81,47 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun langkah dan upaya Pemerintah Kota Tangerang Selatan agar stabilitas ekonomi tetap terjaga, adalah sebagai berikut:

- a. Upaya pencegahan dan penanganan kesehatan masyarakat pada masa Pandemi COVID-19 masih menjadi prioritas utama, mengingat perekonomian kota Tangerang Selatan bertumpu kepada sektor tersier/ sektor perdagangan dan jasa.
- b. Upaya mempertahankan perekonomian daerah:
 - 1) Selalu menerapkan regulasi pembatasan aktifitas masyarakat sebagaimana keputusan pemerintah dan forum komunikasi pimpinan daerah.
 - 2) Menambah cadangan pangan pemerintah daerah.
 - 3) Menambah nilai tambah pendapatan masyarakat.
 - 4) Memberikan kemudahan investasi dan layanan investasi diberbagai sektor.
- c. Meningkatkan koordinasi antar Perangkat Daerah, meningkatkan kerjasama antar daerah, mengembangkan kemitraan UMKM dan sektor informal melalui kerjasama kemitraan dan program tanggung jawab sosial perusahaan (program CSR) dari dunia usaha untuk mengembangkan UMKM, dan
- d. Mewujudkan ketertiban hukum dan ketenteraman dalam masyarakat guna menjamin kegiatan usaha dalam masyarakat dapat terselenggara dengan baik.

c. Kondisi dan Proyeksi Inflasi

Hingga akhir tahun 2020, tingkat Inflasi Kota Tangerang Selatan sebesar 1,67 persen. Hal yang sama akan terjadi di tahun berikutnya dimana Inflasi di Kota Tangerang Selatan belum akan kembali pada posisi semula sebelum terjadinya COVID-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Tangerang Selatan akan sangat berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Hal ini akan tetap mendorong kenaikan yang tidak secara drastis pada tahun 2021 yang akan diperkirakan pada tingkat 2,75 persen.



Gambar 3.1. Proyeksi Inflasi Kota Tangerang Selatan 2021

Sumber: Ranwal RPJMD Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 3.7. Proyeksi Inflasi Nasional, Banten dan Kota Tangerang Selatan

Uraian	2020	2021 (Murni)	2021 (Perubahan)
Nasional	n/a	3	n/a
Banten	2.85-3.2*	3	2.85-3.8*
Tangerang Selatan	1,67	3 - 6	2,75**

*) Proyeksi RKPD 2022 Provinsi Banten

***) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

d. Kondisi dan Proyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT diperkirakan dapat menurun seiring dengan kinerja pemulihan perekonomian, meskipun belum bisa kembali ke tingkat sebelumnya yaitu berada pada kisaran 8,27 persen. Namun, hal tersebut akan sangat bergantung pada keberhasilan upaya pemulihan ekonomi, penumbuhan investasi padat pekerja, penguatan konsumsi, serta pengembangan UMKM. Penciptaan kesempatan kerja tersebut dibarengi dengan upaya strategis untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Berikut ini adalah proyeksi Pengangguran Terbuka Kota Tangerang Selatan.



Gambar 3.2. Proyeksi Angka Pengangguran Terbuka (%) Kota Tangerang Selatan

Sumber: Ranwal RPJMD Kota Tangerang Selatan, 2021

Data Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan yang rilis pada bulan November 2020 disebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tangerang Selatan adalah 8,48 persen di bulan Agustus.

Tabel 3.8. Perkiraan TPT Kota Tangerang Selatan Tahun 2022 (dalam persen)

Uraian	2020	2021 (Murni)	2021 (Perubahan)
Nasional	7,07	7,5 – 8,2	7,7 – 9,1*
Banten	10,64	8,03	9,2 – 9,7**
Tangerang Selatan	6,54-8,48	6,17 - 11,95	8,27***

*) PMDN 17/2021

***) Proyeksi RKPDP 2022 Provinsi Banten

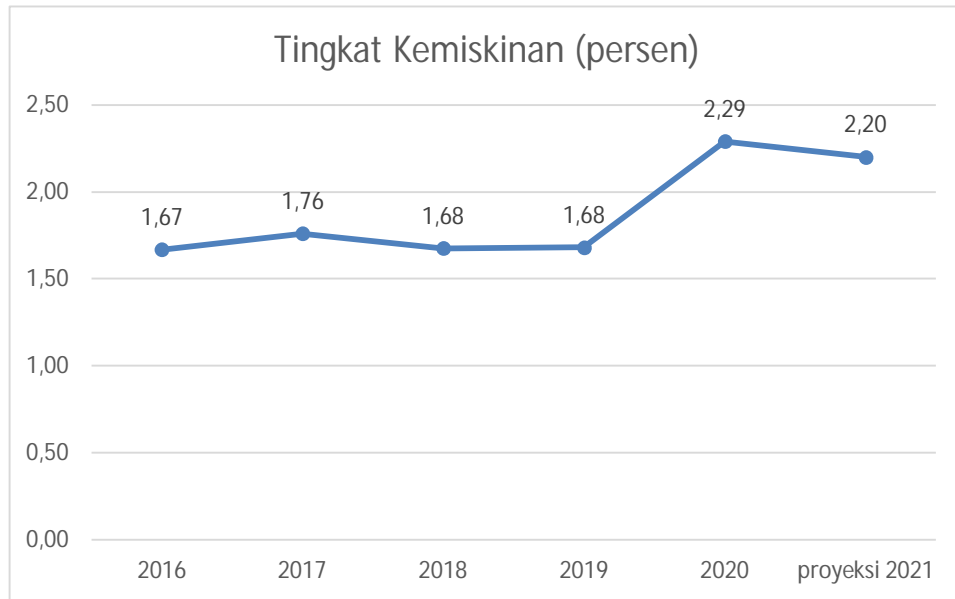
****) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

e. Kondisi dan Proyeksi Kemiskinan

Dengan kondisi perekonomian dan inflasi yang berangsur membaik, tingkat kemiskinan diperkirakan berada di kisaran 2,20 persen. Perbaikan kondisi makro juga memberikan dampak yang luas sehingga lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan dapat kembali tercipta, iklim investasi terjaga, dan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.

Upaya untuk mempercepat penurunan kemiskinan tersebut adalah pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan, dan program bantuan sosial. Penurunan tingkat kemiskinan dilakukan melalui dua strategi, yaitu menurunkan beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan.

Jika dalam kondisi baseline tidak terjadi pandemi, Tangerang Selatan seharusnya mampu menurunkan angka kemiskinan dari 1.68 persen di tahun 2019 menjadi 1.53 persen di tahun 2020. Namun, jika dibuatkan dengan skenario mengalami perekonomian yang berat maka angka kemiskinan di Kota Tangerang Selatan diprediksi sebesar 2,20 persen pada tahun 2021. Berikut ini adalah hasil proyeksinya.



Gambar 3.3. Proyeksi Angka Tingkat Kemiskinan Kota Tangerang Selatan

Sumber: Ranwal RPJMD Kota Tangerang Selatan, 2021

Proyeksi ini menunjukkan bahwa apabila angka kemiskinan (dalam persen) berkurang maka pemerintah kota Tangerang Selatan lebih mudah untuk menjaga masyarakat yang berada di atas garis kemiskinan tidak masuk menjadi kategori miskin dan tingkat kedalaman dan keparahan masyarakat miskin tidak bertambah.

Tingkat kemiskinan di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2020 tercatat meningkat menjadi 2,29 persen dan pasca program vaksin pada tahun 2021 diharapkan akan terjadi perbaikan perekonomian yang berdampak positif kepada tingkat kemiskinan.

Tabel 3.9. Proyeksi Persentase Kemiskinan Nasional, Banten dan Kota Tangerang

Uraian	2020	2021 (Murni)	2021 (Perubahan)
Nasional	9,78	8,50 - 9,00	9,2 - 9,7*
Banten	5,92	5,06	5,06**
Tangerang Selatan	2,29	1,63 - 1,90	2,20***

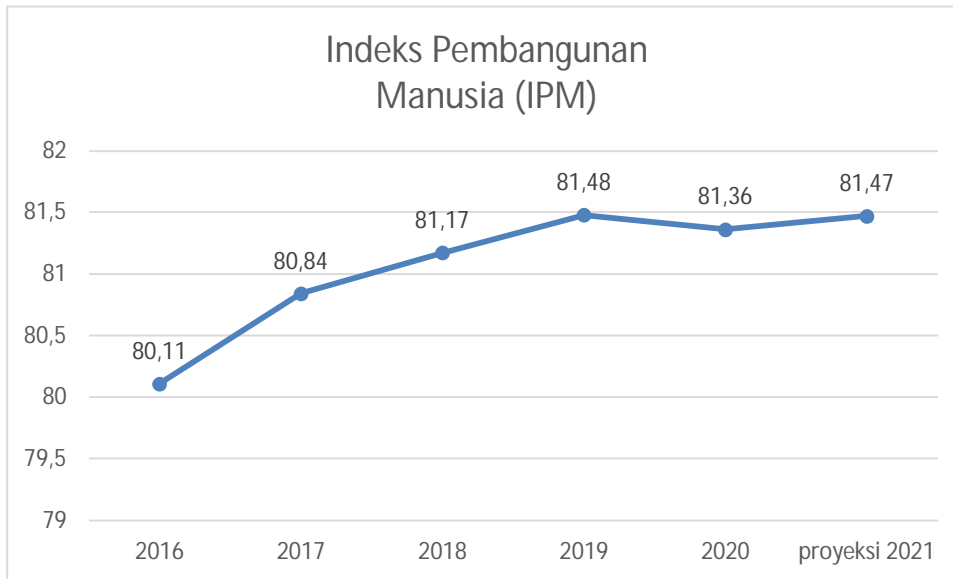
*) PMDN 17/2021

**) Proyeksi RKPD 2022 Provinsi Banten

***) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

f. Kondisi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia Kota Tangerang Selatan ditargetkan mencapai 81,47 poin pada Tahun 2021. Upaya untuk terus meningkatkan IPM dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang difokuskan pada percepatan penurunan angka kematian bayi dan stunting, dan penguatan upaya promotif dan preventif, penguatan ketahanan kesehatan, dan penguatan kapasitas sistem kesehatan, peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran dan percepatan pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun. Begitupula dengan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat melalui program-program bantuan sosial dengan tepat sasaran dan tepat waktu serta pengembangan UMKM.



Gambar 3.4. Proyeksi IPM Kota Tangerang Selatan

Sumber: Ranwal RPJMD Kota Tangerang Selatan, 2021

Tabel 3.10. Proyeksi Persentase IPM Nasional, Banten dan Kota Tangerang

Uraian	2020	2021 (Murni)	2021 (Perubahan)
Nasional	9,78	n.a	9,2 -9,7*
Banten	5,92	n.a	5,06**
Tangerang Selatan	2,29	79,51-79,81	2,20***

*) PMDN 17/2021

**) Proyeksi RKPD 2022 Provinsi Banten

***) Rancangan Awal RPJMD Kota Tangerang Selatan 2021-2026

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Efektivitas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 sebagai pelaksanaan agenda RPJMD tahun 2016-2021, tidak terlepas dari kapasitas anggaran yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dengan demikian kebutuhan belanja pembangunan daerah akan selalu mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah sebagai salah satu penopang strategis dalam implementasi Perubahan RKPD.

Hasil analisa terhadap tantangan pandemi COVID-19 yang sedang terjadi saat ini dan prospek perekonomian yang sedang sulit diprediksi maka diperlukan usaha yang maksimal dalam hal intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Dalam struktur APBD, pendapatan daerah merupakan pendukung penyelenggaraan pemerintah daerah serta pelayanan publik. Komposisi kontribusi penerimaan pendapatan daerah terhadap pembangunan masih bergantung pada sumber dana yang berasal dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Kondisi ini merupakan tantangan bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam usaha meningkatkan pendapatan yang bersumber dana dari PAD.

Data yang disajikan dalam struktur perubahan APBD merupakan perkiraan (indikatif) yang diambil dari hasil riil inputan rinci SIPD sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 3.11. Rencana Perubahan APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Kode	Uraian	APBD 2021	Pergeseran TAHAP 3	Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.513.969.455.500	1.513.969.455.500	1.509.208.596.353	-4.760.859.147	99,69
4.1.0 1	Pajak Daerah	1.307.579.000.000	1.307.579.000.000	1.317.570.820.355	9.991.820.355	100,76
4.1.0 2	Retribusi Daerah	45.809.060.000	45.809.060.000	46.168.883.498	359.823.498	100,79
4.1.0 4	Lain-lain PAD yang Sah	160.581.395.500	160.581.395.500	145.468.892.500	15.112.503.000	90,59
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.473.771.462.650	1.681.699.601.021	1.852.463.465.653	170.763.864.632	110,15
4.2.0 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.097.515.000	988.841.932.900	988.841.932.900	-	100,00
4.2.0 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	495.673.947.650	692.857.668.121	863.621.532.753	170.763.864.632	124,65
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.822.900.000	103.099.230.000	103.099.230.000	-	100,00
4.3.0 3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	96.822.900.000	103.099.230.000	103.099.230.000	-	100,00
	Jumlah Pendapatan	3.084.563.818.150	3.298.768.286.521	3.464.771.292.006	166.003.005.485	105,03
5	BELANJA					
5,1	BELANJA OPERASI	2.506.524.647.158	2.526.073.456.792	3.459.153.717.013	115.448.382.820	103,45
5,2	BELANJA MODAL	721.700.613.574	817.631.877.401			
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.913.526.410	93.922.565.320	94.371.738.604	449.173.284	100,48
5.3.0 1	Belanja Tidak Terduga	16.913.526.410	93.922.565.320	94.371.738.604	449.173.284	100,48
5,4	BELANJA TRANSFER	-	21.715.356.000	21.715.356.000	-	100,00
5.4.0 2	Belanja Bantuan Keuangan	-	21.715.356.000	21.715.356.000	-	100,00
	Jumlah Belanja	3.245.138.787.142	3.459.343.255.513	3.575.240.811.617	115.897.556.104	103,35
	Total Surplus/(Defisit)	-160.574.968.992	-160.574.968.992	-110.469.519.611	50.105.449.381	68,80
6	PEMBIAYAAN					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	-50.105.449.381	68,80
6.1.0 1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	-50.105.449.381	68,80

Kode	Uraian	APBD 2021	Pergeseran TAHAP 3	Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	%
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	- 50.105.449.381	68,80
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-		
	Pembiayaan Netto	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	- 50.105.449.381	68,80
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	
	TOTAL APBD	3.245.138.787.142	3.423.343.255.513	3.575.240.811.617	151.897.556.104	104,44

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional di tengah pandemi COVID-19 serta memperhatikan realisasi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021 Triwulan II, terutama dari sisi pendapatan dan penerimaan pembiayaan, maka kebijakan pendapatan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah sampai dengan Semester I Tahun 2021 terjadi asumsi kenaikan pada pendapatan Retribusi Daerah sebesar 0,79 persen atau bertambah sebesar Rp359.823.498, sedangkan untuk Lain-lain PAD yang Sah terkoreksi sebesar 9,41% persen atau berkurang sebesar Rp15.112.503.000,- dari target sebelumnya.
2. Penyesuaian pendapatan Transfer terjadi perubahan kenaikan dari target semula sebesar 10,15 persen atau bertambah sebesar Rp170.763.864.632,-. Pendapatan Transfer tersebut diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp988.841.932.900,- dan Transfer Antar Daerah sebesar Rp863.621.532.753,-.

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD pada tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.513.969.455.500 sedangkan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.509.208.596.353. Sehingga ada penurunan dari PAD yaitu sebesar Rp4.760.859.147,- atau 0,31 persen dari target semula. Perubahan tersebut tentu saja mempertimbangkan kondisi aktual kinerja ekonomi daerah di tengah pandemi COVID-19 serta mempertimbangkan realisasi APBD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021 sampai dengan Triwulan II, dimana jumlah perolehan PAD tersebut didapatkan dari 3 (tiga) sumber utamanya, yaitu :

- a. Pajak Daerah diproyeksi akan mengalami perubahan kenaikan sebesar 0,76 persen atau bertambah sebesar Rp9.991.820.355,- dari target semula, sehingga total pada perubahan RKPD ditargetkan sebesar Rp 1.317.570.820.355,-.
- b. Retribusi Daerah yang ditargetkan sebesar Rp45.809.060.000,- pada perubahan RKPD diproyeksikan naik sebesar 0,79 persen dengan total sebesar Rp46.168.883.498.

- c. Lain-lain PAD Yang Sah yang ditargetkan sebesar Rp160.581.395.500 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp 145.468.892.500,-. Sehingga ada penurunan dari sektor Lain-lain PAD Yang Sah sebesar Rp15.112.503.000 atau 9,41 persen dari target semula.

B. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer pada Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.681.699.601.021 dan pada Perubahan RKPD Tahun 2021 ditargetkan sebesar Rp1.852.463.465.653,00 ada perubahan kenaikan dari target semula sebesar Rp170.763.864.632 atau 10,15 persen. Pendapatan Transfer tersebut diperoleh dari :

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang ditargetkan sebesar Rp988.841.932.900 pada Perubahan RKPD Tahun 2021 tidak mengalami perubahan.
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang ditargetkan sebesar Rp692.857.668.121 pada Perubahan RKPD Tahun 2021 mengalami perubahan sebesar Rp863.621.532.753,00 yang didapat diantaranya dari pelampauan bagi hasil pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan.

C. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah tidak mengalami perubahan yaitu masih sama dengan target semula Rp103.099.230.000,-

Adapun perubahan target pendapatan daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 3.12. Perubahan Target Pendapatan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Kode	Uraian	APBD 2021	Pergeseran TAHAP 3	Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	PERSEN
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.513.969.455.500	1.513.969.455.500	1.509.208.596.353	-4.760.859.147	99,69
4.1.01	Pajak Daerah	1.307.579.000.000	1.307.579.000.000	1.317.570.820.355	9.991.820.355	100,76
4.1.02	Retribusi Daerah	45.809.060.000	45.809.060.000	46.168.883.498	359.823.498	100,79
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	160.581.395.500	160.581.395.500	145.468.892.500	- 15.112.503.000	90,59
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.473.771.462.650	1.681.699.601.021	1.852.463.465.653	170.763.864.632	110,15
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.097.515.000	988.841.932.900	988.841.932.900	-	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	495.673.947.650	692.857.668.121	863.621.532.753	170.763.864.632	124,65
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	96.822.900.000	103.099.230.000	103.099.230.000	-	100,00

Kode	Uraian	APBD 2021	Pergeseran TAHAP 3	Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	PERSEN
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	96.822.900.000	103.099.230.000	103.099.230.000	-	100,00
	Jumlah Pendapatan	3.084.563.818.150	3.298.768.286.521	3.464.771.292.006	166.003.005.485	105,03

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja pada Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 diarahkan pada:

1. Rasionalisasi dan realokasi diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja yang belum teranggarkan termasuk penanggulangan COVID-19
2. Rasionalisasi dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan kembali anggaran sisa kontrak;
 - b. Menyesuaikan harga satuan dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan termasuk harga satuan insentif pungutan.
 - c. Mengurangi volume pekerjaan dan belanja pendukung pekerjaan tanpa mengurangi target capaian.
 - d. Melaksanakan kegiatan yang bersifat pertemuan/ rapat/ sosialisasi/ seminar dengan mekanisme daring (online).
 - e. Membatasi pelaksanaan perjalanan dinas baik dalam daerah dan luar daerah.
 - f. Melakukan optimasi terhadap pekerjaan dalam kelompok belanja modal yang telah dilakukan perikatan tanpa mengurangi/ menurunkan capaian target output dan outcome pekerjaan.
 - g. Menunda pekerjaan dalam kelompok belanja modal yang sifatnya tidak mendesak dan belum dilakukan perikatan.
 - h. Membatasi kegiatan yang bersifat seremonial dan perayaan hari besar yang tidak terencana.
 - i. Menunda semua pekerjaan dari setiap sub kegiatan yang tidak memiliki daya ungkit yang baik terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah ataupun daerah
3. Realokasi diarahkan untuk:
 - a. Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan perundangundangan.
 - b. Pemenuhan Tambahan Penghasilan PNS sampai bulan Desember.
 - c. Pemenuhan Honorarium non PNS sebanyak 12 bulan dan Tunjangan Hari Raya sebanyak 1 bulan honor.
 - d. Pemenuhan gaji, tunjangan dan TPP sebagaimana angka 3 huruf a dan b mempedomani perangkaan yang diarahkan TAPD.
 - e. Pemenuhan belanja yang bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda yang pelaksanaannya dilaksanakan selektif, efektif dan efisien seperti:

- 1) Pembayaran rekening listrik, air dan internet pada setiap Perangkat Daerah.
 - 2) Penanganan sampah pada Dinas Lingkungan Hidup,
 - 3) Pemeliharaan PJU pada Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan,
 - 4) Pemeliharaan Jalan dan Saluran/ Drainase Kota pada Dinas Pekerjaan Umum,
 - 5) Penanggulangan COVID-19 pada Dinas Kesehatan, Dinas Perkimta, Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kecamatan
 - 6) Penambahan cakupan penerima Jaminan Kesehatan Nasional pada Dinas Kesehatan.
 - 7) Pemenuhan ketersediaan obat, makanan dan BMHP lainnya pada Dinas Kesehatan.
 - 8) Pemenuhan cadangan Pangan bertahap pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.
 - 9) Pemenuhan alokasi bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan pada Dinas Sosial
- f. Pemenuhan Insentif Pelayanan Masyarakat sampai bulan Desember.
- g. Penambahan alokasi anggaran Belanja Tidak Terduga.

A. Belanja Mandatori

Belanja mandatori *atau Mandatory spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh Undang-Undang. Tujuan mandatory spending ini untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Selain itu, mandatory spending merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjalankan perintah Undang-undang.

Pertama, alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD. Alokasi anggaran ini dianggarkan sebesar Rp. 747,180 miliar atau 20.90 persen sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4).

Kedua, alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 20,51% atau setara dengan Rp733,425 miliar yang mana ketentuannya sesuai dengan ketentuan UU Nomor 36 tahun 2009.

Adapun belanja mandatori lainnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13. *Mandatoty Spending Kota Tangerang Selatan TA 2021*

Fungsi/ Urusan/ Belanja	Perangkat Daerah	Indikatif		Keterangan
		Rp.	%	
Fungsi Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	647.717.887.051	18.12	
	Dinas Pemuda dan Olahraga	30.627.516.086	0.86	
	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	10.784.455.465	0.30	Urusan Perpustakaan
	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	58.050.797.510	1.62	Belanja Bangunan Pendidikan
Urusan Kesehatan	Dinas Kesehatan	620.741.158.553	17.36	Selain Gaji, Tunjangan dan TPP
	Dinas PMPPAKB	21.656.933.046	0.61	
	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	91.027.002.403	2,55	Belanja Bangunan Kesehatan
Belanja Infrastruktur	Dinas Pekerjaan Umum	354.010.345.018	9.9	
	Dinas Bangunan dan Penataan Ruang	370.628.638.117	10.37	Selain Belanja Bangunan Pendidikan dan Kesehatan
	Dinas Perkim dan Pertanahan	354.010.345.018	4.06	
	Dinas Lingkungan Hidup	192.411.112.435	5.38	
	Dinas Perhubungan	29.750.709.833	0.83	

Fungsi/ Urusan/ Belanja	Perangkat Daerah	Indikatif		Keterangan
		Rp.	%	
Belanja Diklat	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	21.708.258.550	0.36	
Fungsi Pengawasan	Inspektorat	27.182.089.809	0.61	
Belanja Tidak Terduga	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	94.317.738.604	2.64	

B. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Arahannya untuk efisiensi dan efektifitas belanja operasi antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kegiatan yang bersifat pertemuan/ rapat/ sosialisasi/ seminar dengan mekanisme daring (*online*).
2. Pemenuhan gaji dan tunjangan PNS, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan anggota DPRD sesuai ketentuan perundangundangan.
3. Pemenuhan Tambahan Penghasilan PNS sampai bulan Desember.
4. Pemenuhan Honorarium non PNS sebanyak 12 bulan dan Tunjangan Hari Raya sebanyak 1 bulan honor
5. Pemenuhan belanja yang bersifat mendesak dan tidak bisa ditunda yang pelaksanaannya dilaksanakan selektif, efektif dan efisien.
6. Pemenuhan Insentif Pelayanan Masyarakat sampai bulan Desember.

C. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Belanja modal tersebut diarahkan untuk melaksanakan optimasi terhadap pekerjaan dalam kelompok belanja modal yang telah dilakukan perikatan tanpa mengurangi/ menurunkan capaian target *output* dan *outcome* pekerjaan.

D. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk mengantisipasi kejadian luar biasa diluar kewenangan daerah atau kondisi darurat/ mendesak diluar perencanaan. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar **Rp94,371 miliar** dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan antara lain yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

E. Belanja Transfer

Belanja transfer sebesar **Rp21,715 miliar** telah ditransfer ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Serang untuk penanganan sampah kota Tangerang Selatan ke TPA Cilowong di Kota Serang.

F. Belanja Hibah

Pada Perubahan RKPD, belanja Hibah berubah diantaranya rasionalisasi Hibah kepada KONI pada Dispora, penambahan belanja HIBAH baru pada Badan Kesbangpol dan Dinas Perkimta.

Penambahan belanja hibah baru berupa uang diberikan kepada KPU sebesar **Rp500** juta dan kepada DKM Musholla Al-Ikhlas Kelurahan Kedaung sebesar Rp100 juta dianggarkan dalam P-APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial.

G. Belanja Bantuan Sosial

Sesuai dengan ketentuan peraturan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, pada Perubahan RKPD, belanja bantuan sosial berupa barang bertambah sebesar Rp781 Juta (11 x @Rp71 juta) pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan dengan rincian calon penerima sebagai berikut :

No	Calon Penerima*	Alamat*
1	Darisah	Ciater Tengah - Ciater
2	Hendra Prasetya	Jl. Raya Jombang Kp Gunung RT. 03/08 – Jombang
3	Nawawi	Jl. Gelatik Atas Rt.09/09 – Rengas
4	Karyati	Jl. Gelatik Atas Rt.09/09 – Rengas
5	Sumiyati	Jl. Gelatik Atas Rt.09/09 – Rengas
6	Hasanudin	Jl. Gelatik Atas Rt.10/09 – Rengas
7	Rohani	Kp. Bulak RT.04/10 – Serua
8	Hasan Basri	Kp. Maruga RT. 03/04 – Serua
9	Turinem	Kp. Setu Rempoa RT.02/08 – Rempoa
10	Narun	Jl. WR. Supratman Kp. Utan RT.05/06 – Cempaka Putih
11	Soemarwanto	Jl. H. Echo Kp. Utan RT. 01/09 – Cempaka Putih

* Kelengkapan data calon penerima dan alamat lengkap sesuai dengan data pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Adapun Perubahan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.14. Perubahan Belanja Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Kode	Uraian	APBD 2021	Pergeseran TAHAP 3	Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	PERSEN
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
5	BELANJA					
5,1	BELANJA OPERASI	2.506.524.647.158	2.526.073.456.792	3.459.153.717.013	115.448.382.820	103,45
5,2	BELANJA MODAL	721.700.613.574	817.631.877.401			
5,3	BELANJA TIDAK TERDUGA	16.913.526.410	93.922.565.320	94.371.738.604	449.173.284	100,48
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.913.526.410	93.922.565.320	94.371.738.604	449.173.284	100,48
5,4	BELANJA TRANSFER	-	21.715.356.000	21.715.356.000	-	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	21.715.356.000	21.715.356.000	-	100,00
	Jumlah Belanja	3.245.138.787.142	3.459.343.255.513	3.575.240.811.617	115.897.556.104	103,35

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dijelaskan bahwa pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya. Fungsi pembiayaan merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara yang mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban, sebagai perwujudan dari APBD.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 didapat dari prediksi hasil pelampauan pendapatan dan efisiensi penerimaan anggaran tahun anggaran 2020 (audited).

Terkait dengan pengeluaran pembiayaan, dapat diarahkan untuk penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah/ badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam hal kebutuhan wajib pelayanan dasar terpenuhi.

Tabel 3.15 Anggaran Pembiayaan Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Kode	Uraian	APBD 2021	PERGESERAN TAHAP 3	R Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	PERSEN
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
4	PENDAPATAN DAERAH					
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.513.969.455.500	1.513.969.455.500	1.509.208.596.353	-4.760.859.147	99,69
4.1.01	Pajak Daerah	1.307.579.000.000	1.307.579.000.000	1.317.570.820.355	9.991.820.355	100,76
4.1.02	Retribusi Daerah	45.809.060.000	45.809.060.000	46.168.883.498	359.823.498	100,79
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	160.581.395.500	160.581.395.500	145.468.892.500	-15.112.503.000	90,59

Kode	Uraian	APBD 2021	PERGESERAN TAHAP 3	R Perubahan RKPD 2021	Bertambah / (Berkurang)	PERSEN
1	2	3	4	5	6 = 5-4	7 = 5/4
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	1.473.771.462.650	1.681.699.601.021	1.852.463.465.653	170.763.864.632	110,15
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	978.097.515.000	988.841.932.900	988.841.932.900	-	100,00
6	PEMBIAYAAN					
6,1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	- 50.105.449.381	68,80
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	- 50.105.449.381	68,80
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	- 50.105.449.381	68,80
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-		
	Pembiayaan Netto	160.574.968.992	160.574.968.992	110.469.519.611	- 50.105.449.381	68,80
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	

3.3. Inovasi Daerah

3.3.1. Pemanfaatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan Inovasi Daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan perincian sebagai berikut:

No.	Nama OPD	Bentuk Inovasi	Aplikasi	Non Aplikasi	Keterangan
1.	Bapenda	Praktis (Proses Balik Nama Otomatis)	√		
		ETA (Easy To Acces)	√		
		E-SPTPD	√		Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) secara elektronik yang dikelola oleh BAPENDA Kota Tangerang Selatan
		Simpel (Sistem Penyampaian SPPT PBB Elektronik)	√		Aplikasi Sistem Penyampaian SPPT PBB Elektronik (SIMPEL) yang dikelola oleh BAPENDA Kota Tangerang Selatan
		e-Pajak Daerah	√		Aplikasi e-Pajak Daerah KOTA TANGERANG SELATAN
2.	DPMTSP	Simponie (Sistem Manajemen Perijinan)	√		Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Perizinan Online (Simponie) yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan
		IMB ON The SPOT	√		
		Laris (Layanan Arsitek Gratis)	√		
3.	Dishub	ATCS	√		Area Traffic Control System (ATCS) atau yang lebih dikenal dengan istilah ATCS adalah suatu sistem pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi pada suatu kawasan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja jaringan jalan melalui optimasi dan koordinasi pengaturan lampu lalu lintas di setiap persimpangan
		sipencatra.tangerangselatankota.go.id			Sistem Pemilihan Calon Mitra Sewa (Sipencatra) yang dikelola oleh Dinas Perhubungan untuk memilih vendor yang mengelola lahan parkir
4.	Disdukcapil	Melipir di Mall	√		
		Simpelin	√		
		Siduta (Sistem Informasi Penduduk Kota Tangerang Selatan)	√		
		KIA (Kartu Identitas Anak) KU Beda		√	
5.	Diskominfo	AKM (Anjungan Kia Mandiri)	√		
		Sisumaker (Sistem Informasi Surat Masuk Dan Keluar)	√		Aplikasi Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar (Sisumaker) digunakan untuk mengirim surat antar OPD
		Siaran Tangsel	√		Halaman backend aplikasi Sistem Pelaporan & Penugasan (Siaran Tangsel)
6.	Dinkes	Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	√		Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Puskesmas (Simpus)
7.	PU	Simanja (Sistem Informasi Manajemen Jalan & Jembatan)	√		Sistem Informasi Manajemen Jalan dan Jembatan (Simanja) yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Tangerang Selatan

No.	Nama OPD	Bentuk Inovasi	Aplikasi	Non Aplikasi	Keterangan
8	Dinas Lingkungan Hidup	Maskot Pelitas (Penyelamat Lingkungan Tangerang Selatan)		√	
9	Kec. Ciputat	Jumari (Pelayanan Jumat Malam Hari)		√	
		Gang Cantik		√	
10	Kel. Pd. Ranji	Smart Village (Desa Cerdas)		√	
11	Bappeda	E-Musrenbang	√		
12	RSUD	Sistem Pendaftaran Online (SIPOLIN) yang terintegrasi dengan NIK dan Aplikasi SIMRS di RSUD Tangsel	√		https://daftaronlinersud.tangerangselatankota.go.id/home/daftar Aplikasi daftar online di RSUD Kota Tangerang Selatan
		Sistem SMS Gateway RSUD Kota Tangsel (SIMARSEL)	√		
		System Pelaporan Kesehatan Ibu dan Anak (SIPIA) pada RSUD Kota Tangsel	√		
13	BKPP	LASIK (Layanan Administrasi & Informasi Kepegawaian)	√		Aplikasi Layanan Administrasi dan Informasi Kepegawaian Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang dikelola oleh BKPP
14	Disperindag	Pagar Tangsel	√		
15	Kec. Pamulang	Jumantik		√	
16	Perpustakaan	iTangsel	√		
17	Perkim	Sistem Informasi Pengaduan Dan Layanan PJU Kota Tangerang Selatan (SIMPEL PJU TANGSEL)	√		
18	DPMP3AK B	SIPADUKEREN (Sistem Pengaduan Kekerasan Online)	√		
19	Dinas Bagunan	Pelayanan Informasi Pemanfaatan Ruang	√		

3.3.2. Potensi Pengembangan Inovasi Daerah

Sistem inovasi daerah diwujudkan untuk menunjang sistem inovasi nasional. Sistem inovasi yang berorientasi kewilayahan menjadi kunci sukses keberhasilan pengembangan riset dan aplikasinya. Dengan orientasi kewilayahan maka dapat ditentukan fokus pengembangan daerah. Selain itu, pemerataan pembangunan dapat diupayakan melalui pengoptimalan kapasitas daerah. Penguatan sistem inovasi daerah merupakan wahana dalam memperkuat pilar-pilar penumbuhkembangan kreativitas dan inovativitas di daerah yang menjadi bagian integral penguatan sistem inovasi nasional.

Regulasi yang membahas khusus mengenai sistem inovasi daerah tertuang dalam Peraturan Bersama Menteri Riset dan Teknologi No. 3 tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri No. 36 tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Eksistensi regulasi ini semakin memperkuat sistem inovasi daerah kota Tangerang Selatan untuk fokus mengembangkan SiDA yang telah dibangun dalam meningkatkan perekonomian dan daya saing nasional. Termasuk dalam hal ini membuat sebuah terobosan yang dinamakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Elektronik (e-LPPD) yaitu sistem aplikasi yang dibuat untuk mempermudah Perangkat Daerah dalam pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK), kemudian untuk mendokumentasikan data pendukung dari masing-masing elemen data capaian kinerja, secara

online oleh seluruh OPD. Inovasi tersebut dinilai akan memiliki kelebihan seperti disiplin waktu input Elemen Data (ED) dan Data Pendukung (aplikasi memiliki limit waktu).

Tidak dipungkiri bahwa keterlambatan dalam penyampaian data capaian kinerja oleh OPD, menyebabkan proses pengolahan menjadi terlambat. Kemudian pengumpulan dan pengarsipan arsip data pendukung yang tidak teratur dan terkesan sulit dicari saat dibutuhkan. Keberadaan berkas Arsip memerlukan ruang yang besar, serta tenaga yang dibutuhkan terlalu banyak karena harus jemput bola ke setiap OPD yang tidak proaktif. Belum lagi kualitas data yang disampaikan juga masih rendah karena tidak ada verifikasi mandiri, sehingga kurangnya akuntabilitas, dan penyusunan LPPD tidak fokus karena bersamaan dengan penyusunan LKPJ Kepala Daerah.

Diharapkan dengan mengembangkan inovasi e-LPPD ini pola kerja penyusunan LPPD akan lebih cepat, efektif dan efisien waktu dan tenaga, dan dapat dipastikan dalam waktu 1 bulan (Februari), elemen data dan data pendukungnya sudah terverifikasi dan lampiran LPPD siap disampaikan oleh kepala daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan periode Tahun 2016-2021, maka Visi RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021 adalah **“Terwujudnya Tangsel Kota Cerdas, Berkualitas, Berdaya Saing berbasis teknologi dan Inovasi”**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana diuraikan di atas, maka dirumuskan misi yang harus diemban oleh Pemerintah bersama dengan Masyarakat Kota Tangerang Selatan sebagai berikut:


1. Mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya saing;
2. Meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional;
3. Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan;
4. Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan;
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka pembangunan jangka menengah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 - 2021 memiliki tujuan, dan sasaran beserta status ketercapainnya sampai dengan tahun 2021 yang dijelaskan dalam tabel 4.1 berikut :




Tabel 4.1. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2021	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian	Status Ketercapaian	
1	Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang handal dan berdaya saing	Mewujudkan pembangunan manusia seutuhnya .	1.1 Meningkatkan partisipasi dan mutu pendidikan dasar	• Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI	99,00%	107,59	108,68%	
				• Indeks kelulusan SD/MI	100%	n/a	n/a	
				• Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	84,93%	98,84	116,38%	
				• Indeks kelulusan SMP	100%	n/a	n/a	
				• RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	11,60-11,63	11,81	101,55%	
		1.2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	• Angka Kematian Bayi (AKB)	1/ 1000 kelahiran hidup	0,6/1.000	167%		
			• Angka Kematian Ibu (AKI)	32/ 100000 kelahiran hidup	32/1.000	100%		
			• Angka Harapan Hidup	72,129-72,135	72,47	100%		
		1.3 Meningkatkan kualitas angkatan kerja	• Rasio penyerapan tenaga kerja	65%	91,52	140,80%		
		1.4 Meningkatkan pengendalian jumlah penduduk	• Laju Pertumbuhan Penduduk (Proyeksi penduduk BPS)	2,87%	0,47	100%		
		1.5 Meningkatnya pengarusutamaan gender	• Indeks pembangunan gender	93,46-93,69	93,56	99,86%		
• Indeks pemberdayaan gender	64,37-64,67		70,72	109,36%				
2	Meningkatkan Infrastruktur kota yang fungsional	2.1 Meningkatkan pelayanan infrastruktur wilayah	• Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	7	9,08	129,71%		
			• Indeks kinerja jaringan jalan	90%	97,31	108,12%		
		2.2 Meningkatkan transportasi wilayah yang optimal	• Load factor angkutan perkotaan	60%	n/a	n/a		

No		Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2021	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian	Status Ketercapaian	
3	Menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan	Meningkatkan sarana dan prasarana kota layak huni berwawasan lingkungan.	3.1	Meningkatnya sarana dan prasarana perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> Persentase kualitas sarana dan prasarana perkotaan 	80%	92,26	115,33%	
			3.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kualitas lingkungan 	61	54,00	88,52%	
					<ul style="list-style-type: none"> Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota 	12%	14,25	118,75%	
			3.3	Meningkatnya keamanan dan ketertiban lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> Angka kriminalitas 	1450	n/a	n/a	
4	Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan	Menumbuhkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis produk unggulan.	4.1	Meningkatnya investasi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Investasi PMA 	3.650.000.000 (USD)	(548 PMA) USD47.594.139	1,30%	
					<ul style="list-style-type: none"> Jumlah Investasi PMDN 	475.000.000.000 (IDR)	(937 PMDN) Rp3.248.177.106.248	14,62%	
			4.2	Meningkatnya perekonomian perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> PDRB 	79,50-86,49 Triliun	82,55 Triliun	95,44%	
					<ul style="list-style-type: none"> Laju Pertumbuhan Ekonomi 	6% - 7,5%	-1,01	-13,47%	
					<ul style="list-style-type: none"> PDRB perkapita 	42.94-46,72 juta rupiah/tahun	45,871,862	98,18%	
					<ul style="list-style-type: none"> Ketahanan Pangan (Pola Pangan Harapan) 	93,00%	94,42	101,53%	
			4.3	Meningkatnya produk unggulan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah inovasi produk unggulan 	80	n/a	n/a	
5	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.	Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan dan reformasi birokrasi yang lebih efektif dan akuntabel.	5.1	Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat konsistensi antar dokumen 	90%	n/a	n/a	
					5.2	Meningkatnya pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> Tingkat kepuasan pelayanan publik 	Mutu pelayanan A	B
			5.3	Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah	<ul style="list-style-type: none"> Komposisi PAD terhadap APBD 	49%	49,03%	100,06%	
					<ul style="list-style-type: none"> Jumlah APBD 	3,5 Triliun	3,1 Triliun	88,57%	
<ul style="list-style-type: none"> Opini BPK 	WTP	WTP	100%						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target 2021	Realisasi RPJMD s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian	Status Ketercapaian	
		5.4	Meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah	• Predikat Akip	B	B	100%	

Keterangan:

-  realisasi >90% target Tercapai (*achieved*)
-  realisasi 60-90% target Akan tercapai/membaik (*positive change*)
-  realisasi <60% target Perlu perhatian khusus (*negative change*)

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*, holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada prioritas pembangunan nasional dan provinsi Banten Tahun 2021.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, visi pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 adalah **"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong"**. yang dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sesuai dengan RKP Tahun 2021, tema pembangunan nasional pada tahun 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial" adalah tema yang ditetapkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 menanggapi bencana pandemi COVID-19. Prioritas Nasional pada tahun 2021 adalah:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menj amin Pemerataa
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2021

Kebijakan pembangunan daerah tahun 2021 ditujukan untuk “**Mempercepat Pemulihan Dampak Pandemi terhadap Kesejahteraan Sosial**”. Guna percepatan pencapaian tujuan pembangunan daerah tahun 2021 tersebut, ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah tahun 2021, yaitu:

1. Mempercepat pemulihan Pandemi COVID 19
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Memperkuat Infrastruktur untuk Interkonektivitas wilayah dan daya saing daerah
4. Memacu Pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan
5. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan.

4.2.3. Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Memperhatikan kondisi global dan nasional, serta tantangan dan upaya penanganan, pemulihan pasca pandemi COVID-19, serta berdasarkan target capaian RPJMD Tahun 2016-2021 khususnya tahun 2021, maka prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan pada Perubahan RKPd Tahun 2021 diprioritaskan kepada:

1. Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
2. Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
3. Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang
4. Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan

Prioritas pertama pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2021 tersebut difokuskan untuk mengatasi permasalahan pembangunan dan isu strategis tahun 2021, yaitu Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dimana semula prioritas ini menjadi urutan prioritas nomor dua. Keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah, dengan Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD, Arah Kebijakan dalam RPJMD, serta isu Strategis Tahun 2021 berdasarkan hasil evaluasi sampai dengan Triwulan II, sebagaimana telah disampaikan dalam sub-bab 2.3.1. Adapun keterkaitan permasalahan, isu dan prioritas pembangunan tahun 2021 disajikan dalam Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2. Keterkaitan Permasalahan, Isu Strategis dan Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi 2021 TW 2 (menjadi Isu Strategis)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi	- Meningkatkan pendidikan non-formal	Peningkatan kualitas SDM	1. Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.
Layanan kesehatan masih belum optimal	- Meningkatkan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dua belas Tahun	Peningkatan Derajat Kesehatan (Masa Pandemi COVID-19)	
Tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya masih belum optimal	- Meningkatkan pengelolaan pelayanan dan mutu pendidikan - Meningkatkan kualitas informasi dan budaya baca - Mengembangkan mutu pelayanan kesehatan		

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi 2021 TW 2 (menjadi Isu Strategis)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan, pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan puskesmas - Penyediaan dan pengawasan perbekalan kesehatan - Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi, balita, anak, remaja dan lansia. - Meningkatkan kualitas gizi masyarakat - Memberdayakan masyarakat agar hidup sehat - Mengembangkan sumber daya manusia kesehatan - Meningkatkan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, komplementer dan penanggulangan penyakit menular-tidak menular - Meningkatkan kualitas layanan Rumah Sakit - Meningkatkan pengelolaan infrastruktur pemukiman, sumberdaya air dan lingkungan sehat - Membina dan memasyarakatkan olahraga - Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga - Pengembangan produkifitas, kesempatan dan lembaga ketenaga kerjaan - Meningkatkan peran serta kepemudaan - Memperbaiki upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda - Membina masyarakat dalam menciptakan keluarga sejahtera dan mandiri - Meningkatkan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan - Meningkatkan kualitas hidup serta perlindungan kepada perempuan dan anak - Menguatkan lembaga PUG dan Anak 		
Pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya meningkatkan daya beli masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama - Meningkatkan pengendalian, pengawasan dan kualitas pelayanan perijinan yang bermutu 	Pemulihan Perekonomian	2. Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi 2021 TW 2 (menjadi Isu Strategis)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan kelembagaan, iklim usaha dan kewirausahaan koperasi - Mengembangkan IKM dan koperasi - Melindungi konsumen dan mengamankan perdagangan - Membina pedagang kecil - Meningkatkan ekspor - Meningkatkan ketahanan pangan - Meningkatkan kualitas pengelolaan Pasar - Meningkatkan Jaminan Sosial - Meningkatkan Kesejahteraan Sosial - Memberdayakan kelembagaan kesejahteraan sosial - Mendorong peran serta, lembaga ekonomi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan - Mengembangkan kemitraan untuk mendukung pengembangan MICE - Pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif - Mengembangkan dan mengelola Kebudayaan. 		
Perumahan layak huni belum dapat terjangkau masyarakat luas	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan - Menata penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 	Peningkatan Infrastruktur Perkotaan	3. Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang
Jaringan dan kualitas jalan belum mendukung pada fungsi kota	<ul style="list-style-type: none"> - Menata lingkungan terpadu permukiman - Menciptakan lingkungan sehat - Mengembangkan infrastruktur permukiman - Mengelola air bersih dan air limbah - Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong - Mencegah dan Menangani - Mengelola dan mengkonversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya - Meningkatkan layanan angkutan - Mengendalikan dan mengamankan lalu lintas - Membangun sarana prasarana perhubungan - Meningkatkan Transportasi Masal - 	Infrastruktur Lingkungan Permukiman	

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi 2021 TW 2 (menjadi Isu Strategis)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
Lingkungan perkotaan belum tertata dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> - Mengembangkan teknologi pengolahan sampah - Penyediaan Fasilitas Pengangkut Sampah dan Sosialisasi pengurangan volume dari sumber sampah - Meningkatkan dan mengelola Ruang Terbuka Hijau - Merencanakan Tata Ruang Kota - Kebijakan, pengendalian dan memanfaatkan Ruang sesuai Tata Ruang - Merencanakan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh - Mengendalikan Pencemaran Perusakan Lingkungan Hidup dan pengelolaan mutu laboratorium LH - Melindungi dan mengkonservasi Sumber Daya Alam - Meningkatkan Edukasi dan Komunikasi Masyarakat di Bidang Lingkungan Hidup - Memberdayakan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan - Menegakkan peraturan daerah dan peraturan walikota - Pencegahan bahaya kebakaran - Meningkatkan efektifitas tanggap darurat dan mitigasi menghadapi bencana - Memberikan pendidikan politik masyarakat - Mengembangkan wawasan kebangsaan 		
Pelayanan publik yang belum optimal	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah - Menata Kelembagaan dan Tata Kerja Pemerintahan - Meningkatkan kerjasama pembangunan - Menata peraturan perundang-undangan serta menerbitkan regulasi dan menyelaraskan peraturan-peraturan di daerah - Melayani Bantuan Hukum dan HAM - Meningkatkan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dan DPRD - Meneliti dan mengembangkan daerah serta melakukan 		4. Penguatan Kualias Tata Kelola Pemerintahan

Permasalahan Pembangunan dalam RPJMD	Arah Kebijakan dalam RPJMD	Permasalahan Pembangunan Hasil Evaluasi 2021 TW 2 (menjadi Isu Strategis)	Prioritas Pembangunan Tahun 2021
	<p>koordinasi di Bidang Penelitian, Pengembangan dan Statistik</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah (KDH) - Meningkatkan kualitas Pelayanan administrasi dan sarana prasarana perkantoran - Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan daerah - Meningkatkan Pengelolaan Aset Daerah - Meningkatkan Pengelolaan Pajak dan retribusi Daerah - Membina dan mengembangkan kapasitas sumber daya aparatur - Mengembangkan Manajemen Kepegawaian - Penguatan sistem tata kelola pemerintahan - Menata Administrasi Kependudukan - Informasi wilayah yang terintegrasi - Meningkatkan Peran Kecamatan dan Kelurahan - Meningkatkan Komunikasi dan Mengembangkan Informasi dan Media Massa - Mengoptimalkan pemanfaatan TI - Memelihara Rutin/Berkala sarana/prasarana Kearsipan dan Pelayanan Kearsipan 		

Prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan tahun 2021 tersebut dijabarkan dalam sasaran pembangunan, yang ditunjukkan dalam Tabel 4.3 berikut.

Tabel 4.3. Sasaran Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

Prioritas Kota Tangerang Selatan		Sasaran Pembangunan
1	Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya partisipasi dan mutu pendidikan dasar - Meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat - Penanganan pandemi Covid-19 - Meningkatnya kualitas angkatan kerja - Meningkatnya pengendalian jumlah penduduk - Meningkatnya pengarusutamaan gender
2	Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya investasi - Meningkatnya perekonomian perkotaan - Meningkatnya produk unggulan daerah - Pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19
3	Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pelayanan infrastruktur wilayah - Meningkatnya transportasi wilayah yang optimal
4	Penguatan Kualias Tata Kelola Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya konsistensi perencanaan penganggaran dan pembangunan - Meningkatnya pelayanan publik - Meningkatnya Pengelolaan keuangan daerah - Meningkatnya akuntabilitas pemerintahan daerah

Berdasarkan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun 2021, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui Indikasi rencana program prioritas Pemerintah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 disusun berdasarkan hasil pemetaan RPJMD terhadap Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodesifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan perubahannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4.4. Rencana Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 yang disesuaikan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pendidikan Sekolah Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	APM (Angka Partisipasi Murni) SD/MI	99,99%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	APM (Angka Partisipasi Murni) SMP/MTS	97,50%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	PAUD Dan Pendidikan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan	APM PAUD	32%	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	PAUD Dan Pendidikan Non Formal	Program Pengelolaan Pendidikan	Harapan Lama Sekolah	14.62 Tahun	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pendidikan Sekolah Dasar	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah Dasar Terbangun	24 Sekolah	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Program Pengelolaan Pendidikan	Jumlah Sekolah Menengah Pertama Terbangun	- Sekolah	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pembinaan Tenaga Pendidik Dan Kependidikan	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Uji Kompetensi Guru	85 Skor	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Akreditasi Dan Re-Akreditasi Puskesmas	10 Puskesmas	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup	1 Per 1.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu Per 100.000 Kelahiran Hidup	32 Per 100.000 Kelahiran Hidup	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bangunan Gedung 2 RSUD Tangsel	- %	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Bangunan RSUD (Gedung 3)	- Paket	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan Siaga Aktif	54 Kelurahan	Dinas Kesehatan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Masyarakat Miskin Dan Kurang Mampu Serta Masyarakat Yang Beresiko Berdampak Sosial , Yang Memiliki Jaminan Asuransi Kesehatan	77%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	97%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Penduduk Miskin Dan Kurang Mampu Serta Masyarakat Yang Beresiko Berdampak Sosial Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Tk.I Dan Rujukan	40%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Di Puskesmas	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan	80%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Kesehatan Siswa SD/Setingkat	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Lansia	32 Puskesmas Santun Lansia	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penanganan Penyakit Menular Dan Tidak Menular Sesuai Tahapan Standar Nasional	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Dan Komplementer	72%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Komplementer	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Warga Kota Tangerang Selatan Yang Mendapatkan Pelayanan Pengelolaan Darah Yang Tidak Di Tanggung BPJS	85%	Dinas Kesehatan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jenis Pelayanan Sesuai Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit	21 Jenis Pelayanan	Rumah Sakit Umum
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bangunan Posyandu Yang Dibangun	151 Posyandu	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Bangunan Puskesmas Yang Dikembangkan	- Puskesmas	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Desa/Kelurahan Yang Melaksanakan STBM	54 Kelurahan	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan BLUD	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas BLUD	2 Puskesmas	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas Yang Direhabilitasi	- Puskesmas	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas Yang Perlu Adanya Tambah Ruang Sesuai Kebutuhan Pelayanan	1 Puskesmas	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Puskesmas Yang Terbangun	35 Puskesmas	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Jumlah Rumah Sakit Tingkat Kecamatan Dibangun	- Unit	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Akreditasi Unit Labkesda	60%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Alat Kesehatan Sesuai Standar	85%	Dinas Kesehatan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Anak Usia 0 Sampai 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	94%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Cakupan Rumah Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	80%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ibu Hamil KEK Mendapat Makanan Tambahan	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyediaan Dan Pengawasan Obat, Makanan Dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan Puskesmas Dan Jaringannya	99%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyediaan Dan Pengawasan Obat, Makanan Dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Reagen Dan Bmhp Laboratorium Di Puskesmas Dan Labkesda	95%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pasien Yang Mengetahui Produk Pelayanan Rumah Sakit	75%	Rumah Sakit Umum
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk Yang Memiliki Akses Terhadap Air Minum Berkualitas	60%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Sesuai Standar	100%	Rumah Sakit Umum
Prioritas 1	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Remaja Putri Yang Mendapat TTD	40%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Penyediaan Dan Pengawasan Obat, Makanan Dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Resep Sesuai Dengan Formularium	90%	Rumah Sakit Umum

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase RS Yang Melakukan Pengelolaan Limbah Medis Sesuai Standar	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular Dan Tidak Menular	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Sinyal Kewaspadaan Dini Yang Direspon	92%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	62%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Prosentase Masyarakat Tangerang Selatan Menggunakan JKN	70%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Tingkat Instrumen Akreditasi Rumah Sakit	12 Bab (Tingkat Madya)	Rumah Sakit Umum
Prioritas 1	Pengembangan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Cakupan SDM Kesehatan Yang Terlatih	90%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan SDM Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase SDM Kesehatan Yang Mendapat Pelatihan Minimal 20 Jam Per Tahun	50%	Rumah Sakit Umum
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Pelayanan Kesehatan	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Alat Kesehatan Sesuai Standar	85%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengendalian Lingkungan Sehat	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Tempat Umum Yang Memenuhi Syarat Kesehatan	62%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Kelurahan Sehat/Kelurahan Siaga Aktif	54 Kelurahan	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Promosi Kesehatan Dan Pemberdayaan Masyarakat	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Cakupan Organisasi Kemasyarakatan Yang Memanfaatkan Sumber Dayanya Untuk Mendukung Kesehatan	100%	Dinas Kesehatan
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteran Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteran Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Ciputat

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Serpong Utara
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Pencegahan Dan Penanggulangan HIV Dan AIDS	2 Dok	
Prioritas 1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Pelayanan Dan Rehabsos Sesuai Standar Dasar	58%	
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Ciputat Timur
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Pamulang
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Serpong
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Pondok Aren
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	Kecamatan Setu
Prioritas 1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Pelayanan Dan Rehabsos Sesuai Standar Dasar	58%	Dinas Sosial
Prioritas 1	Bantuan Dan Jaminan Sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga/Individu Sasaran Yang Mendapatkan Bantuan Dan Jaminan Sosial	90%	Dinas Sosial
Prioritas 1	Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Program Penanganan Bencana	Persentase PMKS Yang Mendapatkan Pelayanan Dan Rehabsos Sesuai Standar Dasar	58%	
Prioritas 1	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase PMKS Dan LKS Yang Diberdayakan	45%	
Prioritas 1	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai	20%	Dinas Ketenagakerjaan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Siap Pakai	20%	Dinas Ketenagakerjaan
Prioritas 1	Peningkatan Kesempatan Kerja Dan Berusaha	Program Penempatan Tenaga Kerja	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	69%	Dinas Ketenagakerjaan
Prioritas 1	Kerjasama Hubungan Industrial Dan Perlindungan Ketenagakerjaan	Program Hubungan Industrial	Menurunnya Angka Perselisihan Industrial	17 Kasus	Dinas Ketenagakerjaan
Prioritas 1	Penguatan Kelembagaan PUG Dan Anak	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	IPG Dan IDG	93,68-94,53%/64,66-65,27% IPD Dan IDG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	743 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Program Perlindungan Perempuan	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Oleh Petugas	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Penguatan Kelembagaan PUG Dan Anak	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	IPG Dan IDG	93,68-94,53%/64,66-65,27% IPG Dan IDG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Penguatan Kelembagaan PUG Dan Anak	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	IPG Dan IDG	93,68-94,53%/64,66-65,27% IPG Dan IDG	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Penguatan Kelembagaan PUG Dan Anak	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	Jumlah Kelurahan Ramah Anak	19 Kelurahan	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak	Program Perlindungan Khusus Anak	Cakupan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan Oleh Petugas	100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KK	100%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Penerbitan KTP	99,62%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	96,27%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Cakupan Penerbitan Kutipan Akta Kematian	83,01%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pencatatan Sipil	Rasio Pasangan Berakta Perkawinan	76,96%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1.364.099 Penduduk	Kecamatan Ciputat
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Kecamatan Ciputat Timur
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Kecamatan Pamulang
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Kecamatan Serpong
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Kecamatan Serpong Utara
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Kecamatan Pondok Aren

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Kecamatan Setu
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Penduduk Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Jumlah Data Dan Informasi Pendudukan Yang Tersedia	1364099 Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Pentingnya Dokumen Kependudukan	12,13%	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Prioritas 1	Peningkatan Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Pemanfaatan Inovasi TTG Dalam Pemberdayaan Masyarakat	11 Inovasi	
Prioritas 1	Peningkatan Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase Peran Serta Lembaga/Kelompok Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pembangunan	85%	
Prioritas 1	Keluarga Berencana	Program Pengendalian Penduduk	Menurunnya Unmet Need	6,10%	
Prioritas 1	Pengendalian Penduduk	Program Pengendalian Penduduk	Pengendalian Urbanisasi Penduduk	350 Orang	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
Prioritas 1	Keluarga Berencana	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	Meningkatnya Kesertaan Ber- KB	71,50%	
Prioritas 1	Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya Anggota Tribina (BKB, BKR, BKL) Yang Ber-KB	92,66%	
Prioritas 1	Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Meningkatnya Produk Unggulan UPPKS	70%	

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Keluarga Berencana	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	Proporsi Pasangan Usia Subur Yang Istrinya Dibawah 20 Tahun	1,80%	
Prioritas 1	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi Dan Media Massa	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Peningkatan Penerapan Keterbukaan Sistem Informasi Publik	20%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 1	Pengembangan Komunikasi, Sistem Informasi Dan Media Massa	Program Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebaran Informasi	10%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 1	Pengembangan Teknologi Dan Informasi	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Teknologi Dan Informasi	10%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 1	Pengembangan Teknologi Dan Informasi	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan SDM Teknologi Dan Informasi	10%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 1	Pengembangan Teknologi Dan Informasi	Program Aplikasi Informatika	Peningkatan tata Kelola Teknologi Dan Informasi	10%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 1	Pengembangan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah Calon Wirausaha Muda	7 Kelompok Calon Wirausaha Muda	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Prioritas 1	Pengembangan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	10 OKP	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Prioritas 1	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Olahraga	15 Sarana Dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Prioritas 1	Pengembangan Manajemen Dan Pemasarakatan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan Manajemen Dan Pengembangan Olahraga Di Masyarakat	15 Cabang Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Prioritas 1	Pengembangan Sarana Dan Prasarana Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Olahraga	10 Sarana Dan Prasarana Olahraga	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Prioritas 1	Pengembangan Peran Serta Kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan	Peningkatan Kualitas Organisasi Kepemudaan	10 OKP	Dinas Pemuda Dan Olahraga
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengelolaan Kebudayaan	Program Pengembangan Kebudayaan	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4 Jenis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengelolaan Kebudayaan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4 Jenis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengelolaan Kebudayaan	Program Pembinaan Sejarah	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4 Jenis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengelolaan Kebudayaan	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4 Jenis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pengembangan Dan Pengelolaan Kebudayaan	Program Pengelolaan Permuseuman	Jenis Budaya Yang Dilestarikan	4 Jenis	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Prioritas 1	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Gedung Perpustakaan Skala Kota Dan Skala Kecamatan	- Paket	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 1	Pengembangan Budaya Baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Koleksi Bahan Pustaka	40.000 Judul	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Prioritas 1	Pengembangan Budaya Baca	Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahunan	910.000 Orang	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan Dan Pelayanan Kearsipan	Program Pengelolaan Arsip	Tertatanya Arsip Seluruh Perangkat Daerah Dan Unit Kerja	75%	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan Dan Pelayanan Kearsipan	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Tertatanya Arsip Seluruh Perangkat Daerah Dan Unit Kerja	75 Persen	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Prioritas 1	Pengembangan, Pemeliharaan Sarana Prasarana Kearsipan Dan Pelayanan Kearsipan	Program Perizinan Penggunaan Arsip	Tertatanya Arsip Seluruh Perangkat Daerah Dan Unit Kerja	75%	Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah
Prioritas 1	Pengembangan Perikanan	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	103%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Perikanan	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	103%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Perikanan	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai Tukar Pembudidaya/Pelaku Usaha Perikanan	103%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	103%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	103%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Kesehatan Hewan	84%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pengembangan Pertanian	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Presentase Bahan Asal Hewan Yang Memenuhi Kriteria ASUH	82%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Pertanian	Program Penyuluhan Pertanian	Nilai Tukar Petani/Pelaku Usaha Pertanian	103%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 1	Pengembangan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Binaan Kelompok Industri	50 Kelompok	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 1	Pengembangan Industri	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Cakupan Binaan Kelompok Industri Kreatif	20 Kelompok	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 1	Pengembangan Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Cakupan Binaan Kelompok Industri	50 Kelompok	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 1	Pengembangan Industri	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaporan Informasi Industri	2 Semester	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 1	Pengembangan Industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Pelaporan Informasi Industri	2 Semester	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Ciputat
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Ciputat Timur
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Pamulang
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Serpong
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Serpong Utara
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Pondok Aren
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Jumlah Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Publik	35 Urusan	Kecamatan Setu
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Ciputat
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Ciputat Timur

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Pamulang
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Serpong
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Serpong Utara
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Pondok Aren
Prioritas 1	Peningkatan Kualitas Dan Kuantitas Pelayanan Publik	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Rata-Rata Nilai Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Publik Di Masing-Masing SKPD	A Nilai	Kecamatan Setu
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Ciputat
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Ciputat Timur
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Pamulang
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Serpong
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Serpong Utara
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Pondok Aren
Prioritas 1	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Kecamatan Setu
Prioritas 1	Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Peran Kecamatan Dan Kelurahan Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya	100%	Kecamatan Pamulang
Prioritas 1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan Dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Nilai-Nilai Religius, Sosial Dan Solidaritas Serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	40 Kali	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pendidikan Politik Masyarakat	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Jumlah Pembinaan Politik Masyarakat	10 Kali	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prioritas 1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan Dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Nilai-Nilai Religius, Sosial Dan Solidaritas Serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	40 Kali	
Prioritas 1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan Dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Nilai-Nilai Religius, Sosial Dan Solidaritas Serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	40 Kali	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prioritas 1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan Dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Nilai-Nilai Religius, Sosial Dan Solidaritas Serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	40 Kali	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prioritas 1	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Pembinaan Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Toleransi Kerukunan Dan Kerjasama Antar Umat Beragama, Nilai-Nilai Religius, Sosial Dan Solidaritas Serta Pelestarian Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	40 Kali	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik
Prioritas 1	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Laporan Keuangan Di SKPD Sesuai Ketentuan	100 Persen	
Prioritas 1	Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	
Prioritas 1	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Perencanaan Pembangunan Di Setiap SKPD Sesuai Ketentuan	100 Persen	

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 1	Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan BLUD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kepuasan Pasien Yang Disurvei	76%	Rumah Sakit Umum
Prioritas 2	Pengembangan Koperasi	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Jumlah Usaha Koperasi Simpan Pinjam Dan Ijin Pembukaan Kantor Cabang / Pembantu / Kantor Kas KSP	250 Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan Koperasi	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Serta Penilaian KSP Atau USP	640 Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan Koperasi	Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi Serta Penilaian KSP Atau USP	640 Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan Koperasi	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Jumlah SDM Koperasi Yang Dibina	1825 SDM Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan Koperasi	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Jumlah Koperasi Yang Terfasilitasi	50 Koperasi	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Jumlah Fasilitasi Sertifikasi Produk UMKM	325 Produk UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Ciputat
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Ciputat Timur
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Pamulang
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Serpong
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Serpong Utara

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Pondok Aren
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Kecamatan Setu
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Pengawasan, Pengembangan Data, Inovasi, Informasi Dan Teknologi	3 Dokumen	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	315 UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Jumlah Fasilitas Sertifikasi Produk UMKM	325 Produk UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pembangunan Dan Operasional Sarana Dan Prasarana Pengembangan UMKM	7 Galeri UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pembinaan Wirausaha UMKM Dan Calon Wirausaha UMKM	1390 SDM UMKM	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Pengembangan Pemasaran Produk Dan Inovasi Promosi UMKM	800 Produk	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah
Prioritas 2	Pengembangan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investasi PMA Dan PMDN	57 & 20 PMA & PMDN	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas 2	Pengembangan Investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investasi PMA Dan PMDN	57 & 20 PMA & PMDN	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas 2	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Layanan Perizinan Yang Bersertifikat ISO	22 Jenis Ijin	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas 2	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Penerapan Pelayanan Dan Perijinan Satu Pintu Dan Satu Atap	60 Jenis Ijin	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas 2	Pengembangan Investasi	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Peningkatan Jumlah Investasi PMA Dan PMDN	57 & 20 PMA & PMDN	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas 2	Pengembangan Pelayanan Perijinan	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Penerapan Pelayanan Dan Perijinan Satu Pintu Dan Satu Atap	60 Jenis Ijin	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Prioritas 2	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Jumlah PAD Dari Sektor Pariwisata	420.336.370.594 Rupiah	Dinas Pariwisata

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 2	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisatawan	436.413 Wisatawan	Dinas Pariwisata
Prioritas 2	Pengembangan Ekonomi Kreatif	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Usaha Terkait Ekonomi Kreatif Dan Icon Tangsel	30 Pelaku Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata
Prioritas 2	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Peningkatan Kesadaran Perijinan Perdagangan	40 Pelaku Usaha	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 2	Pengelolaan Pasar Dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Kawasan Perdagangan Tradisional Yang Dikelola	5 Pasar	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 2	Pengelolaan Pasar Dan Kawasan Perdagangan Tradisional	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Revitalisasi Pasar	- Pasar	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 2	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	9 Komoditas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 2	Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor	Program Pengembangan Ekspor	Jumlah Produk Yang Dipasarkan	2 Produk	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 2	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Jumlah UTTP Yang Diawasi	8500 UTTP	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 2	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Pengawasan Barang Dan Jasa	100%	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 2	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Stabilitas Harga Kebutuhan Pokok	9 Komoditas	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Prioritas 3	Pengendalian Banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Luas Genangan Yang Tereduksi	42%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Pengembangan Pengelolaan Dan Konversi Sungai Danau Dan Sumber Daya Air Lainnya	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Pemanfaatan Air Sungai, Danau, Dan Penampung Air Lainnya Sebagai Layanan Air Baku	20%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Pengelolaan Sarana Air Minum Dan Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Minum	85,50%	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Persentase Pengangkutan Sampah	70%	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengelolaan Sarana Air Minum Dan Air Limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase Penduduk Yang Terlayani Sistem Air Limbah Yang Memadai	89,85%	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 3	Pembangunan Dan Pemeliharaan Saluran Drainase Dan Gorong-Gorong	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Kapasitas Debit Saluran	60%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Pengembangan Permukiman	Jalan Lingkungan Dalam Kondisi Baik	70%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Pengembangan Permukiman	Terbangunnya Sarana Penunjang Permukiman	30 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Bangunan Depo Arsip	- Paket	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Jumlah Pembangunan Community Center/Komunitas Kreatif Skala Kecamatan	- Paket	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Kajian Dan Rekomendasi Teknis Serta Sertifikat Laik Fungsi	100%	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Non Perkantoran	1 Paket	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Penataan Bangunan Gedung	Tersedianya Sarana Dan Prasarana Gedung Perkantoran	2 Gedung	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Cakupan Perencanaan Pembangunan Di Setiap SKPD Sesuai Ketentuan	100%	
Prioritas 3	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	90%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Penyelenggaraan Jalan	Pedestrian Jalan Yang Dibangun	7%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Pembangunan Jalan Dan Jembatan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Jalan Dan Jembatan Dalam Kondisi Baik	90%	Dinas Pekerjaan Umum
Prioritas 3	Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Keterangan Peruntukan Lahan	100%	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang
Prioritas 3	Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Rinci Tata Ruang Beserta Rencana Teknisnya Melalui Peta Analog Dan Peta Digital	100%	Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 3	Perencanaan Tata Ruang	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersedianya Informasi Mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah	- %	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas 3	Pengendalian Dan Pengamanan Lalu Lintas	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Titik Pengendalian Dan Pengaturan Lalu Lintas	40 Titik	Dinas Perhubungan
Prioritas 3	Pengembangan Pelayanan Angkutan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Jumlah Uji KIR	37500 Unit	Dinas Perhubungan
Prioritas 3	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Penambahan Jumlah PJU Terbangun	2250 Titik	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Jumlah Sarana Prasarana Lalu Lintas	100%	Dinas Perhubungan
Prioritas 3	Peningkatan Transportasi Massal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi Massal	100%	Dinas Perhubungan
Prioritas 3	Rehabilitasi/Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Sarana Prasarana Lalu Lintas Yang Dapat Berfungsi	90%	Dinas Perhubungan
Prioritas 3	Pengembangan Penyediaan Dan Pengelolaan PJU	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Terpeliharanya Dan Terbayarnya Rekening PJU	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Pengembangan Perumahan	Penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa	1 Twin Blok	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penanggulangan Bencana Daerah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Mitigasi Dan Penanggulangan Bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prioritas 3	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Rekomendasi Teknis Pembangunan Dan Pengembangan Rumah Susun	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Pengembangan Perumahan	Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni	50 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya Data Rumah Dan Perumahan	6 Dokumen	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Pengembangan Perumahan	Tersedianya Regulasi Penyelenggaraan Perumahan Dan Permukiman	1 Perwal	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Kawasan Permukiman	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan	335,4 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Kawasan Permukiman	Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni	50 Unit	

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan	335,4 Ha	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Pengurangan Luasan Permukiman Kumuh Perkotaan (Ha)	335,4 Ha	
Prioritas 3	Penataan Lingkungan Terpadu	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Rumah Tidak Layak Huni Menjadi Layak Huni	50 Unit	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penyediaan Dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Pengembangan Dan Pembangunan TPU	10 TPU 1 TPK TPU, TPK	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Tercatatnya PSU Perumahan Yang dikuasai Sepihak Ke Dalam Neraca Aset	10 Perum	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penyediaan Dan Pengelolaan Areal Pemakaman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Terpeliharanya Sarana TPU	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pengembangan Infrastruktur Permukiman	Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, Dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Persentase Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Sertifikat Keahlian Perencana Dan Perancang Rumah Dan PSU Perumahan Skala Kecil	100%	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Walikota	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Cakupan Penegakan Perda Dan /Atau Perwal	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 3	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Koordinasi Pemeliharaan Ketertiban Masyarakat	25 Kali	Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 3	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Jumlah Penambahan SDM Dan Sarana Prasarana Penunjang	76%	Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 3	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Aparatur Satpol PP Yang Diateh	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 3	Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penindakan Pelanggaran Pengamanan Dan Penertiban	100%	Satuan Polisi Pamong Praja
Prioritas 3	Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Mitigasi Dan Penanggulangan Bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 3	Penanggulangan Bencana Daerah	Program Penanggulangan Bencana	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) < 20 Menit Terhadap Bencana	100%	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Prioritas 3	Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan Pelayanan Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Korban Serta Harta Benda	100%	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Prioritas 3	Peningkatan Kesiagaan Dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Respon Time Kebakaran	< 10 Menit	Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Terlaksananya Koordinasi Ketahanan Pangan	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga Dan Akses Pangan	100%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penguatan Cadangan Pangan	10 Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penguatan Cadangan Pangan	10 Ton	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 3	Peningkatan Ketahanan Pangan	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Keamanan Pangan	85%	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan
Prioritas 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Terlaksananya Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Dasar Dan Non Gedung Perkantoran	2 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah	1 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	Tersusunnya Dokumen Teknis Rencana Pengadaan Tanah	1 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya Fasilitasi Dan Pendampingan Pengadaan Tanah Gedung Perkantoran/ Fasilitas Pemerintah Bagi Masyarakat Dan Non Infrastruktur Dasar	2 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 3	Pembangunan Dan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Bangunan Dan Gedung	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Terlaksananya Fasilitas Dan Pendampingan Pengadaan Tanah Infrastruktur Dasar Dan Non Gedung Perkantoran	2 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	Program Penatagunaan Tanah	Tersusunnya Laporan Kebutuhan Lahan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Untuk Pembangunan	1 Paket	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan
Prioritas 3	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	78 Titik Pantau	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Optimalisasi Fungsi Analisis Laboratorium Lingkungan Hidup	30 Alat, Pemeliharaan 30 Alat Lab, 5 Parameter Terakreditasi	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	78 Titik Pantau	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pilot Project Kampung Iklim (Kampung Hijau Di 7 Kecamatan)	1 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengelolaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Jumlah RTH Publik Yang Dibangun Dan Ditingkatkan Fungsinya	7 Kecamatan	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Luas Lahan Yang Dikonservasi Dan Pelaksanaan Program Kali Bersih Di Tiap Kecamatan	500 M3	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengelolaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Penanaman Terhadap Ruang Terbuka Hijau Yang Harus Ditanami	1,3 Km	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengelolaan RTH	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Taman Terpelihara	100%	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap B3 Dan Limbah B3	50 Perusahaan	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Dan Pengelolaan Lingkungan	100%	Dinas Lingkungan Hidup

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 3	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat Terkait Pelestarian Lingkungan Hidup	80%	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Fasilitasi Peningkatan Nilai ADIPURA	76 Poin	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Peningkatan Edukasi Dan Komunikasi Masyarakat Di Bidang Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Jumlah Penghargaan Nasional Maupun Lokal Terkait Pelestarian Lingkungan Hidup	1 Orang Dan 3 Sekolah	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Penanganan Terhadap Pengaduan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan	78 Titik Pantau	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengembangan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengangkutan Sampah	70%	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 3	Pengelolaan Sampah Terpadu	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Pengurangan Sampah Melalui 3R	10%	Dinas Lingkungan Hidup
Prioritas 4	Pengembangan Data Dan Informasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota Tangerang Selatan	4 Dok	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Data Dan Informasi	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Ketersediaan Data Pendukung Perencanaan Dan Pengendalian Pembangunan Kota Tangerang Selatan	4 Dok	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 4	Optimalisasi Sistem Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Pengelolaan Dan Perlindungan Informasi Berklasifikasi	20%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 4	Optimalisasi Sistem Persandian	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Cakupan Penyiapan, Pemanfaatan Dan Pengembangan SDM Sandi, Materil Sandi Dan Jaringan Komunikasi Sandi	20%	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Prioritas 4	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Administrasi Umum	Cakupan Laporan Keuangan Di SKPD Sesuai Ketentuan	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Pelayanan Administrasi Dan Sarana Prasarana Perkantoran	Program Administrasi Umum	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Sistem Manajemen Sumber Daya Aparatur	Program Administrasi Umum	Cakupan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Di SKPD	100%	Sekretariat Daerah

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Administrasi Umum	Cakupan Perencanaan Pembangunan Di Setiap SKPD Sesuai Ketentuan	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Program Administrasi Umum	Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Kedinasan KDH/WKDH	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Penguatan Kelembagaan Dan Tata Kerja Organisasi Pemerintah Daerah	Program Administrasi Umum	Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Pemerintah Daerah	1 Dok	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Peningkatan Peran Kecamatan Dan Kelurahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Wilayah Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Dan Pembinaan Perangkat Kecamatan Dan Kelurahan	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Peningkatan Kolaborasi Dan Kerjasama Pembangunan Dengan Dunia Usaha, Perguruan Tinggi Dan Masyarakat	11 Kali	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Pemberdayaan Masyarakat Rawan Sosial Dan Lembaga Kesejahteraan Sosial	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	7 Dok	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pembentukan Peraturan Daerah	12 Raperdaraperda	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Data Dan Informasi	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Data Dan Informasi SKPD	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Pemetaan Wilayah	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Cakupan Perencanaan Pembangunan Di Setiap SKPD Sesuai Kebutuhan	100%	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Rapat Koordinasi Forum Ekonomi Daerah	4 Dok	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Kerjasama Pembangunan Dan Kewilayahan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Rapat Koordinasi Pembinaan BUMD Dan BLUD	4 Dok	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Jumlah Rapat Koordinasi TPID Dan Jumlah Pendataan/ Pencacahan	4 Dok	Sekretariat Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Administrasi Umum Sekretariat Dprd Kabupaten/Kota	Cakupan Laporan Keuangan Di SKPD Sesuai Ketentuan	100%	Sekretariat Dprd
Prioritas 4	Fasilitasi Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Fungsi Pengawasan	100%	Sekretariat Dprd

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 4	Fasilitasi Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Anggaran	100%	Sekretariat Dprd
Prioritas 4	Fasilitasi Tugas Dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Perda / Non Perda	100%	Sekretariat Dprd
Prioritas 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan	6 Dokumen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Tersedianya Dokumen Evaluasi Pencapaian Program RPJMD	1 Dok	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai Ketentuan	5 Dokmen	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Dokumen Raperda APBD Sesuai Ketentuan	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Prioritas 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Prioritas 4	Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Tersusunnya Laporan Pengendalian Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Ketentuan	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Prioritas 4	Peningkatan Pengelolaan Aset Daerah	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersusunnya Laporan Neraca Aset Sesuai Ketentuan	100%	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Prioritas 4	Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Pengembangan Dan Pemeliharaan Sistem Pengendalian, Pengelolaan Keuangan Dan Pajak Daerah	100%	Badan Pendapatan Daerah
Prioritas 4	Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Terealisasinya Target Pajak Daerah	100%	Badan Pendapatan Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Program Kepegawaian Daerah	Persentase ASN Yang Terlayani Dalam Data Dan Informasi Manajemen ASN	100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Prioritas 4	Pengembangan Manajemen Kepegawaian	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN Yang Terlayani Dalam Data Dan Informasi Manajemen ASN	100%	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan
Prioritas 4	Penelitian Dan Pengembangan	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Jumlah Kajian Penelitian Dan Pengembangan	7 Kajian	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Prioritas 4	Pengembangan Pemetaan Wilayah	Program Pengelolaan Perbatasan	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Dalam Pengembangan Pemetaan Wilayah	100%	Sekretariat Daerah

Prioritas	Program RPJMD 2021	Program RPJMD 2021 (Kepmendagri 050-3708)	Indikator Program	Target RPJMD 2021	OPD Penanggungjawab
1	3	4	5	6	7
Prioritas 4	Peningkatan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100%	Inspektorat
Prioritas 4	Peningkatan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	100%	Inspektorat

4.2.4. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, serta memperhatikan arah kebijakan nasional Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan tabel 4.5 berikut:

Tabel 4.5. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Nasional (RKP Tahun 2021)

Prioritas Nasional Tahun 2021		Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021			
		Prioritas	Bidang Urusan	Program	
1	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	4	Penguatan Kualias Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				Sekretariat daerah	Administrasi Umum
				Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
				Kesatuan bangsa dan politik	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
					Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
					Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya					
3	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing	1	Pugutan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan
				Kesehatan	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					Memenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Memenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Sosial	Penanganan Bencana
					Rehabilitasi Sosial
					Pemberdayaan Sosial
				Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Ada
5 6 7	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayan dasar Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	3	Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
					Penataan bangunan gedung
					Penyelenggaraan penataan ruang
					Pengembangan Permukiman
				Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan
Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)				

Prioritas Nasional Tahun 2021		Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021		
		Prioritas	Bidang Urusan	Program
			Lingkungan Hidup	Pengelolaan Persampahan
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
				Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
				Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
1 Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan 2 Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan	2 Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal
			Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
				Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
				Pengembangan UMKM
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
			Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
			Industri	Perencanaan Dan Pembangunan Industri
			Perdagangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
				Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
				Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
				Pengembangan Ekspor
			Pangan	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
				Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan				
Pertanian	Penanganan Kerawanan Pangan			
	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian			
				Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Prioritas Nasional Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021		
	Prioritas	Bidang Urusan	Program
		Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Pemasaran Pariwisata

4.2.5. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan Terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan dan sejalan tujuan sasaran pembangunan sesuai dengan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, serta memperhatikan arah kebijakan Provinsi Banten Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan tabel 4.6 berikut.

Tabel 4.6. Sinkronisasi Prioritas Kota Tangerang Selatan terhadap Prioritas Pembangunan Provinsi Banten

Prioritas Provinsi Banten Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021			
	Prioritas	Bidang Urusan	Program	
5 Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan	4 Penguatan Kualias Tata Kelola Pemerintahan	Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
		Sekretariat daerah	Administrasi Umum	
		Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	
		Kesatuan bangsa dan politik		Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
				Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
				Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya				
1 2 Mempercepat pemulihan Pandemi COVID 19 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Pugutan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial	Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan pendidik dan tenaga kependidikan	
		Kesehatan		Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
				Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
		Sosial		Penanganan Bencana
				Rehabilitasi Sosial
				Pemberdayaan Sosial
		Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Ada

Prioritas Provinsi Banten Tahun 2021		Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021			
		Prioritas	Bidang Urusan	Program	
3	Memperkuat Infrastruktur untuk Interkoneksi wilayah dan daya saing daerah	3	Pengembangan Infrastruktur dan Penataan Ruang	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penyelenggaraan Penataan Ruang
					Penataan bangunan gedung
					Penyelenggaraan penataan ruang
					Pengembangan Permukiman
				Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengembangan Perumahan
				Perhubungan	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Lingkungan Hidup	Pengelolaan Persampahan
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
					Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
					Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
					Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)
					Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
					Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat					
4	Memacu Pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan	2	Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat	Penanaman Modal	Pelayanan Penanaman Modal
				Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
					Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
					Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
					Pengembangan UMKM
					Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
					Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
				Industri	Perencanaan Dan Pembangunan Industri
				Perdagangan	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
					Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
					Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
Pengembangan Ekspor					
	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan				
Pangan	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat				

Prioritas Provinsi Banten Tahun 2021	Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan Tahun 2021		
	Prioritas	Bidang Urusan	Program
			Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan
		Pertanian	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Pariwisata	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
Pemasaran Pariwisata			

Berdasarkan uraian **Tabel 4.5 dan Tabel 4.6** diatas dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan Kota Tangerang Selatan dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan telah sejalan dengan tujuan sasaran pembangunan RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, serta telah memperhatikan arah kebijakan Provinsi Banten Tahun 2021 dan arah kebijakan Nasional Tahun 2021 sebagaimana ditunjukkan tabel 4.7 berikut :

Tabel 4.7. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tangerang Selatan Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi dan Nasional

No	Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Banten		Prioritas Pembangunan Kota Tangerang Selatan
1	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	1	Mempercepat pemulihan Pandemi COVID 19	2	Penguatan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat
2	Pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan				
3	Peningkatan Sumberdaya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing	2	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia	1	Penguatan Kualitas Layanan Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial
4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	5	Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan	4	Penguatan Kualias Tata Kelola Pemerintahan
5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	3	Memperkuat Infrastruktur untuk Interkoneksi wilayah dan daya saing daerah	3	Pengembangan Kualitas Infrastruktur dan Penataan Ruang
6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim				
7	Stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik	4	Memacu Pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor unggulan		

4.2.6. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Perubahan RKPD 2021 hanya mengakomodasi perubahan prioritas termasuk lokasi terhadap Pokok-Pokok Pikiran yang telah disusun pada RKPD 2021, untuk itu tidak ada penambahan terkait pokok-pokok pikiran baru dalam Perubahan RKPD 2021.

Adapun pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan pada RKPD murni lalu dibagi menjadi dua kelompok yaitu fisik dan non fisik, sebagaimana tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 4.8. Rekapitulasi Usulan Reses Dewan

Usulan	Jumlah Usulan	Jumlah Anggaran (Rp)	Persen
Fisik	1.756	258.171.831.463	98,33%
Non Fisik	74	4.375.000.000	1,67%
Total	1.830	262.546.831.463	100,00%

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

5.1. Rencana Perubahan Pendanaan Daerah Tahun 2021

Dalam struktur APBD Perubahan Tahun 2021, hampir semua Perangkat Daerah mengalami pengurangan pagu kegiatan. Untuk lebih jelasnya mengenai Rancangan Belanja Perangkat Daerah dalam perubahan RKPD Tahun 2021 pada masing-masing Perangkat Daerah di Kota Tangerang Selatan dan rekapitulasi program dan kegiatan dalam perubahan RKPD TA 2021 dapat dilihat pada **Tabel 5.1** dan **Tabel 5.2** berikut:

Tabel 5.1. Rancangan Belanja Perangkat Daerah Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021

Perangkat Daerah	APBD 2021	Pergeseran Tahap 3	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2021	Selisih
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	652.913.706.686	629.030.839.186	647.717.887.051	18.687.047.865
Dinas Kesehatan	512.638.451.591	622.441.283.865	722.879.844.879	100.438.561.014
Dinas Pekerjaan Umum	338.527.804.014	356.610.345.018	354.010.345.018	- 2.600.000.000
Dinas Bangunan Dan Penataan Ruang	385.164.764.240	418.745.448.808	396.043.687.886	- 22.701.760.922
Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan	127.908.091.827	139.991.780.019	145.045.830.457	5.054.050.438
Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	17.730.212.023	17.560.269.023	20.482.463.117	2.922.194.094
Satuan Polisi Pamong Praja	18.379.882.033	18.020.296.033	20.725.599.676	2.705.303.643
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.265.044.205	13.265.044.205	12.911.469.449	- 353.574.756
Dinas Sosial	15.326.317.641	14.783.057.941	12.996.603.673	- 1.786.454.268
Dinas Ketenagakerjaan	18.665.711.049	17.158.580.049	15.322.490.487	- 1.836.089.562
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana	23.755.901.283	22.585.249.683	21.656.933.046	- 928.316.637
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan	24.585.247.050	23.347.274.050	20.099.776.779	- 3.247.497.271
Dinas Lingkungan Hidup	192.581.143.044	198.088.427.444	192.411.112.435	- 5.677.315.009
Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	16.716.883.355	16.287.955.355	16.651.753.137	363.797.782
Dinas Perhubungan	25.963.298.125	25.788.966.125	29.750.709.833	3.961.743.708

Perangkat Daerah	APBD 2021	Pergeseran Tahap 3	Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2021	Selisih
Dinas Komunikasi Dan Informatika	60.788.169.206	59.825.644.206	60.834.687.699	1.009.043.493
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	22.511.784.601	20.614.676.801	19.476.782.417	- 1.137.894.384
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.745.145.286	29.306.687.686	28.044.576.643	- 1.262.111.043
Dinas Pemuda Dan Olahraga	32.767.468.584	30.490.496.484	30.627.516.086	137.019.602
Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah	15.003.325.432	14.768.380.032	13.480.569.332	- 1.287.810.700
Dinas Pariwisata	12.896.313.918	12.285.269.918	11.950.161.455	- 335.108.463
Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	16.425.906.274	15.919.934.274	15.928.571.274	8.637.000
Sekretariat Daerah	99.350.079.964	96.184.863.659	111.886.597.107	15.701.733.448
Sekretariat Dprd	129.389.224.692	128.797.149.492	128.835.173.960	38.024.468
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	28.636.708.259	26.807.357.259	25.561.964.640	- 1.245.392.619
Badan Pendapatan Daerah	74.296.289.122	65.199.794.092	63.741.749.770	- 1.458.044.322
Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	45.249.262.526	144.277.668.736	145.662.115.207	1.384.446.471
Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	47.791.257.420	45.657.636.420	43.416.517.100	- 2.241.119.320
Inspektorat	27.012.318.884	26.392.435.484	27.182.089.809	789.654.325
Kecamatan Ciputat	25.205.828.152	23.801.691.152	24.896.604.577	1.094.913.425
Kecamatan Ciputat Timur	22.850.131.235	21.812.371.335	23.868.604.122	2.056.232.787
Kecamatan Pamulang	33.352.483.968	31.532.315.068	35.060.534.579	3.528.219.511
Kecamatan Serpong	28.632.516.483	27.471.173.483	27.532.949.337	61.775.854
Kecamatan Serpong Utara	23.390.200.453	22.214.595.753	24.200.804.717	1.986.208.964
Kecamatan Pondok Aren	37.857.108.443	35.776.755.601	37.408.605.676	1.631.850.075
Kecamatan Setu	21.661.549.575	21.057.052.275	22.373.170.688	1.316.118.413
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	26.203.256.499	25.444.489.499	24.563.958.499	- 880.531.000
Jumlah	3.245.138.787.142	3.459.343.255.513	3.575.240.811.617	115.897.556.104

Tabel 5.2. Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub-Kegiatan dalam Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2021

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.997.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.883.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.883.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	7.053.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.053.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.614.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.497.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	347.022.831.054
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	217.075.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.027.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	22.314.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.574.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.163.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.231.550.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.870.385.070
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	92.565.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.946.341.280

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.530.376.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.05 Pembangunan Perpustakaan Sekolah	553.371.300
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	4.683.235.950
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	1.029.528.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.153.116.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah	5.909.406.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	2.228.378.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	7.089.186.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	9.317.060.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	1.423.285.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	493.883.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	234.056.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	78.331.014.952
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	96.518.250
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.155.786.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.431.422.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah	3.001.526.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah	315.264.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruang	1.500.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	3.124.730.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	138.010.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	399.990.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.132.244.350
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	280.822.300

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	28.321.496.009
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	341.437.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	70.000.160
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	996.860.350
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	1.031.242.488
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD	1.857.037.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.08 Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD	415.998.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD	304.114.200

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	157.408.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	300.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	32.245.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	24.863.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD	15.786.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150.890.198
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	300.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.07 Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	130.441.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	796.106.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	200.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	2.690.735.180
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	260.578.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	3.550.057.300
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	106.127.503.760

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	525.650.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.372.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.089.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.600.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	16.352.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.943.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	77.566.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	67.547.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	102.138.686.326
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	7.320.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.362.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.320.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.754.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	7.320.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	143.243.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.320.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	11.200.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	36.800.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20.778.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.02.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.380.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	494.109.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	29.324.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	684.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19.010.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.468.816.098
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	431.288.510
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	260.488.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	12.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.561.875.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.250.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	8.296.000.674

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	41.400.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	70.194.941.827
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	273.380.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.358.030.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.891.320.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	376.619.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	131.765.482.638

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	1.940.699.580
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	34.000.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	697.734.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	54.594.862.188
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	88.434.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin	20.674.260.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Pakai	26.250.810.762
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.152.611.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.20 Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	4.276.945.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.21 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	219.832.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	1.104.574.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	754.322.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	78.973.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	829.197.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	434.738.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	136.669.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	502.738.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	43.157.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	41.742.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	135.874.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	264.225.625
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	127.294.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	6.016.994.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	10.824.727.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.936.307.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	222.931.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	3.653.061.393
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	2.447.679.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	41.834.200

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	675.670.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.21 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	20.936.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	32.542.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.23 Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	3.337.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.24 Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	2.071.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	4.641.890.700

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	84.103.342.480
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.27 Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	5.969.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.28 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	10.680.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	7.276.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Puskesmas	20.852.839.060
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	16.081.069.900

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	1.142.771.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	248.806.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	21.977.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	165.963.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	52.532.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	57.420.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	682.290.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	13.354.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.02 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	52.381.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	1.082.362.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	6.538.965.526

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	48.921.576.132
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.097.648.760
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4.480.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1.02.04.2.01.03 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	4.480.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	114.487.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	59.470.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	347.452.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.02 Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.02.01 Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	67.836.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02.0.00.0.00.02.0000 DINAS KESEHATAN	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	7.836.016.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	333.268.156
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	26.394.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	48.600.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	22.534.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	22.790.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	202.346.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.160.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.544.597.357
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	30.684.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	41.014.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	171.388.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.139.200

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	135.774.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	30.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	220.008.300
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46.844.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	706.559.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52.199.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	284.739.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	265.911.978
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	345.209.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	81.601.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.544.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	766.896.735
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	98.895.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.069.341.780

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.337.550.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.565.310.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	397.237.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1.283.635.855
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.03 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	1.019.114.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.09 Pembangunan Tanggul Sungai	19.938.731.033
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.13 Pembangunan Stasiun Pompa Banjir	831.209.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.14 Pembangunan Polder/Kolam Retensi	17.363.557.005
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.53 Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	7.062.825.481
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	2.163.014.073
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.03.02.2.01.61 Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	477.280.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	326.495.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.03 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	493.109.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	4.032.938.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.07 Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	5.828.247.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.10 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Sistem Drainase Lingkungan	4.239.572.570

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.12 Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	86.910.299.855
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.14 Rehabilitasi Saluran Drainase Lingkungan	6.872.460.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.06.2.01.16 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Lingkungan	1.473.126.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	4.177.788.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	252.700.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan	489.079.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan	118.423.331.140
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan	30.313.326.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.12 Pembangunan Jembatan	7.028.880.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.000.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.03 Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	201.868.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.06 Fasilitas Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi	138.822.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	303.029.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.02 Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	279.379.900
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.06 Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	69.999.900
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.07 Penyusunan Data dan Informasi Ketersediaan/Penggunaan Material dan Peralatan	140.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.02 Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.03.11.2.02.08 Penyusunan Data dan Informasi Profil Pekerjaan Konstruksi	349.121.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.01 Penyusunan SOP/Pedoman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.02 Bimbingan Teknis tentang Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	264.087.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.0.00.0.00.04.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.11.2.04 Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	1.03.11.2.04.03 Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	148.779.800
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru	25.321.657.260
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	132.530.410
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.471.750.292
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	280.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	453.272.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.18 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	13.676.687.236
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.598.599.704
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	1.606.456.590
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	180.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.29 Pemeliharaan Rutin Bangunan Gedung dan Ruangan	500.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.30 Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	495.714.971
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	87.390.787.403
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	698.215.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.18 Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.138.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.01.19 Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	800.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	356.825.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	41.690.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	41.690.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	37.446.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	37.446.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	278.852.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	788.935.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.217.552.670
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	71.698.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	162.028.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.139.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	135.774.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.359.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.550.970.873
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	15.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	145.179.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.795.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	502.610.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.03.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		UMUM DAN PENATAAN RUANG				
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	948.093.366
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.277.824.660
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.864.360.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.700.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.03.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	2.699.080.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	1.453.508.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.02 Supervisi Pembangunan/Peningkatan/ Perluasan/Perbaikan SPAM	935.074.900
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.03 Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	1.131.622.084
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	1.03.03.2.01.05 Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	151.349.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.877.464.300
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.04 Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	1.344.779.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.03.05.2.01.11 Supervisi Pembangunan/Rehabilitasi /Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Permukiman	488.670.700
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	1.906.035.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	219.879.427.767
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	560.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	191.960.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	250.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	1.518.716.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03.1.01.1.02.05.0000 DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	196.360.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	7.157.365.900

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	953.813.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.080.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.180.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	35.240.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	34.620.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	34.380.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	54.093.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	146.707.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.857.073.103
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.676.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	16.947.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	28.047.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	36.830.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.620.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	29.602.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24.762.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.04.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	359.040.732
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.844.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	172.889.125
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	93.699.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	74.830.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	64.142.300
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	804.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	68.030.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25.200.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.04.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	39.368.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.040.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	297.971.418
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.831.985.910

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	325.330.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	819.550.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	946.719.285
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.900.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	106.676.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	30.321.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	183.139.880
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	909.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	1.04.02.2.05.01 Fasilitas Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	75.515.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	1.04.02.2.06.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	412.870.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.07 Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	1.04.02.2.07.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	80.515.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.01 Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh	157.133.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.02 Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	465.300.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.03 Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	76.888.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.02 Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.02.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	16.253.708.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh	1.757.588.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02 Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	14.967.673.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.01 Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2.087.774.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	17.015.222.904
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	76.930.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.06.2.01 Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Kecil	1.04.06.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	748.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	71.510.200
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	13.204.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	13.204.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	13.204.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	13.204.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.621.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.877.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.234.647.770

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	35.028.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.078.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	46.448.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	421.554.918
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	34.019.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	152.300.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	574.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	237.560.489
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.110.195.440
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	284.680.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.724.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	1.605.075.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	97.160.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	239.767.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.07.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	10.081.400.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	141.905.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.750.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.750.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.750.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		PERLINDUNGAN MASYARAKAT				
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.750.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	121.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.315.077.696

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	9.922.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.418.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4.197.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.739.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.040.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	28.721.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.463.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.105.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	57.549.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	43.368.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	25.630.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	24.707.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	167.622.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	163.225.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	23.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	150.036.140
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	9.887.713.840
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.411.210.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.625.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	110.946.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	136.060.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.02 Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	193.850.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	35.420.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	157.500.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	296.950.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	55.100.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.0.00.0.00.09.0000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	57.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	195.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.04 Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	155.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.01.05 Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	100.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.02.2.02 Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	1.04.02.2.02.05 Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana	222.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	177.846.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	25.962.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	24.162.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.930.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.930.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	33.830.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	41.340.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.814.990.722
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	124.946.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12.995.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.028.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4.198.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22.901.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	52.527.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.405.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	105.125.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	242.159.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.463.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	737.945.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.731.400
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	568.567.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	115.664.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	352.120.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	353.320.347
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.165.332.880
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	534.590.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	54.832.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	71.574.600
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	50.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	376.157.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	352.012.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	200.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.02 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	303.172.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	994.713.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05.1.04.0.00.08.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	230.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.769.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.210.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.090.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.050.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.200.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.790.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	159.927.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.319.549.433
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.350.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.350.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.135.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.855.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	16.491.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.894.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.925.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.06.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.811.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.06.01.2.03.04 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	10.990.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.06.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	10.950.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	18.450.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.06.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	56.550.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	27.350.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	87.415.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	32.299.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	39.295.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.700.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	24.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	217.978.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	40.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	130.822.080
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.928.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.531.919.160
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530.460.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	11.371.700
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	315.878.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	19.500.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	832.155.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	185.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan	150.000.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	42.912.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	76.570.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan	141.580.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan	68.078.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	89.730.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	36.540.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.02.14 Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	25.780.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	261.009.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan	253.697.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	59.120.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	417.586.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	149.543.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.02 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	56.815.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06.0.00.0.00.11.00 DINAS SOSIAL	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	1.06.07.2.01 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1.06.07.2.01.03 Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	168.235.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	244.850.500
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	38.090.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	65.181.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	86.933.000
1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	146.749.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	136.258.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.01.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	223.587.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	391.621.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.22.02.2.02.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	105.036.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.04.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.04.2.01.03 Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	156.006.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01.2.22.0.00.01.00 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya	62.695.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	614.490.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	48.597.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	42.597.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	56.717.086.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04.2.15.2.10.06.0000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	7.437.482.100
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	119.281.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	70.194.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	144.704.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.790.974.896
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.666.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.816.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.07.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.944.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.07.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35.381.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	245.344.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	102.628.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	122.647.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	307.364.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	455.356.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	185.050.875
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	269.656.141
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.638.553.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	545.914.575
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.07.01.2.13 Penataan Organisasi	2.07.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	67.536.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	84.877.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	1.377.116.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	2.07.03.2.01.02 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	211.748.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	150.096.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi	151.144.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.04 Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	147.053.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	126.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.01 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	68.870.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja	51.930.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	64.912.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.01 Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	24.880.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.02.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	79.550.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	70.717.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.01 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	24.880.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	16.130.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja	53.144.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	75.937.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.02 Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	58.285.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	80.470.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	95.681.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	56.502.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	71.202.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	300.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	71.620.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	109.577.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	87.910.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07.0.00.0.00.12.0000 DINAS KETENAGAKERJAAN	2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	434.246.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.893.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.952.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.010.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.935.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.879.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14.622.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.830.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.047.467.863
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	52.332.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4.380.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.460.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	730.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.950.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.08.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	730.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.340.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	188.457.150
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.576.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.780.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	182.358.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.08.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	224.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	48.056.733
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	78.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.506.600.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	995.120.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.840.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.08.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	29.896.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	10.550.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	36.359.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	21.443.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.01.04 Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	8.897.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	387.493.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	30.588.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	145.673.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	112.615.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	704.199.100
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	28.107.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	2.08.04.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.243.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	10.590.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	39.797.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	23.850.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	281.733.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	49.793.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	216.574.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	101.027.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	72.760.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.01 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	2.14.02.2.01.02 Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	162.894.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.14.02.2.02.09 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	171.003.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	7.075.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	146.188.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program KKBPK	15.487.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.01 Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	14.095.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	9.011.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	292.845.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01 Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	387.775.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	834.223.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.05 Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	9.892.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	1.048.234.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	59.641.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	57.116.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria	11.730.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBP di Kampung KB	228.383.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.01 Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	6.663.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	261.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.06 Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	757.320.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	73.022.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08.2.14.2.13.13.0000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGA ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	2.14.04.2.01.08 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	36.845.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	122.144.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.650.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.600.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	141.075.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.960.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.315.238.350
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.244.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6.223.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.228.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.727.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.234.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	50.085.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.09.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.244.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32.375.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.09.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	32.520.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	38.520.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	252.916.248
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.629.787.143

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	717.910.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	38.200.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.09.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	152.799.638
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	35.835.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik	27.175.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	46.480.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	10.078.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	10.157.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	19.930.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	25.129.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia	42.680.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	5.289.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	1.036.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	12.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	41.741.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengankaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.209.106.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	274.343.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	88.580.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	5.342.250
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	2.09.04.2.02.02 Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	60.320.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	92.730.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	24.483.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	31.174.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	137.936.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	290.902.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	130.010.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.539.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	7.165.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	156.238.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.403.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.086.205.148

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3.460.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	29.850.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	6.530.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	16.211.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.835.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3.265.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.265.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.11.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	59.961.028

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.11.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.371.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	693.027.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.645.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	112.044.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	428.241.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.11.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	135.482.568
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.300.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	696.277.946
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.605.486.920
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	292.180.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	3.155.528.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	235.983.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.11.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57.195.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	265.582.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	922.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	105.567.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	570.794.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	684.930.384
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	2.671.493.671

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	5.828.784.950
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	3.308.032.716
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	1.490.092.253
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	364.054.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	2.11.05.2.01 Penyimpanan Sementara Limbah B3	2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	319.066.250

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	498.405.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	2.11.06.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	474.457.750
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	80.840.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	291.857.375

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	220.925.625
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	49.015.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	459.213.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	111.315.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	74.251.436.911
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	10.159.666.005
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	55.467.124.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	347.819.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11.0.00.0.00.14.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP	2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	11.409.138.535
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	111.287.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	50.350.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.100.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	149.476.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.299.246.637
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.580.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.190.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.12.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	28.500.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.12.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	28.750.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.12.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	207.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	29.065.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.331.257.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	44.789.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	115.600.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	173.350.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.013.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	183.665.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.208.687.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	661.560.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	37.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	12.929.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	235.658.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.06 Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	13.805.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2.12.02.2.01.08 Pengumpulan, Analisis, dan Diseminasi Data terkait Pendaftaran dan Perkembangan Penduduk	15.613.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	177.592.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.02 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	48.644.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Admuduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	79.077.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.03 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	50.868.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12.0.00.0.00.15.00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	30.300.300
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.406.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	17.585.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12.105.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	40.829.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.101.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8.027.141.561
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.788.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	13.380.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.350.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	10.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	8.928.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	35.721.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	48.484.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	46.732.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	18.910.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	76.550.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.15.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	150.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	328.630.578
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	336.147.870
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.511.197.340
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.237.627.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	59.921.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	127.869.506
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	290.239.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	146.714.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	412.985.878
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	23.760.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	119.688.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	509.477.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	1.000.600.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	278.750.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	2.15.02.2.05.09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	13.152.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	96.656.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.244.180.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin	44.244.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	28.496.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	123.165.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.12 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.12.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Pedesaan Kewenangan Kabupaten/Kota	73.741.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15.0.00.0.00.15.0000 DINAS PERHUBUNGAN	2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.02.2.14 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.15.02.2.14.01 Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	18.055.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	118.864.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3.190.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.425.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	3.425.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	89.941.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	40.662.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.053.453.086
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10.560.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	13.280.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	15.350.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.680.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.558.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	27.560.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.16.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	8.370.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.16.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	75.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	43.966.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	884.837.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	453.880.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	251.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	197.100.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680.400.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	58.067.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.499.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	161.664.843
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.295.003.080
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	259.370.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	240.420.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.251.700
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	397.655.190
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	133.975.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.03 Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	195.584.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	913.255.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	7.760.012.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik	234.480.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	33.510.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.02 PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	1.129.465.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	31.528.833.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.16.03 PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	2.16.03.2.02 Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.303.920.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	394.845.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral	126.840.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	155.750.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	193.557.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16.2.20.2.21.16.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.21.02.2.01.04 Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	273.226.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	182.424.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	34.300.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	18.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	9.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.794.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	54.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.268.476.897
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.480.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	18.090.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	53.734.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	11.526.400
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	6.200.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	14.127.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.17.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	9.707.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12.399.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.944.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	131.452.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	211.543.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	485.828.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.17.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.200.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.500.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	267.074.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.018.700.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	366.680.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	54.999.820
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	33.751.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.17.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	38.282.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	200.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	79.895.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	34.300.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	91.630.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	474.490.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.17.04.2.01.02 Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	231.974.300
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	557.296.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	2.284.642.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	809.896.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	220.420.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	123.302.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	366.376.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17.0.00.0.00.17.00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	2.185.345.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	107.935.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.500.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.650.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	11.480.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	18.275.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.515.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.209.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.665.020.722
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.435.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1.977.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.825.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8.106.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	4.449.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	62.206.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.804.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.498.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	2.18.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	19.352.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.575.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	777.294.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	426.139.766
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	301.588.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	488.260.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54.276.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.18.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	112.290.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.149.107.232
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	275.245.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.264.597.923
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	410.910.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	889.400.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	389.090.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	97.346.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	48.540.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	96.975.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	230.154.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	321.154.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	384.724.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	308.587.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	260.786.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	50.959.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	214.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	107.503.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18.0.00.0.00.18.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	244.837.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	322.625.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.118.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.118.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.118.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.118.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.115.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.474.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.845.427.315
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.491.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	32.900.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	26.004.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22.793.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	21.882.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	22.540.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	2.19.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	30.232.300
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	226.826.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	8.800.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	116.929.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.106.181

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
		KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30.415.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.087.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	18.350.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	292.714.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.436.151.880
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	471.584.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.19.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	22.108.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	147.978.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	354.569.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	251.288.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.04 Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	132.538.200
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.06 Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	145.650.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.07 Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	98.780.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	449.108.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	1.223.014.850
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	411.560.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	3.798.785.392

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	300.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.01 Seleksi Atlet Daerah	300.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	71.336.800
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	2.19.03.2.03.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	192.116.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.01 Standardisasi Organisasi Keolahragaan	50.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan	7.497.833.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi	61.567.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	1.564.360.168
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	350.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.03 Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	150.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19.0.00.0.00.19.00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	292.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	47.526.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.562.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4.562.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.562.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.562.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	66.885.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.822.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.350.565.333
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.574.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.986.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.643.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.367.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.23.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.993.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.23.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3.019.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.23.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.389.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.130.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.728.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.015.500
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	123.965.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.167.880

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	1.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	122.140.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	3.483.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.23.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	169.741.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	570.126.619
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.530.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.922.778.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	704.660.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	53.065.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	808.071.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	24.610.600
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka	299.048.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	92.070.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	91.560.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	110.348.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	198.504.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	244.804.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	234.952.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	13.368.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24.2.23.0.00.20.0000 DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	30.685.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	690.000.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	99.349.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	20.104.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	41.801.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	97.963.300
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	39.482.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	143.702.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	69.758.000
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	10.903.001
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	50.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	50.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	286.870.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.02 Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	63.690.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	208.676.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.03 Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.25.04.2.03.01 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	37.120.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.01 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	28.140.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	56.988.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	3.25.05.2.01.02 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	39.100.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	70.701.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	348.380.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	51.254.900
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain	3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	154.370.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	15.626.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.01.03 Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	10.341.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.02 Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.02.02 Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	46.392.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	137.753.950
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	48.868.200
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	8.989.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	3.27.04.2.04.04 Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	81.465.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	88.959.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	2.09.3.27.3.25.22.00 DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	1.191.600.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	103.900.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	20.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	20.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.624.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	212.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.930.381.712
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.290.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	20.848.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.765.200
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.902.800
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.540.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.526.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.26.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.069.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	353.659.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.26.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	92.859.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.667.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	622.574.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.565.423
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.26.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	16.411.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.665.567.720
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.26.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	494.260.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	530.296.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	288.500.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	161.798.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	280.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.02 Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	217.290.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.03 Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	142.451.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	42.651.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	20.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	171.925.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.05 Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	245.780.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26.0.00.0.00.21.0000 DINAS PARIWISATA	3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.06 Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	159.560.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang	3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	17.740.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	17.740.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	3.30.02.2.06 Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.02.2.06.03 Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	72.682.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	132.120.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	512.290.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.149.590.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	16.706.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	27.919.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	3.30.04.2.01.03 Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	121.065.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	5.400.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	100.544.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	28.537.500
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	3.30.04.2.03 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3.30.04.2.03.02 Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	38.165.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	35.886.800
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional	203.464.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.03 Pameran Dagang Lokal	189.303.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.05 Peningkatan Citra Produk Ekspor	41.334.200

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	21.870.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	151.483.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	104.514.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	26.170.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	55.300.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	113.902.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.364.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14.770.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.624.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.624.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	29.793.800
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.31.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	81.689.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.388.667.374
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.170.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.731.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.174.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.470.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1.810.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.950.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.31.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.910.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	3.31.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	17.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.31.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	37.500.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.31.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	22.838.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	61.088.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	49.747.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	97.021.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	26.601.600
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.000.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	19.994.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	139.630.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.31.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	109.900.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.587.100.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	588.460.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	167.900.200
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	116.818.200
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	37.790.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.01 Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	35.025.000
3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31.3.30.0.00.23.0000 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas	19.185.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	131.045.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.460.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3.920.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.270.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	36.634.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.383.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	25.874.516.717
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35.628.800
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	27.318.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.998.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	9.867.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	26.716.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6.998.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	87.780.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	9.850.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	14.826.800
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai yang Pensiun	4.341.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	3.903.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.08 Pemindehan Tugas ASN	3.903.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	66.610.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	549.662.500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14.110.273.118
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	629.191.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.857.132.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	407.250.100
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	637.093.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.156.010.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	155.035.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	9.797.817.432
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.393.726.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	22.781.410.581
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	142.552.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	266.030.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.172.616.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	185.487.176
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	153.972.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2.270.954.183
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	2.964.863.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	2.616.830.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.12 Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.03 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	398.492.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	737.129.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	202.422.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	540.361.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.04 Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	132.839.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.13 Penataan Organisasi	4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	108.978.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan	1.005.606.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan	420.744.500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	419.835.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	279.198.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	611.950.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	147.549.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	336.123.500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	1.188.538.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum	1.561.027.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	450.839.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	215.080.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	98.050.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerjasama Daerah	4.01.02.2.04.03 Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	50.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	541.620.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	449.462.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	166.480.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	377.120.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	538.631.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	383.526.200
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	347.467.500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	304.940.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01.0.00.0.00.29.0000 SEKRETARIAT DAERAH	4.01 SEKRETARIAT DAERAH	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	251.716.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	66.696.600
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.424.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.224.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	16.424.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.332.500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	145.462.750
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.227.525.740
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.276.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10.812.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12.939.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.488.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	56.250.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	89.802.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3.223.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	88.851.500
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	80.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.987.395.360
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	639.795.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	468.261.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.620.694.940
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	52.300.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	316.648.100
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.883.996.392
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	10.289.404.880
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	309.306.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	589.720.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	784.235.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	717.051.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	107.905.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.02.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan	10.240.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	40.475.588.598
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	230.150.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	207.300.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD	222.936.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD	4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	2.149.292.400
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	380.744.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	839.580.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	519.375.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	474.972.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS	85.440.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	111.372.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD	102.712.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan	102.712.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan Anggaran	4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	24.583.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	58.504.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	58.504.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.03 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	58.504.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	58.504.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	23.826.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	4.02.02.2.03.08 Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	82.956.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD	1.500.000.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan	1.472.022.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	1.706.962.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	915.600.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	378.832.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD	4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD	35.810.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja dalam Daerah	345.744.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	29.178.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses	6.625.560.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD	10.942.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD	30.168.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.07 Pembahasan Kerja Sama Daerah	4.02.02.2.07.02 Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi	122.128.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	30.510.139.200
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.02 Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	58.540.000
4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02.0.00.0.00.28.00 SEKRETARIAT DPRD	4.02 SEKRETARIAT DPRD	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD	4.02.02.2.08.03 Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	156.310.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	238.105.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	7.499.566
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	12.379.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.612.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.664.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	47.384.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	112.549.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.655.841.854

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	54.732.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	69.300.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	11.550.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	34.650.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	372.750.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	27.200.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	21.798.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	61.260.460

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.624.722.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.356.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	441.720.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	184.130.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material	185.071.140
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu	57.600.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	868.626.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	20.628.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	199.500.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.970.950.020
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	928.820.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.01.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	579.109.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.02 Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	1.903.100.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	6.220.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	809.599.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	70.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.02 Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	57.468.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	888.676.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	82.181.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	43.124.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	58.766.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	287.260.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	432.012.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.962.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	48.527.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	137.591.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	90.953.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	226.884.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	34.514.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	167.780.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Wilayah (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	147.464.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	5.01.03.2.03.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Wilayah	140.730.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	21.296.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01 PERENCANAAN	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03.2.03.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	210.644.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	134.219.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.12 Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	81.844.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.14 Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	110.985.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	5.05.02.2.01.15 Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	30.192.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.10 Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	104.505.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	5.05.02.2.03.11 Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	95.300.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	226.037.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	120.110.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01.5.05.2.20.24.0000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbitangan	42.512.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.244.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	46.068.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.752.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43.606.635.250
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	41.072.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.460.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	18.450.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.362.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	61.480.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	49.820.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1.354.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	77.350.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	121.720.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	56.108.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.090.426.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	182.506.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	559.164.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	322.427.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.049.597.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	335.698.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	874.214.140
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	371.859.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3.291.512.080
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.618.460.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	158.844.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	329.644.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.01 Perencanaan pengelolaan pajak daerah	583.002.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	189.845.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1.918.267.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.04 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	326.119.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	822.527.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	46.008.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	55.100.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah	960.204.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	534.824.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	35.208.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah	1.980.257.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	353.898.200
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1.238.019.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.25.00 BADAN PENDAPATAN DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	220.241.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	80.811.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	11.997.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	9.699.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.468.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.758.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.521.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.544.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.307.746.164
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28.323.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	34.875.200
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.720.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	21.260.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13.433.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	13.517.200
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.995.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	7.929.900
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	232.576.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.128.163.319
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1.149.860.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	371.841.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	442.955.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	230.052.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	227.815.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	276.359.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	218.145.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	660.212.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	544.495.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1.378.173.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	5.681.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	33.102.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah	44.742.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	360.833.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	54.580.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	4.672.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	41.564.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.10 Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	222.477.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	373.792.700

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	87.192.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	403.701.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	391.576.200
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	207.700.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	368.530.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	38.755.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	124.498.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	125.037.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.02 Analisis Investasi Pemerintah Daerah	122.560.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	21.715.356.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	94.371.738.604
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	113.240.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah	305.397.200
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah	3.194.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah	471.600.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	574.750.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	930.429.820

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.11 Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	279.152.100
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02.0.00.0.00.26.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	5.02 KEUANGAN	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah	5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	228.208.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	88.533.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.324.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2.258.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.048.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1.980.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	55.616.200
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.924.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28.030.346.504
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4.762.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	15.550.600
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	11.910.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.453.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	5.267.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	9.706.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4.013.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	58.479.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	8.906.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	22.600.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	35.167.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	33.526.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	384.606.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	78.580.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	5.03.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	89.395.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	139.247.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	104.997.456
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.000.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.293.782.440

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	182.370.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	297.920.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	13.694.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.100.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	580.580.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.08 Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	401.206.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.262.800
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	171.520.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	1.251.099.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	347.573.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN	344.770.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.03 Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	546.569.400
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	180.059.500
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.03 KEPEGAWAIAN	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	301.870.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	499.897.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis	5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	29.310.000
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6.574.968.200

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03.5.04.0.00.27.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	5.04.02.2.02.08 Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitas, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerjasama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	31.764.400
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	155.228.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.107.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8.740.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	4.240.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	4.502.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.950.800
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.552.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	17.336.373.349
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	32.512.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	11.658.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	243.006.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.027.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	359.896.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	396.966.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	97.230.200
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	43.744.500
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.324.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	19.200.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.272.206.180

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	338.380.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	670.490.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	29.930.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	149.999.980
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	744.346.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	35.137.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja	22.189.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal	6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan	930.539.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	5.230.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	6.01.02.2.02.02 Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	3.010.893.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan	6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	57.452.000
6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01.0.00.0.00.30.00 INSPEKTORAT	6.01 INSPEKTORAT DAERAH	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	723.040.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60.280.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	15.941.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	15.915.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	15.915.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	15.915.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	22.260.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	71.844.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.929.214.955
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	14.200.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.477.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.477.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	10.477.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	17.192.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	17.192.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	112.756.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	25.864.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25.620.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38.800.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	367.474.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.894.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112.585.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	111.150.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	140.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	53.781.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	295.044.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	491.783.160

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48.623.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.948.316.360
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	530.880.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	32.330.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	99.744.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	56.433.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.200.002
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	23.440.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.866.195.200
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.02 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	17.161.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.037.369.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	104.459.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	154.409.200
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	54.700.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	570.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.02 Fasilitas Administrasi Tata Pemerintahan Desa	27.998.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.31.0000 KECAMATAN CIPUTAT	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.13 Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	40.290.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	104.448.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8.686.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35.032.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.117.684.422

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6.361.200
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	20.640.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.386.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	38.267.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	11.280.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	15.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.624.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	224.037.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	18.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	16.003.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	162.982.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	182.802.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.953.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130.877.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	11.900.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.487.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	14.546.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	303.331.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	623.580.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.200.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.788.629.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	21.140.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	190.740.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100.314.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	47.372.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	21.675.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	59.382.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.255.981.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.088.688.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	300.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	454.031.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	184.343.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	49.102.100
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	400.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.32.0000 KECAMATAN CIPUTAT TIMUR	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	91.997.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76.776.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	57.191.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	14.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	26.417.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	17.737.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	41.204.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.734.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12.358.102.831
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9.579.400

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	21.114.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	22.972.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	222.006.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	132.917.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	488.977.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	143.225.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	244.544.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	205.783.503

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100.800.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	175.137.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	161.117.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	874.767.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	140.008.560
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	536.154.562
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.092.841.573
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	370.180.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	133.812.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.200.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	37.350.100
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	54.160.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	67.246.200
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.342.769.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2.669.801.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	400.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	842.484.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	2.183.293.650
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	480.880.200

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.33.0000 KECAMATAN PAMULANG	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	36.457.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	64.405.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	21.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	21.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.135.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.135.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.480.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.080.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.441.927.551
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	15.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7.500.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	64.797.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	448.096.300
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	129.943.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	495.776.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	88.530.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	27.796.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	621.480.796
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	7.203.132.840
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	379.060.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.521.550
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	238.223.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	14.861.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	57.825.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	66.580.500

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02 Fasilitas Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	57.825.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.840.375.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.619.356.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	438.197.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	155.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	95.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	472.138.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.34.0000 KECAMATAN SERPONG	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	93.670.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.361.500
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12.202.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	12.144.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	12.032.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	12.124.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	45.430.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	79.734.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.954.707.317
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.550.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.724.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.512.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	65.402.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	66.797.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	586.045.300
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	66.313.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	329.425.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	67.647.691
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132.035.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	9.976.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.335.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	165.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	526.768.646
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	6.038.459.480
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	231.486.783
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	60.674.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	125.691.300
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	13.426.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	35.146.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	50.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.488.180.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.556.788.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	275.308.600

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	279.019.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	107.200.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	49.681.300
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	450.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.35.0000 KECAMATAN SERPONG UTARA	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	45.538.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.030.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4.508.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	4.289.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.025.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	6.034.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.298.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.684.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14.906.198.791
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3.078.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3.810.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	3.096.200
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.636.800
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.528.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	7.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	136.724.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.370.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	717.579.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	94.841.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155.060.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	238.152.238
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	151.569.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	11.506.040.185
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	98.220.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	172.570.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	98.113.461

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	44.087.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	44.233.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4.208.780.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3.415.232.400
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	345.996.600
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	153.272.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	47.464.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	643.672.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.36.0000 KECAMATAN PONDOK AREN	7.01 KECAMATAN	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	7.01.06.2.01.13 Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	24.578.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	52.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	8.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	8.000.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	8.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32.075.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.01 Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.990.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.319.804.983
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	9.590.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.675.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.280.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	7.670.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5.850.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	8.686.702.755
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50.835.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.01 Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	22.611.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	40.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.334.941.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1.353.516.200
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	210.491.750
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	249.084.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	140.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	7.01.03.2.03.05 Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	50.000.000
7 UNSUR KEWILAYAHAN	7.01.1.06.2.17.37.0000 KECAMATAN SETU	7.01 KECAMATAN	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	475.305.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	156.189.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10.830.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	10.830.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10.830.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.830.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	116.919.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.015.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.533.423.779
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.461.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.429.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.352.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	8.282.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10.214.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	14.984.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.01.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	10.072.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.223.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	174.552.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.150.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	195.066.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.000.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	23.160.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	495.004.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	188.759.200
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	8.01.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	360.820.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.600.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	89.861.880
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.480.241.840
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	435.693.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	13.700.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	34.596.400
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	21.663.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	44.838.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	228.118.600
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.02 PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	125.951.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	2.476.990.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	21.406.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	74.927.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	38.575.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	42.366.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Kerja dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	21.058.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	38.710.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	184.020.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	147.053.600
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	221.496.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	33.342.800

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	10.888.941.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	72.870.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	41.485.600
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.01 Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	21.496.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.02 Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	243.991.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang	127.993.000

Urusan	OPD	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7
					Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	97.061.800
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	83.828.000
8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01.0.00.0.00.10.00 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	672.689.000
						3.575.240.811.617

5.2. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun 2020

Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tangerang Selatan akhir tahun anggaran 2020 telah disampaikan kepada DPRD untuk memenuhi ketentuan Pasal 69 dan 70 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mewajibkan kepala daerah menyampaikan LKPJ dan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Adapun penyampaian Dokumen LKPJ tersebut disampaikan Walikota Tangerang Selatan pada Tanggal 16 Maret 2021 melalui Surat Nomor 050.13/923/Bappeda perihal penyampaian Dokumen LKPJ tahun 2020 kepada DPRD Kota Tangerang Selatan.

Atas penyampaian tersebut, maka DPRD Kota Tangerang Selatan melalui pansus membahas LKPJ Walikota akhir tahun anggaran 2020 serta secara komprehensif menyusun catatan penting, dan mengakomodir saran dari fraksi-fraksi DPRD untuk dijadikan bahan rekomendasi. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 170/07/DPRD/2021 tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2020.

Menindaklanjuti atas rekomendasi dari DPRD, serta agar terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat maka, dalam perubahan RKPD Tahun 2021 pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menindaklanjuti dengan program dan kegiatan yang ada di masing-masing Perangkat Daerah. Tindak lanjut rekomendasi DPRD atas LKJP Walikota Tangerang Selatan TA 2020 dapat dicermati pada Tabel berikut.

Tabel 5.3. Rencana Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD atas LKJP Walikota Tangerang Selatan TA 2020

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan Peraturan Walikota (Perwal) dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan tidak melibatkan Komisi II. 2. Masih banyak guru swasta yang belum mendapatkan dana insentif dan persyaratan penerima dana insentif guru swasta dinilai masih memberatkan guru swasta. 3. Masih adanya pungutan dan pemotongan dana insentif guru swasta. 4. Banyak instansi sekolah madrasah yang kondisinya sangat memprihatinkan. 5. Komunikasi Dinas Pendidikan dengan Komisi II tidak berjalan dengan baik. Dinas Pendidikan belum melibatkan Komisi II dalam mengambil keputusan terkait persoalan Pendidikan di Tangerang Selatan. Komunikasi hanya terbatas pada rapat formal, komunikasi informal belum berjalan dengan baik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar turut melibatkan Komisi II dalam pembahasan Perwal dari Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Kota Tangerang Selatan. 2. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memperbaiki data penerima insentif guru swasta dan mempermudah persyaratan penerima dana insentif guru swasta. 3. Meminta kepada Dinas Pendidikan agar segera menertibkan dan menindak tegas oknum-oknum yang melakukan pungutan dan pemotongan dana insentif guru swasta. 4. Meminta kepada Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidikan kepada sekolah madrasah. 5. Meminta Kepada Dinas Pendidikan untuk memperbaiki komunikasi kerjasama dengan Komisi II dalam membangun pendidikan di Tangerang Selatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ditindaklanjuti dengan Perwal tentang Insentif guru swasta • Ditindaklanjuti dengan pengawasan dan himbauan kepada ketua forum dan dewan pendidikan serta sekolah-sekolah tidak boleh lagi ada pungutan • Perwal sudah dalam penyusunan 		2021
DINAS KESEHATAN RSU	<ol style="list-style-type: none"> 1. Target Restra Akreditasi dan Reakreditasi Puskesmas baru 50 % dengan realisasi fisik baru 36 unit dari 58 Unit. Masih ada tugas 22 Puskesmas yang belum direakreditasi. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat target Akreditasi Puskesmas sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Status Akreditasi masih berlaku di seluruh Puskesmas dan Labkesda di Kota Tangerang Selatan • Keterbatasan lahan milik/aset Pemerintah daerah Kota Tangerang Selatan 		2021

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	<p>2. Target Akreditasi dan Reakreditasi Labkesda dan Puskesmas pada RPJMD baru mencapai 50 %.</p> <p>3. Banyak kelurahan yang belum memiliki Puskesmas, seperti di Kelurahan Buaran (Kecamatan Serpong) dan Kelurahan Cempaka Putih (Kecamatan Ciputat Timur)</p> <p>4. Puskesmas Serpong 1 yang masih berdiri di tanah milik Universitas Indonesia.</p> <p>5. RSUD Tangerang Selatan kekurangan Tenaga Medis.</p> <p>6. Parkir di RSUD Masih dikelola oleh Ormas</p> <p>7. Waktu Tunggu Operasi masih belum tercapai target RPJMD</p>	<p>2. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk mempercepat target Akreditasi Labkesda dan Puskesmas sebagai bentuk peningkatan pelayanan laboratorium kesehatan.</p> <p>3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera membangun Puskesmas di Kelurahan Buaran dan kelurahan lainnya yang belum ada Puskesmas</p> <p>4. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera merelokasi Puskesmas Serpong 1 agar bisa maksimal pelayanan kesehatan masyarakat.</p> <p>5. Meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan (BKPP) untuk segera menambah SDM tenaga medis RSUD Tangerang Selatan.</p> <p>6. Meminta kepada Pemerintah Daerah agar menyerahkan pengelolaan parkir kepada perusahaan parkir yang profesional.</p> <p>7. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan khususnya dalam waktu tunggu operasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Puskesmas Serpong 1 merupakan Puskesmas favorit khususnya bagi masyarakat Serpong dan seluruh masyarakat Kota Tangerang Selatan pada umumnya serta masyarakat yang berasal dari luar Kota Tangerang Selatan. • Kekurangan tenaga medis (dokter dan perawat) pada RSUD Kota Tangerang Selatan untuk mendukung pelayanan di IGD Non Covid-19 (Gedung 3), sehingga secara sarana pelayanan pasien Covid-19 dan Non Covid-19 di IGD bisa terpisah. Saat ini pelayanan pasien di IGD masih menjadi 1 (satu) yaitu di gedung 1 baik pasien Covid-19 dan pasien non Covid-19. • Permasalahan parkir sudah ditindaklanjuti dengan diawali appraisal (taksiran nilai) oleh kantor jasa penilai publik (KJPP) dan hasil sudah diajukan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk dilegalisasi dengan surat keputusan (SK). Selanjutnya calon pengelola parkir yang profesional akan dipilih dengan melakukan metode lelang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Tangerang Selatan. 		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			<ul style="list-style-type: none"> Waktu tunggu operasi akan teratasi dengan sudah operasional nya kamar operasi (OK) pada gedung 3 dengan optimal. Saat ini dari kapasitas 6 kamar operasi baru dapat beroperasi 3 kamar operasi (OK) dikarenakan masih harus melengkapi sarana dan SDM dokter spesialis anastesi, perawat bedah dan perawat anastesi yang terlatih. 		
DINAS PEKERJAAN UMUM		<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fisik dan serapan keuangan Dinas PU terbilang bagus; Komisi IV memahami SiLPA Dinas PU sebagai akibat proses keuangan lantaran keterbatasan anggaran dalam kondisi pandemi Covid-19 sehingga ada pembayaran pihak ketiga (kontraktor) yang tertunda; Komisi IV memberikan apresiasi atas kinerja Dinas PU. 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksanaan fisik dan realisasi keuangan untuk Program dan kegiatan yang ada telah dilaksanakan dengan maksimal SiLPA Dinas PU disebabkan antara lain : efisiensi pekerjaan dan Hutang Pihak Ketiga. Untuk pembayaran hutang pihak ketiga tahun 2020 akan dibayarkan pada TA. 2021 dan sudah dialokasikan dalam APBD TA 2021 Pencapaian hasil kinerja Dinas PU tidak lepas dari kontribusi Monev yang dilakukan oleh DPRD khususnya Komisi IV 	<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Kegiatan: Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</p> <p>Kegiatan: Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</p> <p>Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Kegiatan: Pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (ws) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</p>	-

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
				<p>Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.</p> <p>Kegiatan: pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota</p> <p>Program Penyelenggaraan Jalan</p> <p>Kegiatan: penyelenggaraan jalan kabupaten/kota</p> <p>Program Pengembangan Jasa Konstruksi</p> <p>Kegiatan: Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota</p>	
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		<ol style="list-style-type: none"> Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Perkimta, khususnya di sisi pendapat dimana dalam situasi pandemi Covid-19 masih bisa melampaui target pendapatan; Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan mempertanyakan rendahnya pencapaian fisik Dinas Perkimta 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pendapatan retribusi pemakaman pada Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan dikarenakan kesadaran masyarakat membayar IPPM. Peningkatan pendapatan Retribusi Pemakaian kekayaan daerah terkait Sewa Rusunawa dikarenakan adanya perbaikan unit-unit rusunawa yang rusak menjadi layak huni 	<ol style="list-style-type: none"> Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Sewa Rusunawa) Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman, Koordinasi Pembangunan 	2021

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			<p>3. Pencapaian realisasi fisik Disperkimta 94,88% dan realisasi keuangan 80,40% pada tahun 2020. Terdapat beberapa kegiatan yang realisasi fisiknya telah mencapai 100% namun realisasi keuangannya rendah, yang disebabkan oleh pembayaran pekerjaan yang terhutang akibat pendapatan daerah yang terkoreksi terdampak pandemic covid 19. Kegiatan-kegiatan yang pembayarannya masih terhutang antara lain Pembangunan Sarana Penunjang Pemukiman dan Kegiatan Pembangunan PJU. Pembayaran hutang kepada pihak ketiga direncanakan akan dilaksanakan pada TA 2021</p> <p>4. Data rincian capain target pendapatan dari Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Sewa Rusunawa) terlampir :</p> <p>5. Setiap tahun, Disperkimtan melaksanakan kegiatan Pembangunan penerangan jalan umum (PJU) pada jaringan jalan di Kota Tangerang Selatan, dari jalan fungsi arteri</p>	<p>Perumahan Tapak dengan Lembaga/Badan Usaha Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Peningkatan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman Penyediaan dan Pemeliharaan Barang dan Jasa Perkantoran</p> <p>1. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat</p> <p>2. Retribusi Pemakaian kekayaan daerah (Sewa Rusunawa)</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			<p>hingga jalan fungsi lingkungan. Lokasi sasaran kegiatan pembangunan PJU berasal dari usulan masyarakat (F1 kelurahan, F1 kecamatan dan usulan reses) dan rencana kerja Disperkimtan (F1 OPD). Secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan anggaran, Disperkimtan akan mengalokasikan pembangunan PJU hingga seluruh jaringan jalan di Tangsel dapat diterangi oleh PJU.</p> <p>Setiap tahun rutin diadakan pendataan TPBU se-Kota Tangerang Selatan oleh Tim Pengawas dari masing-masing Kecamatan. Sampai dengan saat ini, pihak Dinas Perkimta telah membina baik dari segi ilmu teknis dan dari segi sarana prasarana TPBU di Kota Tangerang Selatan, sebagai contoh kegiatan pemeliharaan dan pembangunan prasarana TPBU, pengadaan Keranda jenazah, Bimbingan Teknis Pemulasaran Jenazah, dan lain-lain. Dan kegiatan-kegiatan tersebut hingga saat ini masih terus berjalan.</p>	<p>2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</p> <p>3. Disperkimtan mengalokasikan pemberian bantuan untuk TPBU melalui mekanisme belanja</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
				barang yang diserahkan ke masyarakat. Salah satu jenis bantuan yang diberikan oleh Disperkimtan melalui mekanisme belanja barang yang diserahkan ke masyarakat adalah Perbaikan Turap TPBU Kp. Blimbing. Selain itu, Disperkimtan juga memberikan sarana seperti keranda dll, melalui mekanisme hibah barang jasa pada saat melaksanakan Bimbingan Teknis Pemulasaran Jenazah, yang sarasannya untuk Amil, Petugas Makam/TPBU, dan sebagainya.	
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	1. Penyusunan Rancangan Renstra 2021-2026 anggarannya Disilpakan Karna waktu pelaksanaan yang tidak memadai pada anggaran perubahan sehingga digeser untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021	1. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat oleh karena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan	1. Kegiatan penyusunan rancangan Renstra 2021-2026 dan kegiatan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal sedang dalam proses berjalan dan direncanakan selesai pada bulan April 2021.	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.	2021

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan SPM SATPOL PP tahun 2020 anggarannya Disilpakan Karna waktu pelaksanaan yang tidak memadai pada anggaran perubahan sehingga digeser untuk dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2021 Kurangnya koordinasi dalam melaksanakan tindakan di lapangan baik dalam penyegelan dan sidak. 	<ol style="list-style-type: none"> pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut Program kegiatan harus sinkron dengan sistem baru dari pemerintah pusat. Kedepannya kami akan lebih berkoordinasi dengan pihak pihak terkait dalam melaksanakan penyegelan dan sidak. 	<ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan Perangkat Daerah dan jajaran vertikal lainnya dalam rangka penindakan dan pelanggaran Peraturan Kepala Daerah akan ditingkatkan. 	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban umum pada Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kab/Kota dan Penegakan Kepala Daerah Bupati/Walikota 	
DINAS SOSIAL	<ol style="list-style-type: none"> Belum tersedianya rumah singgah di Tangerang Selatan. Belum adanya tenaga ahli seperti dokter spesialis yang dapat menangani orang dengan gangguan jiwa di Tangerang Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memasukan rencana pembangunan rumah singgah di RPJMD 2021-2024. Meminta kepada OPD terkait untuk segera merekrut tenaga ahli spesialis gangguan jiwa untuk di Tangerang Selatan 	<p>Pemenuhan Fasilitas pelayanan sosial akan dibahas dalam penyusunan rancangan RPJMD 2021-2026 serta rancangan Renstra Perangkat Daerah.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Dan Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (Pembangunan Rumah Singgah) Program Rehabilitasi Sosial (Permendagri 90), Kerjasama antar OP 	2022
DINAS KETENAGAKERJAAN	<ol style="list-style-type: none"> Belum adanya kantor yang representatif untuk operasional Dinas Ketenagakerjaan. Saat ini status kantor masih sewa. Tidak Balai Latihan Kerja di Kota Tangerang Selatan untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja 	<ol style="list-style-type: none"> Meminta kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk segera menganggarkan pembangunan kantor Dinas Ketenagakerjaan. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan calon tenaga kerja di Tangerang Selatan. Komisi III mengapresiasi capaian target pendapatan dari Retribusi IMTA Dinas Ketenagakerjaan dan 	<ol style="list-style-type: none"> Penyediaan kantor pemerintah akan dibahas dalam penyusunan rancangan RPJMD 2021-2026 serta rancangan Renstra Perangkat Daerah Peningkatan keterampilan tenaga kerja akan dibahas dalam penyusunan rancangan RPJMD 2021-2026 serta rancangan Renstra Perangkat Daerah melalui pola kerjasama atau penyediaan fasilitas mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit kompetensi, Kegiatan Koordinasi Lintas Lembaga dan 	2022

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
		<p>mengharapkan Dinas Ketenagakerjaan dapat memaparkan Data pendapatan dari IMTA selama 5 Tahun (2016-2021) sesuai RPJMD Walikota.</p> <p>4. Komisi III meminta Dinas Ketenagakerjaan dapat mengidentifikasi dan mengklasifikasi 5.010 perusahaan yang ada di Tangerang Selatan sehingga Bapenda ataupun OPD lain dapat melihat jika ada potensi penambahan PAD Kota Tangerang Selatan.</p> <p>5. Komisi III mengingatkan kepada Dinas Ketenagakerjaan untuk melihat kembali Peraturan Walikota Nomor 66 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan seperti urusan Transmigrasi.</p>		<p>Kerjasama dengan swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasaran LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) Kegiatan Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kab/ Kota</p>	
DPMP3AKB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya kantor UPT P2TP2 (Pelayanan Pengaduan Tindak Pelecehan dan Kekerasan Perempuan dan Anak). Saat ini statusnya masih meminjam di kantor Kelurahan Rawa Buntu. 2. Tidak adanya Peraturan Daerah yang menjadi acuan terhadap ketahanan keluarga dan anak. 3. Penghargaan Kota Layak Anak Tangerang Selatan masih Predikat Nidnya belum utama. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada Pemerintah Daerah/Tim TAPD untuk segera melakukan pembangunan kantor UPT P2TP2 pada Tahun 2021. 2. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera membuat Perda Ketahanan Keluarga dan Anak Kota Tangerang Selatan. 3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk memasukan target Utama dalam penghargaan Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utk gedung UPTD P2TP2A rencananya tahun 2021 tahapan pengusulan lahan (rencana lokasi tanah di pinggir jalan di sebelah sekolah cikal harapan BSD) , kemudian pada tahun 2022 akan dibuat DED nya dan untuk pembagunan gedung rencananya akan dianggarkan pada tahun 2023 2. Untuk perda ketahanan keluarga saat ini sudah masuk dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Perlindungan Perempuan Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2023 2. Tahun 2021 3. Tahun 2022

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
		Layak Anak pada RPJMD Walikota Tahun 2021-2024	<p>Program Legislasi Daerah tahun 2021 menjadi usulan perda inisiatif DPRD dan saat ini sedang proses penyusunan kajian naska akademik oleh tim konsultan DPRD, Namun Kota Tangerang Selatan telah memiliki perda nomor 1 tahun 2018 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak.</p> <p>3. Adapaun target Kota Layak Anak sampai tahun 2021 adalah madya tetapi Alhamdulillah pada tahun 2019 kita sudah mencapai kategori nindya (melebihi dari target) dan untuk kategori utama akan menjadi target kami di tahun 2022</p>	<p>2. Anggaran Sudah ada di DPRD Tahun Anggaran 2021</p> <p>3. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Kegiatan Pelembagaan PHA Pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</p>	
DINAS KETAHANAN PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pangan menjelang hari besar keagamaan sering tidak stabil. 2. Program pengembangan urban farming sebagai upaya ketahanan pangan Tangerang Selatan tidak berjalan maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meminta kepada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk menjamin kesediaan stok pangan di Tangerang Selatan. 2. Meminta kepada OPD terkait untuk lebih kreatif dalam menjalankan program urban farming di Tangerang Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengadakan Kerjasama dengan daerah produsen untuk menjaga kestabilan stok dan harga pangan. 2. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 3. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 3. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 	2021

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
DLH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Waktu proses pencairan keuangan lebih lama lantaran keterbatasan anggaran dan pandemi Covid-19; 2. Penundaan pekerjaan karena ada pergeseran/perubahan di pagu anggaran 2020; 3. Biasanya SiLPA DLH berkisar lima persen. Dalam tahun anggaran 2020 SiLPA DLH sebesar 17.01 persen. Relatif terbilang baik mengingat situasi dan kondisi pandemi Covid-19; 4. Pencapaian pekerjaan fisik DLH hampir seluruhnya mencapai 100 persen; 5. Kinerja DLH telah mencapai seluruh RPJMD. Hanya Adipura yang gagal lantaran penilaian TPA Cipeucang terbilang buruk; 6. Sisa waktu penggunaan TPA Cipeucang hanya berkisar dua bulan ke depan; 7. Pembangunan Landfill 3 akan selesai Mei 2020. Tetapi, penggunaan Landfill 3 hanya mampu selama 337 hari; 8. Kerjasama pembuangan sampah ke daerah lain terus dilakukan DLH setelah Kabupaten Tangerang menolak kerjasama. Kini DLH tengah melakukan pendekatan intensif dengan Kota Serang; 9. Kesulitan lain pengelolaan sampah antara lain sampah berasal dari wilayah lain di luar Kota Tangerang Selatan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan memberikan apresiasi atas capaian kinerja DLH yang terbilang baik. Bahkan, dalam situasi pandemi Covid-19, pendapatan DLH masih bisa surplus alias melebihi dari target yang ditentukan; 2. Guna membangkitkan kesadaran masyarakat, Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong DLH untuk lebih giat melakukan sosialisasi, terutama melalui multimedia atau videotron; 3. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong DLH agar memasang CCTV di titik-titik yang rawan penimbunan sampah secara sembarang. Dengan begitu, pelaku pembuangan sampah sembarangan bisa dikenai sanksi sesuai perda yang berlaku. Tujuannya untuk menimbulkan efek jera agar masyarakat tidak membuang sampah di sembarangan tempat; 4. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan merekomendasi untuk pembelian kendaraan operasional DLH yang saat ini kondisinya sudah terbilang tua. Bahkan di antaranya ada yang tidak layak dipakai sebagai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. DLH akan terus meningkatkan upaya peningkatan pendapatan retribusi persampahan, salah satunya dengan percepatan pengelolaan sampah berbasis teknologi yang dapat meningkatkan pelayanan pengelolaan sampah. 2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah dilakukan melalui sosialisasi secara langsung dan melalui sarana/media edukasi seperti multimedia serta videotron. Kegiatan tersebut secara rutin dilakukan dari tahun ke tahun dengan melibatkan peran serta penggiat lingkungan dibawah binaan DLH. 3. Untuk meningkatkan pengawasan di beberapa titik-titik sampah liar, DLH sudah merencanakan pemasangan CCTV dan masih dalam proses pengkajian untuk menentukan lokasi yang sesuai (strategis). 4. Pembelian/ pengadaan sarana persampahan, diantaranya pengadaan truk sampah, secara bertahap akan dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan penganggaran dan 	<p>Program Pengelolaan Persampahan/ Kegiatan Pengelolaan Sampah</p>	<p>2020-2021</p>

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	<p>10. Juga belum optimalnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup. Karena itu DLH giat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mereduksi timbunan sampah dengan pola 3R;</p> <p>11. DLH meminta bantuan agar ada penambahan 400 pegawai lagi di antaranya untuk petugas patroli yang memantau pembuang sampah sembarangan.</p>	<p>kendaraan operasional pengangkut sampah.</p>	<p>dilaksanakan secara efektif dan efisien. Untuk menjaga kondisi dan fungsi truk sampah dan sarana persampahan eksisting, DLH mengoptimalkan kegiatan pemeliharaan yang dianggarkan rutin setiap tahun.</p> <p>5. Terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan.</p> <p>6. Data pendapatan (retribusi) selama 5 tahun (2016-2021) terlampir.</p>		
DISDUKCAPIL	<p>1. masih kurangnya sosialisasi terkait Pengurusan Administratif Kepandudukan kepada Masyarakat</p> <p>2. kedepannya dalam menggagarkan harus lebih baik agar tidak terjadi silpa.</p> <p>3. masih adanya keluhan masyarakat terkait aplikasi online di Dupcapil yang tidak bisa mengakses aplikasi tersebut, kedepannya Dupcapil membuat website yang menampung keluhan masyarakat agar dapat langsung di tindak lanjuti dan di perbaiki programnya.</p>	<p>1. agar lebih ditingkatkan lagi terkait Pelayanan kepada Masyarakat dan lebih gencar lagi mensosialisasikan tentang Pengurusan Dokumen administratif kepada Masyarakat</p> <p>2. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat oleh karena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut.</p> <p>3. Untuk website pengaduan akan menjadi suatu masukan yang baik dan kami akan tindak lanjuti.</p>	<p>1. Pelayanan Adminduk akan terus ditingkatkan sesuai ketentuan perundang-undangan termasuk dalam pemanfaatan teknologi informasi.</p> <p>2. Terkait pengaduan masyarakat aplikasi SIBUDI KANCIL akan dioptimalkan sehingga masyarakat mudah untuk mengakses</p>		2021
DISHUHB		<p>1. Komisi III meminta Kajian dari KJPP terkait penilaian aset pemakaian kekayaan daerah</p>	<p>1. Penilaian aset tanah parkir yang dilakukan pada tahun 2019 berlokasi pada Kios</p>		2022

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
		<p>penyewaan tanah dan bangunan yang dikelola oleh Dishub.</p> <p>2. Komisi III meminta Data target dan realisasi pendapatan dari Retribusi yang dikelola Dishub selama 5 Tahun (2016-2021) sesuai RPJMD Walikota.</p> <p>3. Komisi III mengharapkan adanya solusi dari Dishub terkait 5 titik parkir yang belum laku lelang agar dapat menjadi penambahan PAD T.A. 2021.</p>	<p>Autopart dan Komplek perkantoran Samsat. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar harga sewa pada kegiatan pemilihan mitra sewa yang dilaksanakan pada Tahun 2020 Hasil penilaian aset yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan sebagaimana terlampir.</p> <p>2. Data target dan realisasi pendapatan dari Retribusi yang dikelola Dishub selama 5 Tahun (2016-2021) sesuai RPJMD Walikota, sebagaimana terlampir</p> <p>3. Rencana pemilihan mitra sewa pada 5 lokasi yang belum laku lelang dan yang belum ditetapkan calon mitra sewanya, akan dilaksanakan pada tahun 2021 dan direncanakan akan dimasukkan ke dalam target sewa lahan pada APBDP 2021.</p>		
DISKOMINFO	<p>1. Masih adanya kendala terkait usulan pengembangan aplikasi dari OPD karena pekerjaan yang dikerjakan sebelumnya berasal dari pihak ketiga yang belum bisa memberikan data secara menyeluruh</p> <p>2. kedepannya dalam menggagarkan harus lebih baik agar tidak terjadi silpa</p>	<p>1. Komisi 1 Merekomendasikan agar Di tahun 2020 ini akan di kejar pekerjaan aplikasi tersebut agar rampung.</p> <p>2. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat oleh karena itu harus lebih</p>	<p>1. Usulan pengembangan aplikasi/website dari OPD sudah tidak melibatkan pihak ketiga (penyedia/vendor), seluruhnya dilaksanakan oleh pegawai kominfo (tenaga ahli & pns). Pekerjaan pengembangan aplikasi / website yang sebelumnya</p>	<p>1. Program Pengembangan Teknologi Dan Informasi Kegiatan: pengkajian dan pengembangan sistem informasi</p>	<p>1. 2020 2. 2021</p>

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	<p>3. masyarakat tidak bisa mengakses atau melihat kondisi caovid 19 di Kota Tangerang Selatan agar kedepannya bisa di buat aplikasi agar masyarakat dapat lebih berhati hati dalam melakukan kegiatan dalam new normal ini.</p>	<p>berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut.</p> <p>3. Website untuk masuarakat sudah ada memang namun masih ada beberapa kendala karena aplikasi tersebut harus sinkron dengan data yang ada di Dinas Kesehatan, kedepannya kami akan membuat aplikasi tersebut lebih gampang di akses oleh masyarakat dan dapat memberikan informasi yang lebih kongkrit.</p>	<p>masih tersebar diseluruh OPD dan dilaksanakan oleh penyedia (sebelum adanya Diskominfo) sedang dipelajari agar kedepannya dapat dikembangkan secara mandiri oleh Diskominfo, dengan hasil beberapa website / aplikasi sudah dilakukan <i>redevelop</i> (pembangunan ulang) oleh Diskominfo.</p> <p>2. Dinas Komunikasi dan informatika akan terus meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, efisien, efektif dan tepat sasaran.</p> <p>3. Untuk melihat kondisi Covid-19 dapat mengakses website : https://lawanCovid19.tangerangselatankota.go.id/ Dalam website tersebut, Diskominfo sudah menyediakan data & informasi perkembangan Covid-19 harian, Peta Zonasi harian PPKM tingkat RT, Zonasi Mingguan tingkat kelurahan, dan sebagainya. Data-data tersebut diinput dan diupdate secara harian oleh Dinas Kesehatan. Inputing & Updating data terkait Covid 19</p>	<p>2. Program aplikasi informatika Kegiatan: pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/ kota</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			sudah dapat dilakukan oleh akun puskesmas dan rumah sakit dan akan diupdate ke ke web lawan covid setelah diverifikasi & otorisasi dari Dinas Kesehatan.		
DINKOP	1. Penataan PKL yang masih belum tersistematis dan masih semrawut di Tangerang Selatan.	1. Meminta kepada OPD terkait untuk membuat program penataan PKL di Kota Tangerang Selatan dan juga meningkatkan pengawasan PKL untuk lebih tertib dan disiplin dalam berusaha.	1. Kota Tangerang Selatan merupakan peyangga Ibu Kota dengan jumlah PKL yang cukup tinggi, sudah melakukan penataan dengan titik-titik di SAMSAT, Taman Kota I & II, Tandon Ciater, BSD Sunburst, Kecamatan Pamulang selain itu kita juga melakukan upaya pembinaan, bimbingan teknis peningkatan kualitas dan manajemen dan mendorong untuk ikut menjadi anggota koperasi untuk akses permodalan serta bantuan gerobak, etalase dan juga bersama Sat Pol PP turun melakukan pengawasan	1. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan / Fasilitas Penataan PKL dan Revitalisasi Manajemen Pasar 2. Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan dan Penataan (Rencana tindak lanjut tahun berikutnya)	1. 2016 – 2020
DPMPSTP	1. Masih banyaknya perusahaan nakal yang membuat bangunan sementara yaitu bangunan semi permanen menjadi bangunan permanen dan letaknya tidak sesuai dengan peruntukannya. 2. Perlu adanya terobosan dalam sistem dan mekanisme kerja sehingga dapat berkontribusi dalam meningkatkan PAD Kota Tangerang Selatan secara maksimal.	1. Agar di buatkannya perwal terkait izin Bangunan sementara dan jangka waktu berdiri bangunan tersebut. 2. Kedepannya agar lebih berinovasi terkait Program pengembangan Investasi pada kegiatan promosi potensi investasi daerah dengan output dapat menarik investor berinvestasi guna meningkatkan	1. Akan ditindaklanjuti dengan menyiapkan Perwal, setelah dilakukan revisi Perda retribusi daerah dan Perda bangunan gedung sesuai amanat UU CIPTA KERJA. 2. Akan kami tindaklanjuti dengan memaksimalkan koordinasi dgn Perangkat Daerah dan BKPM untuk		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	3. Sehubungan dengan rencana pindah ke Gedung pelayanan baru maka tidak melaksanakan aset tetap renovasi dan efisiensi belanja rutin kantor.	pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. 3. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat olehkarena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut	menganalisa (FS/DED) potensi investasi Tangsel yang ditawarkan kepada investor melalui Kegiatan Strategi pengembangan Investasi dan pemanfaatan IT dlm berpromosi. 3. Akan dilaksanakan sesuai ketentuan dan Peraturan yang telah di tetapkan oleh Pemerintah Pusat. 4. Sudah dilakukan revisi target Pendapatan pada saat penyusunan DPA Murni TA. 2021, untuk target dari Retribusi IMB hanya sebesar Rp.30.000.000.000,- dibandingkan dengan Target IMB pada TA. 2020 yaitu sebesar Rp. 60.000.000.000,- 5. Akan disiapkan Draft Perwal perijinan permohonan PBG/IMB utk menggali potensi PAD dari sektor perijinan bangunan rumah tinggal dan usaha.		
DISPORA	1. Belum adanya indikator yang jelas untuk mengukur keberhasilan pembangunan Pemuda di Tangerang Selatan. 2. Tangerang Selatan belum memiliki Gedung Pemuda.	1. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk membuat indikator yang jelas tentang keberhasilan pembangunan kepemudaan di Tangerang Selatan.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) termasuk sarannya akan dibahas dalam penyusunan rancangan RPJMD	1. Program : PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan :	1. 2021 – 2026

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	3. Masih minimnya sarana olahraga atau lapangan olahraga di setiap kecamatan.	2. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk segera menganggarkan untuk pembangunan Gedung Pemuda dan dimasukan ke dalam RPJMD Walikota Periode 2021-2024. 3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pengadaan sarana olahraga dan lapangan olahraga di setiap kecamatan.	2021-2026 serta rancangan Renstra Perangkat Daerah.	<p>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Subkegiatan Pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan melalui implementasi rencana aksi daerah/rad tingkat kabupaten/kota</p> <p>2. Program : PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN Kegiatan : Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
				<p>Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</p> <p>Subkegiatan Perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan kab/kota</p> <p>3. Program PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN Kegiatan</p> <p>a. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kot</p> <p>a</p> <p>b. Pembinaan dan Pengembangan</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
				<p>Olahraga Rekreasi</p> <p>Subkegiatan</p> <p>a. Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kot a</p> <p>b. Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi</p> <p>4. Program PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</p> <p>5. Program (optional)</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
				PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	<p>1. Kantor pelayanan UPT Metrologi masih sewa.</p> <p>2. Tidak ter kendalinya harga bahan pokok menjelang hari besar keagamaan.</p>	<p>1. TAPD segera menganggarkan untuk pembangunan kantor Pelayanan UPT Metrologi.</p> <p>2. Disperindag harus mampu mengendalikan harga bahan pokok dengan mekanisme operasi pasar secara berkala menjelang hari besar keagamaan.</p>	<p>1. Sudah dalam proses rencana pembangunan kantor pelayanan upt metrologi secara bertahap (master plan ,DED dan pembangunan) di dinas bangunan dan tata ruang.</p> <p>2. Disperindag sejak tahun 2018 telah mengembangkan aplikasi pagar tangsel (pantau harga Tangerang selatan) dimana setiap hari dapat di pantau update perkembangan harag bahan pokok di pasar pasar pantauan di tangerang selatan sehingga dapat dilakukan intrevensi jika di perlukan. Intervensi telah dilakukan untuk haraga bahan pokok yang mengalami kenaikan dengan menyelenggarakan program KPSH (Ketersediaan Pasokan dan stabilisasi Harga) atau operasi pasar. Pada tahun 2020 operasi pasara sebanyak 6 kali untuk komoditi gula dan bawang putih berkerja sama dengan bulog, Kementan, dan disperindag Provinsi. Pada tahun 2020 Mendapatkan Penghargaan Daerah dengan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) SeProvinsi Banten dari</p>		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			BANK Indonesia Perwakilan Provinsi Banten.		
BAPPEDA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai dinas yang menjadi sentral dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Tangsel, diharapkan mampu menyusun blue print perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan integral. 2. masih kurangnya koordinasi dengan lintas OPD di tangerang selatan. 3. Banjir di daerah serpong utara harap menjadikan konsern pihak BAPPEDA dan dinas terkait serta Pemerintah Kota Tangerang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bappeda harus menjadi lokomotif perubahan melalui penyusunan perencanaan pembangunan yang komprehensif dan integral yang melibatkan seluruh OPD dalam penyusunannya. 2. Untuk capaian target di BAPPEDA sudah cukup bagus kedepan agar di tingkatkan lagi koordinasi dengan lintas OPD 3. Untuk Banjir yang kerap terjadi di daerah serpong utara kami sedang mencari alternatif dan bekerja sama dengan pemerintah kota Tangerang karena daerah tersebut berbatasan dengan Pemerintah Kota Tangerang. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan menjadi perbaikan untuk kedepan dan akan terus di tingkatkan 2. Terima kasih atas apresiasinya kedepan akan terus di tingkatkan 3. Penanganan banjir di Serpong Utara menjadi fokus sasaran program terkait pengendalian banjir dan longsor di Dinas Pekerjaan Umum. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah turut serta dalam komitmen penanggulangan banjir dan longsor se-Jabodetabekjur yang difasilitasi oleh Kemendagri sehingga diharapkan integrasi penanggulangan banjir dg daerah perbatasan dapat terwujud 		
SEKRETARIAT DAERAH	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurang nya capain target yang dilaksanakan baik dalam fisik maupun keuangan. 2. Masih ada nya silpa yang signifikan pada beberapa Bidang. 3. Program baru dari pemerintah pusat masih menjadi kendala untuk melaksanakan program kegiatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya penyusunan program kerja dan keuangan yang berbasis target, tujuan dan outcome. 2. Untuk capaian target masih kurang dan di tahun 2021 harus diperhatikan lagi capaian target nya. 3. Untuk menghadapi new normal kedepannya Setda harus memperhatikan dalam penganggaran dan realisasinya agar tidak terjadi silpa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kedepan akan dibuat penyusunan program kerja yang berbasis target, tujuan dan outcome; 2. Untuk capaian target pada tahun 2020 masih kurang optimal, dikarenakan secara umum pelaksanaan kegiatan masih terpengaruh oleh situasi pandemi, sehingga pelaksanaan kegiatan kurang optimal. Untuk pelaksanaan 		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			<p>kegiatan tahun 2021 dalam rangka meningkatkan capaian target akan dilakukan lebih maksimal untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan;</p> <p>3. Untuk penganggaran dan realisasinya kedepannya akan dilakukan dengan perencanaan dan pelaksanaannya menyesuaikan kondisi perkembangan penanganan pandemi sehingga bisa lebih optimal.</p>		
KECAMATAN – SE KOTA TANGERANG SELATAN	<p>1. Persoalan yang dihadapi tujuh kecamatan di Kota Tangerang Selatan relatif sama antara satu kecamatan dengan kecamatan lain. SiLPA misalnya, rata-rata SiLPA diakibatkan ada pejabat atau staf kecamatan yang tidak aktif (wafat atau pensiun). Dengan begitu ada alokasi dana yang tidak terpakai. Selain itu, SiLPA juga diakibatkan aparat RT/RW yang belum memiliki rekening bank atau walaupun ada rekening yang bersangkutan sudah tidak aktif serta efisiensi yang dilakukan para camat.</p> <p>2. Kosongnya posisi jabatan harus diakui pada akhirnya mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat mengingat tidak</p>	<p>1. Ke depan, honor RT/RW sebaiknya ditingkatkan lagi sehingga bisa menjadi penambah semangat kinerja para RT/RW.</p> <p>2. Dalam sosialisasi di setiap kecamatan agar mengundang Pimpinan dan Anggota Komisi 1.</p> <p>3. Honor Guru ngaji dan Honor Marbot ditambahkan kuotanya</p> <p>4. Diharapkan setiap Kecamatan dalam menghadapi Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat olehkarena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan</p>	<p>1. Terima kasih atas masukannya semoga kedepan honor RT/RW, Guru Ngaji, Amil dan Marbot dapat ditingkatkan serta kuota bisa lebih banyak</p> <p>2. Kedepan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat akan melibatkan DPRD yang disesuaikan dengan materi sosialisasinya.</p> <p>3. Terima kasih masukannya dan akan menjadi perhatian kedepannya.</p>	<p>1. Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Publik.</p> <p>2. Program Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>3. Program Peningkatan Kualitas dan Kauntitas Pelayanan Publik. 4. Semua Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD.</p>	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	ada pejabat atau staf yang menangani. Maka sebaiknya posisi yang kosong segera diisi. Persoalan honor RT/RW yang terlalu kecil juga patut mendapat perhatian mengingat RT/RW merupakan ujung tombak bagi aktifitas kecamatan	pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut			
INSPEKTORAT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan Anggaran pada tolok ukur Survey Indeks Presepsi Korupsi/ arahan dari KPK dikarenakan anggaran difokuskan untuk penanganan covid19 2. Didalam LKPJ 2019 tidak adanya landasan hukum seperti yang tertera di pp nomor 3 tahun 2007. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agar tidak terjadi Silpa maka beberapa anggaran kegiatan di hapuskan. 2. Kedepannya Inspektorat harus lebih bersinergi dengan BAPEDA dan OPD lainnya dalam merancang LKPJ. 3. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat olehkarena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Tahun Anggaran berikutnya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan akan lebih meningkatkan sinergitas antara Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Lainnya dalam penyusunan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Tangerang Selatan 2. Berdasarkan surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) Nomor B/2414/LIT.05/10-15/05/2020 tentang Penyampaian Pembatalan Kegiatan Survey Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2020 bahwa Kegiatan Survey Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2020 dibatalkan karena kondisi pandemi covid-19 	<p>Program Penyelenggaraan Pengawasan</p> <p>Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</p> <p>Survey Indeks Perseps Korupsi (IPK)</p>	2021
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. masih ada nya duplikasi program kegiatan. 2. Masih belum jelas nya tentang P3K 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimakasih atas catatan dan rekomendasi DPRD komisi 1 terhadap laporan kinerja kita, untuk kedepan kami akan 		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	3. Tindak lanjut pelanggaran PNS dan non PNS dalam bekerja untuk masyarakat dan pelanggaran saat semasa kampanye.	<p>Pusat olehkarena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut</p> <p>2. Komisi 1 meminta secara update tentang pejabat yang sudah pensiun maupun yang sudah promosi jabatan.</p> <p>3. Kedepannya di masing – masing OPD Pejabat sudah tidak ada yang PLT agar kinerjanya dapat lebih maksimal dan penempatan berbasis kopetensi agar bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugas dan menghasilkan kinerja yang baik.</p> <p>4. Tindak lanjut pelanggaran PNS dan Non PNS akan di laporkan ke DPRD terutama komisi 1 sebagai tembusan.</p>	<p>menindaklanjuti rekomendasi DPRD</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dan sinergisitas dengan Pemerintah Pusat, akan mengupdate data ASN khususnya terkait promosi dan mutasi serta pemberhentian ASN, Mengoptimalkan Sumberdaya aparatur yang tersedia untuk memenuhi dan memaksimalkan kinerja OPD, Serta akan melaporkan pelanggaran Kode Etik dan Disiplin PNS ke komisi 1</p>		
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	<p>1. Belum Tercapainya Indikator RPJMD pada program Pengembangan wawasan kebangsaan dikarenakan terjadinya refocusing pada anggaran kegiatan.</p> <p>2. Untuk menggagarkan kegiatan di tahun 2021 ini kami juga harus berhati – hati karena kami masih menyesuaikan sistem keuangan yang di buat oleh pemerintah pusat.</p>	<p>1. Target RPJMD yang belum tercapai dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2021, sehingga seluruh target RPJMD 2016-2021 dapat tercapai.</p> <p>2. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat oleh karena itu harus lebih berhati hati dalam menggagarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah</p>	<p>1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2021 telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kekurangan capaian target RPJMD pada Tahun 2020, sehingga seluruh target RPJMD 2016-2021 tercapai.</p> <p>2. Terima kasih atas rekomendasinya dan akan menjadi perhatian kami.</p>		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
		pusat dalam menyikapi sistem baru tersebut			
SEKRETARIAT DPRD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian realisasi fisik dan keuangan cukup baik namun harus lebih di perbaiki kedepannya agar tidak ada silpa dan kedepannya lebih baik dalam melayani dewan. 2. Dalam tahun 2021 kami masih kesulitan dalam menganggarkan kegiatan di sekretariat DPRD di karenakan sistem baru dari pemerintah pusat. 3. Kurangnya koordinasi antara bidang di sekretariat DPRD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk capaian target masih kurang dan di tahun 2021 harus diperhatikan lagi capaian target nya. 2. Dalam menghadapi era New Normal dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang baru yang di buat oleh pemerintah Pusat oleh karena itu harus lebih berhati hati dalam menganggarkan dan harus lebih bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menyikapi sitem baru tersebut. 3. Pimpinan mengharapkan kedepannya di sekretariat DPRD agar pejabatnya lebih kompak dalam melayani kegiatan DPRD yang sangat padat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tahun 2021 Sekretariat DPRD akan lebih memperhatikan capaian Target Program dan Kegiatan. 2. Terima kasih atas masukannya dan kedepan akan menjadi perhatian, 3. Sekretariat DPRD akan lebih meningkatkan lagi pelayanannya dalam melaksanakan tugas dan kegiatan DPRD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA 2. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 	2021
DINAS BANGUNAN DAN PENATAAN RUANG	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya rasionalisasi penyerapan anggaran (kontrak pekerjaan terutang), pekerjaan yang tidak jadi dilaksanakan, serta adanya efisiensi selisih pagu dengan nilai kontrak pekerjaan; 2. BPR masih menanggung utang dengan pihak ketiga (kontraktor); 3. RPJMD Walikota tercapai 100 persen; 4. Target revitalisasi Pasar Ciputat masih terus berjalan. Tahap I sudah selesai dan tahap II dalam proses pekerjaan; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan menyoroti ketidakseimbangan neraca keuangan antara pekerjaan fisik dan serapan keuangan Dinas BPR; 2. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan meminta Dinas BPR untuk segera menyelesaikan revitalisasi Pasar Ciputat yang sempat kisruh; 3. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan menekankan agar Dinas BPR lebih 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di tahun anggaran 2020 cukup banyak pekerjaan pada Dinas Bangunan dan Penataan Ruang yang realisasi fisiknya telah 100% atau selesai dibangun, namun untuk pembayarannya masih terhutang sehingga menyebabkan ketidakseimbangan neraca keuangan yang cukup besar. Untuk pekerjaan terhutang tersebut telah dianggarkan dan akan dibayarkan pada tahun 2021 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program : Pengelolaan Pendidikan Kegiatan : • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar • Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Program : Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan 	2021

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	<p>5. SMPN 23 di Serua sudah siap dibangun;</p> <p>6. Revitalisasi Pasar Gintung sudah selesai. Direncanakan peresmian pada 29 Maret 2021.</p>	<p>memperhatikan kualitas pekerjaan (bangunan) serta memperketat pengawasan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga (kontraktor);</p> <p>4. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan memberikan apresiasi atas kinerja Dinas BPR yang walau dalam kondisi pandemi dapat menyelesaikan program dan kegiatan.</p>	<p>2. Pekerjaan Revitalisasi Pasar Ciputat sudah sesuai dengan rencana pembangunannya. Pada tahun 2020 Revitalisasi Pasar Ciputat tahap 1 telah selesai dikerjakan 100% sesuai dengan kontrak pekerjaan, dan di tahun 2021 dianggarkan kembali pekerjaan tahap kedua yang berfokus pada pekerjaan di lantai 3. Proses tender tahap kedua telah dilakukan pada triwulan pertama, dan target pembangunan akan selesai terbangun di bulan November 2021.</p> <p>3. Pekerjaan bangunan yang dilakukan oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang akan terus dilakukan secara optimal termasuk peningkatan kualitas pekerjaan bangunan. <i>Preliminary Survey</i> selalu dilakukan untuk setiap pekerjaan yang akan dilaksanakan, selain itu untuk menjaga kualitas hasil bangunan gedung yang baik dan sesuai dengan RAB yang telah tertera dalam kontrak pekerjaan, DBPR selalu melakukan inspeksi secara berkala pada setiap proyek pekerjaan yang sedang dilaksanakan.</p>	<p>Upaya Kesehatan Masyarakat</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota <p>Program :</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota <p>Program :</p> <p>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</p> <p>Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 	

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
			4. Terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan.	<p>Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung <p>2. Program : Penataan Bangunan Gedung Kegiatan : Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung</p>	
DINAS PEMADAM KEBAKARAN & PENYELAMATAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya efisiensi; 2. Semua program dan kegiatan Dinas Damkar telah terlaksana dengan capaian di atas 90 persen; 3. Realisasi pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM)—sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM—dengan jenis 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan fisik dan serapan keuangan Dinas Damkar terbilang bagus; 2. Komisi IV sepakat SILPA yang diakibatkan adanya efisiensi; 3. Komisi IV memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Damkar dalam upaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimakasih atas apresiasi yang diberikan oleh DPRD Kota Tangerang Selatan. 2. Rekap retribusi terlampir; 3. Dinas Damkar akan mengalokasikan posko damkar dilingkungan kantor DPRD yang mampu mengcover wilayah 		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
	<p>pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran tercapai 100 persen.</p>	<p>mencapai target pendapatan retribusi.</p> <p>4. Komisi III mengapresiasi capaian target pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dari Retribusi Pemeriksaan APAR, Komisi III meminta Dinas Damkar data pendapatan selama 5 Tahun (2016-2021) sesuai RPJMD Walikota.</p> <p>5. Komisi III mengharapkan adanya pos pemadam kebakaran di Kantor DPRD Kota Tangerang Selatan dan penambahan pos pemadam kebakaran di wilayah Kecamatan Setu. Komisi III mendorong Dinas Damkar mengusulkan Peraturan Daerah tentang penghapusan retribusi agar lebih fokus pada pelayanan</p>	<p>Kecamatan Setu pada Renstra dan Renja mendatang;</p> <p>4. Terkait penghapusan retribusi pada Dinas Damkar, akan dilakukan kajian terlebih dahulu dan akan ditindaklanjuti sesuai peraturan yang berlaku.</p>		
BPBD		<p>1. Komisi IV merekomendasikan pembangunan kantor BPBD sehingga ke depan tidak sewa lagi. Juga pengadaan mobil operasional berupa mobil tanki air, dan mobil <i>resque</i>;</p> <p>2. Komisi IV DPRD Kota Tangerang Selatan mendorong BPBD berkoordinasi dengan Dinas Kominfo guna tersedianya kajian, sistem informasi kebencanaan yang berbasis</p>	<p>1. Pembangunan Kantor BPBD akan dilaksanakan pada tahun 2021 di Dinas Bangunan dan Penataan Ruang. Terkait pengadaan mobil rescue dan mobil tanki air akan dialokasikan secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan anggaran. Saat ini, untuk membantu penyediaan air di musim kemarau pada daerah-daerah</p>	<p>1. Pengendalian Operasi dan penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota</p> <p>2. Pemeliharaan Gedung</p> <p>3. Penyediaan sarana dan prasarana</p>	<p>1. 2021</p> <p>2. 2022</p>

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
		teknologi serta teknologi kebencanaan yang tepat dan cepat.	<p>yang kekurangan air dibantu oleh mobil tangki air yang dimiliki oleh Dinas Bangunan dan Penataan Ruang.</p> <p>2. BPBD akan berkoordinasi dengan Diskominfo terkait sistem informasi kebencanaan berbasis teknologi. Terkait sistem kebencanaan, BPBD akan membentuk Pusdalops yang dilengkapi Early Warning System.</p>		
BAPENDA		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III meminta Data tren pertumbuhan Wajib Pajak (WP) selama 5 Tahun (2016-2021) sesuai RPJMD Walikota. 2. Komisi III meminta Kajian terkait potensi pendapatan dari Pajak dan Retribusi Daerah selama 5 Tahun (2016-2021) sesuai RPJMD Walikota. 3. Komisi III meminta Bapenda memaparkan besaran anggaran program/kegiatan masing-masing Bidang. 	Permintaan Komisi III akan dipenuhi oleh Perangkat Daerah terkait		
BPKAD		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi III mengapresiasi pencapaian BPKAD pada pendapatan dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Lahan/Bangunan). 2. Komisi III mengusulkan kerjasama dengan Kab. Tangerang dengan menggandeng KPK/Kejaksanaan mengenai Aset PDAM dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terimakasih atas apresiasinya, semoga kami dapat meningkatkan pendapatan dari retribusi pemakaian kekayaan daerah. 2. Aset PDAM saat ini sedang dalam proses penyelesaian Kerja sama pengelolaan bersama antara kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan dan 		

OPD	CATATAN DPRD	REKOMENDASI DPRD	RENCANA TINDAK LANJUT		
			JAWABAN/ TANGGAPAN	PROGRAM / KEGIATAN	TAHUN
		<p>Kewajiban Pengembang BSD 2% lahan</p> <p>3. Aset Pemkot Tangerang Selatan saat ini sebesar Rp. 21.1 Triliun.</p> <p>4. Terdapat 4.327 Aset yang akan disertifikasi. Mengenai permasalahan Aset Pemkot Tangerang Selatan yang sangat kompleks, Komisi III berdiskusi dengan Kepala BPKAD dan menyarankan dibentuknya OPD Khusus</p>	<p>prosesnya didampingi oleh KORSUGAH KPK.</p> <p>3. Aset Pemkot Tangerang Selatan pada LKPD 2020 (Unaudited) Rp.23.059.281.756.067,05</p> <p>4. Sampai dengan Maret 2021 sudah tercapai sertifikasi lahan sebanyak 331 bidang</p> <p>5. Untuk pemetaan bidang aset sekarang dalam pembahasan dengan bagian organisasi pada Sekretariat Daerah</p> <p>a. Diusulkan sebagai OPD</p> <p>b. Pembentukan UPT</p> <p>Penambahan/pemekaran bidang aset menjadi dua bidang</p>	<p>Pengelolaan barang milik daerah/Pengamanan barang milik daerah</p>	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	<p>1. Tidak adanya inovasi digital dalam pelayanan perpustakaan, sehingga pada masa pandemi Covid19 pelayanan perpustakaan tidak berjalan maksimal.</p> <p>2. Belum adanya inovasi digitalisasi arsip di Kota Tangerang Selatan.</p> <p>3. Keberadaan mobil perpustakaan keliling sudah banyak yang tidak layak beroperasi.</p>	<p>1. Meminta Kepada Pemerintah Daerah untuk membuat inovasi digital dalam pelayanan perpustakaan untuk meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat Tangerang Selatan.</p> <p>2. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan inovasi digital sebagai peningkatan pelayanan arsip.</p> <p>3. Meminta kepada Pemerintah Daerah untuk menganggarkan untuk pembelian mobil perpustakaan keliling.</p>	<p>1. Upaya meningkatkan literasi dan minat baca terus dilakukan melalui Inovasi Digital Perpustakaan yaitu iTangsel yang saat ini dapat diunduh pada aplikasi <i>Play Store</i>.</p> <p>2. Pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional Kota Tangerang Selatan (SIKN) akan ditingkatkan seiring dengan telah tersedianya gedung arsip daerah dan fungsional arsiparis.</p> <p>3. Penyediaan Sarana perpustakaan keliling akan dibahas pada RPJMD 2021-2026 dengan terlebih dahulu mempertimbangkan efektifitas iTangsel.</p>		

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai Program dan Kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Lebih lanjut penetapan IKU Pemerintah Kota Tangerang Selatan didasarkan pada ketercapaian indikator sasaran RPJMD hingga akhir priode 2021, sehingga untuk target perubahan RKPD Tahun 2021 diprioritaskan kepada Indikator Kinerja Utama yang masih perlu perhatian khusus (*negative change*) dalam penanganannya. IKU Priortas Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Priortas Kota Tangerang Selatan Tahun 2021

No	Indikator	Target IKU Akhir 2021	Tingkat Capaian IKU s.d 2020	Urutan Prioritas IKU 2021
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	6 % - 7,5%	-13,47%	1
2	Jumlah Investasi PMA	3.650.000.000 (USD)	1,30%	2
3	Jumlah Investasi PMDN	475.000.000.000 (IDR)	14,62%	3
4	Indeks kualitas lingkungan	61	88,52%	4
5	Tingkat kepuasan pelayanan publik	Mutu pelayanan A	90,00%	5
6	PDRB	79,50-86,49 Triliun	95,44%	6
7	PDRB perkapita	42.94-46,72 juta rupiah/tahun	98,18%	7
8	Indeks pembangunan gender	93,46-93,69	99,86%	8
9	Jumlah APBD	3,5 Triliun	88,57%	9
10	Indeks kelulusan SD/MI	100%	n/a	
11	Indeks kelulusan SMP	100%	n/a	
12	Angka Kematian Ibu (AKI)	32/ 100000 kelahiran hidup	100%	
13	Angka Harapan Hidup	72,129-72,135	100%	
14	Laju Pertumbuhan Penduduk (Proyeksi penduduk BPS)	2,87%	100%	
15	Load factor angkutan perkotaan	60%	n/a	
16	Angka kriminalitas	1450	n/a	
17	Jumlah inovasi produk unggulan	80	n/a	
18	Tingkat konsistensi antar dokumen	90%	n/a	
19	Opini BPK	WTP	100%	
20	Predikat Akip	B	100%	
21	Komposisi PAD terhadap APBD	49%	100,06%	
22	Ketahanan Pangan (Pola Pangan Harapan)	93,00%	101,53%	
23	RLS (Rata-rata Lama Sekolah)	11,60-11,63	101,55%	
24	Indeks kinerja jaringan jalan	90%	108,12%	
25	Indeks pemberdayaan gender	64,37-64,67	109,36%	

No	Indikator	Target IKU Akhir 2021	Tingkat Capaian IKU s.d 2020	Urutan Prioritas IKU 2021
26	Persentase kualitas sarana dan prasarana perkotaan	80%	115,33%	
27	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP	84,93%	116,38%	
28	Rasio ruang terbuka hijau terhadap luas wilayah kota	12%	118,75%	
29	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur Dasar (IKLI)	7	129,71%	
30	Rasio penyerapan tenaga kerja	65%	140,80%	
31	Angka Kematian Bayi (AKB)	1/ 1000 kelahiran hidup	167%	

Sumber : RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021

BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari periode RPJMD Kota Tangerang Selatan Tahun 2016-2021, yang tidak bisa lepas dari dinamika yang muncul sebagai akibat dari pembangunan yang telah dilaksanakan. sebagai wujud upaya mengakomodasi dinamika pembangunan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat yang sinergis dengan pencapaian tujuan pembangunan, maka pemerintah Kota Tangerang Selatan melakukan Perubahan RKPD Tahun 2021.

Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 disusun pada era pandemi COVID-19 belum berakhir. Dampak pandemi ini tidak hanya menysasar permasalahan di bidang kesehatan, namun juga berpengaruh buruk terhadap sektor-sektor lain, mulai dari pendidikan, ekonomi dan keuangan, infrastruktur, budaya, agama, pariwisata, dan lainlain. Salah satu indikator yang dapat dilihat adalah pertumbuhan ekonomi yang tertekan hingga mencapai angka -1,01. Angka ini menggambarkan begitu parahnya dampak pandemi ke hampir semua lapangan usaha. Atas dasar kondisi hasil evaluasi kinerja pembangunan sampai dengan triwulan II Tahun 2021, kondisi kapasitas kemampuan pendanaan yang bergeser dari target yang ditetapkan, serta adanya COVID-19 yang berdampak pada seluruh sektor pembangunan, menyebabkan diperlukannya perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 agar target dan sasaran pembangunan tetap dapat dicapai demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 merupakan dokumen rencana kerja tahunan Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2021.

Akhirnya Perubahan RKPD Kota Tangerang Selatan Tahun 2021 diharapkan dapat menciptakan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah, tentu saja sejalan dengan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam RKP Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Banten Tahun 2021. Dengan demikian maka pencapaian hasil-hasil pembangunan daerah berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan pembangunan secara nasional.

Tangerang Selatan, 25 Agustus 2021

WALI KOTA TANGERANG SELATAN,

ttd.

BENYAMIN DAVNIE